



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

PERAN *COLLABORATION GOVERNANCE* DALAM *DRUG PREVENTION* DI KABUPATEN PURWAKARTA



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

AGTA BHUWANA PUTRA

NIM. 500783492

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2019

ABSTRAK

PERAN *COLLABORATION GOVERNANCE* DALAM *DRUG PREVENTION* DI KABUPATEN PURWAKARTA

Agta Bhuwana Putra
(Alamat Email)

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran keluarga, masyarakat dan kepolisian dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan ditinjau berdasarkan pendekatan konsep *collaborative governance*. Penelitian ini dilakukan pada kepala keluarga di Kabupaten Purwakarta, adapun sampel dalam penelitian ini adalah Kecamatan Purwakarta dengan jumlah penduduk (*random sampling*) perdesa diambil 15 Kepala Keluarga.. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier ganda dibantu dengan menggunakan Program Statistik SPSS 15.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga, masyarakat, dan kepolisian secara bersama-sama berperan secara signifikan terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Purwakarta. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan peranan Keluarga, peranan Masyarakat dan peranan Kepolisian akan diikuti dengan peningkatan nilai pencegahan narkoba. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi setiap pihak dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, Peran Orang Tua, Peran Masyarakat, Peran Kepolisian, Penyalahgunaan Narkotika

ABSTRACTS

ROLE OF COLLABORATION GOVERNANCE IN DRUG PREVENTION IN PURWAKARTA DISTRICT

Agta Bhuwana Putra
(Email)

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

This study aims to determine how the role of family, society and the police in the context of overcoming narcotics abuse and is reviewed based on the conceptual approach of collaborative governance. This research was conducted on the head of the family in Purwakarta District, while the sample in this study was Purwakarta Subdistrict with a population of random sampling taken by 15 heads of households. The technical analysis used was multiple linear regression analysis assisted by using the SPSS 15.0 Statistical Program. The results of this study indicate that families, communities, and the police together have a significant role in efforts to prevent drug abuse in Purwakarta district. This is evidenced by the increase in the Role of the Family, the Role of the Community and the Role of the Police will be followed by an increase in the value of preventing drugs. For this reason, efforts need to be made to increase the participation of each party in reducing the rates of narcotics abuse.

Keywords: Collaborative Governance, Role of Parents, Role of Society, Role of Police, Narcotics Abuse

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul "Peran Collaboration Governance Drug Prevention di Kabupaten Purwakarta" adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Maret 2019

Yang Menyatakan,



Agta Bhuwana Putra

NIM.500783492

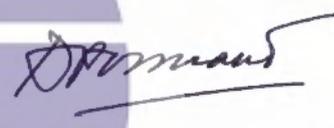
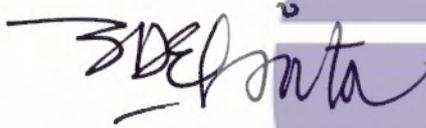
PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Peran *Collaboration Governance* dalam *Drug Prevention* di Kabupaten Purwakarta
Penyusun TAPM : Agta Bhuwana Putra
NIM : 500783492
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari / Tanggal : Kamis, 04 Oktober 2018

Menyetujui :

Pembimbing II,

Pembimbing I,



Dr. Bambang Deliyanto, M.Si
NIP. 195601271986021001

Djaka Permana, M.Si., Ph.D.
NUP. 090903265

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Magister
Administrasi Publik

Dekan Fakultas Hukum, Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 1959102719860311003



Dr. Sofjan Aripin, M.Si.
NIP. 19660619 199203 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Agta Bhuwana Putra
NIM : 500783492
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Peran *Collaboration Governance* dalam *Drug Prevention*
di Kabupaten Purwakarta

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 04 Oktober 2018
Waktu : 09.00 - 10.30

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Dr. Darmanto, M.Ed.



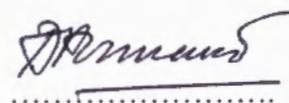
Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. Aries Djaenuri, M.A.



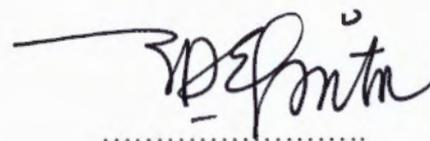
Pembimbing I

Nama : Djaka Permana, M.Si., Ph.D.



Pembimbing II

Nama : Dr. Bambang Deliyanto, M.Si



RIWAYAT HIDUP

Nama : Agta Bhuwana Putra

NIM : 500643898

Program Studi : Magister Admonistrasi Publik

Tempat /Tanggal lahir : Jakarta, 16 September 1986

Riwayat Pendidikan :

Lulus SDS Angkasa Halim Perdanakusuma Tahun 1998

Lulus SMP Lab School Rawamangun – Jakarta Tahun 2001

Lulus SMA Negeri 67 –Jakarta Tahun 2004

Lulus Taruna Akademik Kepolisian Indonesia Tahun 2007

Lulus PTIK (S1) Tahun 2015

Riwayat Pekerjaan :

Tahun 2007 – 2010 di Serse Polres Amurang Manado Sulawesi Utara

Tahun 2011 – 2013 Kanit Reskrim Polres Sukajadi Bandung Jabar

Tahun 2012 – 2016 Bareskrim Polda Jakarta

Tahun 2016 – 2018 Kanit Reskrim Purwakarta

Tahun 2018 – sekarang Kanit Reskrim Polda Jabar

Jakarta, Maret 2019

Yang Menyatakan,

Agta Bhuwana Putra

NIM.500783492

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Dalam penyusunan TAPM ini, peneliti mendapat motivasi dan dukungan dari beberapa pihak, oleh karena itu peneliti ucapkan terima kasih kepada:

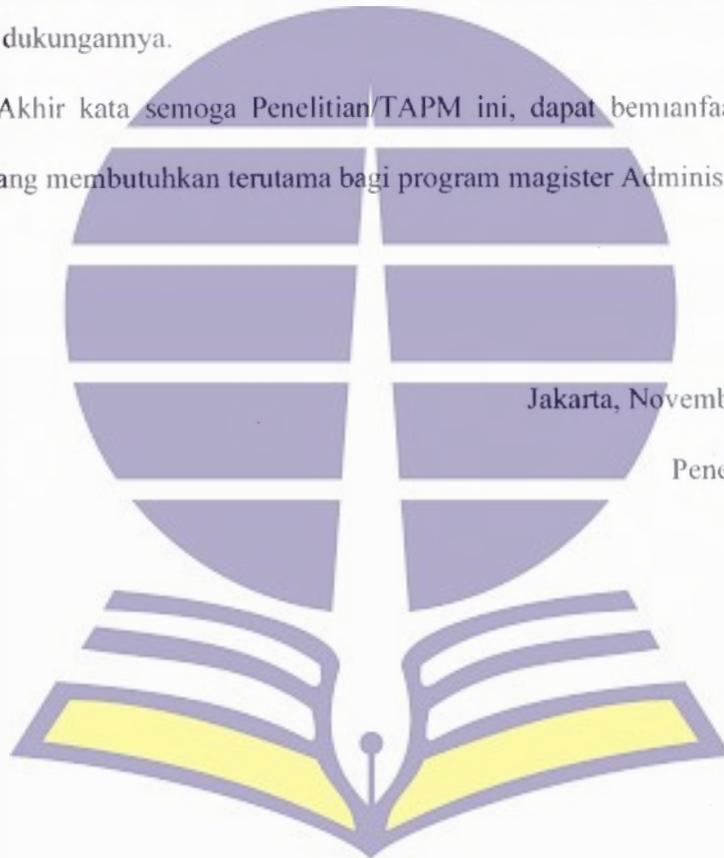
1. Rektor Universitas Terbuka, Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. Sofjan Arifin, M.Si.
3. Ketua Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana (P4s) Dr. Siti Julaeha, M.A.
4. Kepala UPBJJ Jakarta Dra. Eko Kuswanti, M.Pd.
5. Pembimbing I, Dr. Djaka Permana, M.Si., Ph.D yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan penyusunan TAPM.
6. Pembimbing II, Dr. Ir. Bambang Deliyanto, M.Si, yang telah membimbing penyusunan TAPM dengan penuh kesabaran.
7. Ketua Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Dr. Darmanto, M.Si
8. Prof. Dr. Aries Djaenuri, sebagai penguji ahli dengan kesabarannya memberikan masukan dan saran guna perbaikan penyusunan TAPM

9. Kedua orang tua yang telah memberikan motivasi untuk selalu belajar dan belajar serta doa yang tiada henti dengan penuh pengertian dan bijaksana selalu mendukung dan membantu dalam mewujudkan cita-cita.
10. Istri dan anak- anaku dengan penuh pengertian dan mendukung dalam proses belajar.
11. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu atas segala doa dan dukungannya.

Akhir kata semoga Penelitian/TAPM ini, dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama bagi program magister Administrasi Publik.

Jakarta, November 2018

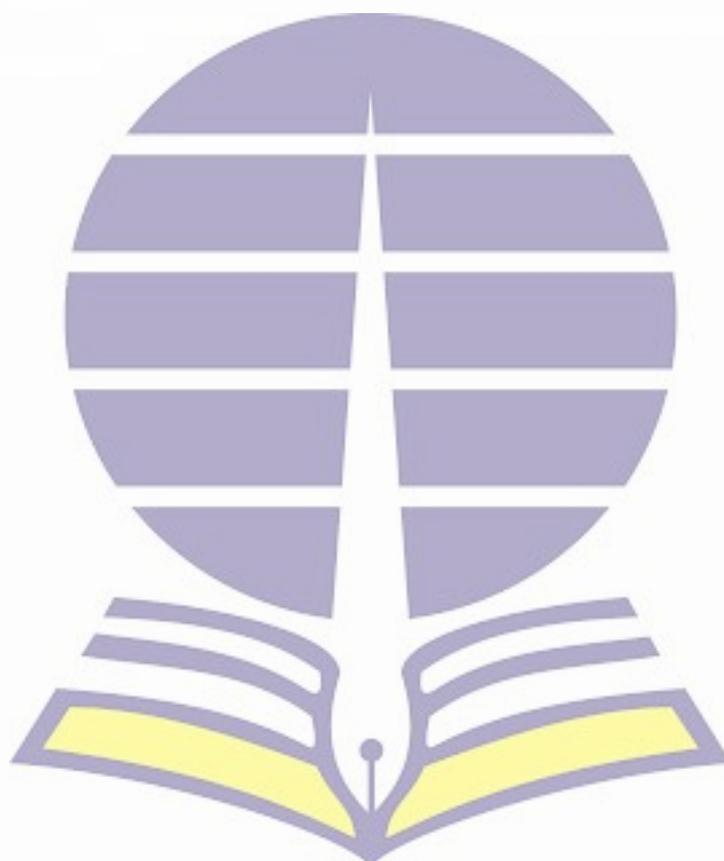
Peneliti



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Kebijakan	9
1. Konsep Kebijakan Publik	10
2. Implementasi Kebijakan Publik.....	11
3. Evaluasi Kebijakan Publik.....	13
4. Konsep <i>Governance</i>	15
5. <i>Collaborative Governance</i>	18
6. Karakteristik Kemitraan.....	22
7. Arena Kemitraan.....	24
8. Manfaat dan Motivasi <i>Collaborative Governance</i>	27
9. Kendala <i>Collaborative Governance</i>	29
10. Pengertian NAZPA	37
11. Penyalahgunaan NAZPA	39
12. Pencegahan Terhadap Narkoba	41
13. Disfungsional Family dan Narkoba	43
B. Penelitian Terdahulu	45
C. Kerangka Berpikir.....	49
D. Hipotesis Penelitian	52
BAB III METODOLOGI	
A. Desain Penelitian	53
B. Populasi dan Sample Penelitian.....	53
C. Instrumen Penelitian	54
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	57
E. Metode Analisis Data	58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	60
B. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	68
C. Pembahasan Hasil Penelitian	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111



Daftar Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	49
Gambar 4.1 Gambaran Pekerjaan Responden	60
Gambar 4.2 Gambaran Usia Responden.....	61
Gambar 4.3 Gambaran Latar Pendidikan Responden.....	62
Gambar 4.4 Gambaran Penghasilan Responden.....	64
Gambar 4.5 Gambaran Jumlah Anggota Keluarga Responden	65
Gambar 4.6 Gambaran Jumlah Anak Responden.....	66
Gambar 4.7 Gambaran Rentang Usia Anak Responden.....	67
Gambar 4.8 Gambaran Hasil Kuesioner Mengenai Peran Keluarga	75
Gambar 4.9 Gambaran Hasil Kuesioner Mengenai Peran Masyarakat	78
Gambar 4.10 Gambaran Hasil Kuesioner Mengenai Peran Kepolisian.....	80
Gambar 4. 11 Gambaran Hasil Kuesioner Mengenai Pencegahan Narkoba	83



Daftar Grafik

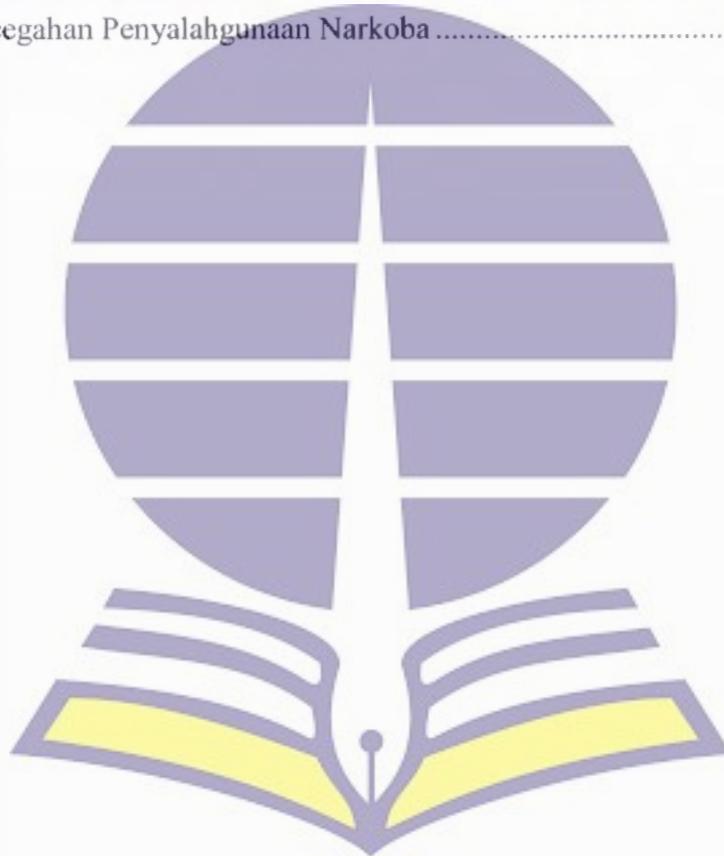
Grafik 1.1 Presentase Penggunaan Narkoba Usia Sekolah di Jawa Barat (2004)2



Daftar Tabel

Tabel 2.1 Perbedaan antara Kemitraan dan Kerjasama Non-Kemitraan	23
Tabel 2.2 Operasionalisasi variable penelitian	50
Tabel 3.1 Instrumen Penelitian	55
Tabel 4.1 Item-Total Statistics Uji Validitas Peranan Keluarga.....	69
Tabel 4.2 Reliability Statistics Peranan Keluarga	70
Tabel 4.3 Item-Total Statistics Uji Validitas Peranan Masyarakat.....	71
Tabel 4.4 Reliability Statistics Peranan Masyarakat	72
Tabel 4.5 Item-Total Statistics Uji Validitas Peranan Kepolisian	72
Tabel 4.6 Reliability Statistics Peranan Kepolisian.....	73
Tabel 4.7 Item-Total Statistics Uji Validitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	73
Tabel 4.8 Reliability Statistics Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	74
Tabel 4.9 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi	86
Tabel 4.10 Correlations Peranan Keluarga terhadap Pencegahan Narkoba.....	86
Tabel 4.11 Coefficients ^a Peranan Keluarga terhadap Pencegahan Narkoba	87
Tabel 4.12 Model Summary Peranan Keluarga terhadap Pencegahan Narkoba	88
Tabel 4.13 Coefficients ^a Peranan Keluarga terhadap Pencegahan Narkoba	88
Tabel 4.14 ANOVA ^b Peranan Keluarga terhadap Pencegahan Narkoba	89
Tabel 4.15 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi	90
Tabel 4.16 Correlations Peranan Masyarakat terhadap Pencegahan Narkoba	90
Tabel 4.17 Coefficients ^a Peranan Masyarakat terhadap Pencegahan Narkoba	91
Tabel 4.18 Model Summary Peranan Masyarakat terhadap Pencegahan Narkoba	92
Tabel 4.19 Coefficients ^a Peranan Masyarakat terhadap Pencegahan Narkoba	92
Tabel 4.20 ANOVA ^b Peranan Masyarakat terhadap Pencegahan Narkoba	93
Tabel 4.21 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi	93
Tabel 4.22 Correlations Peranan Kepolisian terhadap Pencegahan Narkoba.....	94
Tabel 4.23 Coefficients ^a Peranan Kepolisian terhadap Pencegahan Narkoba.....	95
Tabel 4.24 Model Summary Peranan Kepolisian terhadap Pencegahan Narkoba	96
Tabel 4.25 Coefficients ^a Peranan Kepolisian terhadap Pencegahan Narkoba.....	96
Tabel 4.26 ANOVA ^b Peranan Kepolisian terhadap Pencegahan Narkoba.....	97

Tabel 4.27 Model Summary Peranan Keluarga, Masyarakat Dan Kepolisian Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	98
Tabel 4.28 ANOVA ^b Peranan Keluarga, Masyarakat Dan Kepolisian Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	99
Tabel 4.29 Model Summary Peranan Keluarga, Masyarakat Dan Kepolisian Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	100
Tabel 4.30 Coefficients ^a Peranan Keluarga, Masyarakat Dan Kepolisian Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	100
Tabel 4.31 Coefficients ^a Peranan Keluarga, Masyarakat Dan Kepolisian Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini penyalahgunaan narkoba meresahkan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya pengguna maupun pengedar narkoba, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika merupakan masalah serius karena akan mengancam keamanan dan ketahanan nasional. Hal tersebut disebabkan oleh dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba yang dapat merubah tingkah laku psikis pada pemakainya. Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Puslitkes UI pada tahun 2017, diketahui sekitar 1,77% atau 3,3 juta penduduk Indonesia menjadi penyalahguna narkoba dengan jumlah kerugian ekonomi maupun sosial mencapai Rp 84,7 triliun.

Data tersebut diperkuat dengan pernyataan David Hutapea, Direktorat Diseminasi Informasi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (id.beritasatu.com, edisi 19 Maret 2018) menyatakan bahwa:

Jumlah prevalensi pengguna narkoba dari tahun ketahun terlihat meningkat. Pada 2016 masih 0,02% dari total penduduk Indonesia dan pada 2017 menjadi 1,77%. Adapun kerugian yang disebabkan penyalahgunaan narkoba sepanjang 2017 paling besar pada kerugian sosial yakni sebesar Rp 77,4 triliun dan kerugian pribadi Rp 7,3 triliun. Selain kerugian material, permasalahan narkoba di Indonesia juga sudah menyebabkan korban meninggal, yakni diperkirakan 11.071 orang per tahun atau 30 orang perhari. Dari total pengguna narkoba tersebut, mayoritas adalah pekerja (59%), disusul pelajar (24%) dan populasi umum (17%). Sebanyak 2 dari 100 orang pelajar dan mahasiswa menyalahgunakan narkoba sepanjang 2016, dan

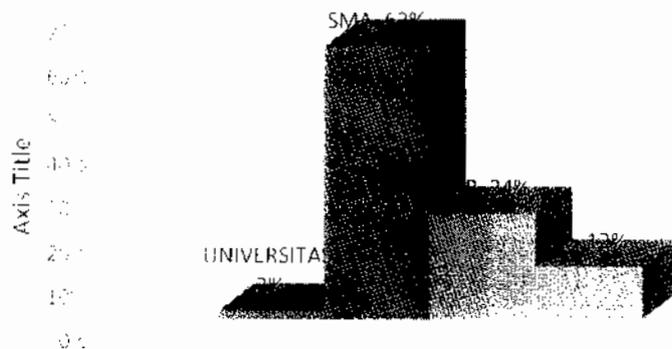
kebanyakan pria. Dengan umur pengguna dari pelajar mayoritas berumur 15-19 tahun.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya membahayakan dirinya sendiri namun juga masyarakat sekitarnya. Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman bagi kelangsungan generasi, karena dampak kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya pada skala kecil namun juga pada skala besar. Kerugian yang ditimbulkan, baik itu materi dan non-materi begitu besar, sehingga masyarakat dan pemerintah tidak bisa mengabaikan bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Dalam kaitan ini pemerintah berperan aktif mensosialisasikan dan melakukan perlawanan terhadap berbagai upaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Saat ini upaya pencegahan sudah secara menyeluruh termasuk memberi hukuman maksimal kepada pengedar narkoba di Indonesia, yaitu sampai dengan hukuman mati.

Data terkait kasus penyalahgunaan narkoba antara lain dijelaskan oleh Badan Narkotika Nasional (2016) menyatakan bahwa:

Pelajar dan mahasiswa masih menjadi kelompok rentan pengguna narkoba. Sebanyak empat juta orang di Indonesia yang menyalahgunakan narkoba, 22 persen di antaranya merupakan anak muda yang masih duduk di bangku sekolah dan universitas. Sedangkan perkembangan peredaran dan penggunaan narkoba secara keseluruhan dari waktu ke waktu cenderung meningkat, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) di tahun 2015, kenaikan persentase pengguna narkoba di Indonesia mencapai 40%, sebelumnya pada bulan Juni 2015 tercatat 4,2 juta pengguna narkoba dan pada November meningkat signifikan hingga mencapai 5,9 juta.

Untuk wilayah Jawa Barat saat ini jumlah pengguna penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat terus meningkat setiap tahunnya. Dari jumlah penduduk yang ada, kondisi di Jawa Barat saat ini sudah mencapai 2,5 % pengguna narkoba dari usia produktif, yakni di usia 10 tahun hingga 59 tahun. Berdasarkan data nasional, saat ini satu dari 17 orang berusia 10 hingga 59 tahun pernah memakai narkoba dan jumlah penggunanya pun cukup banyak di tingkat pelajar, seperti yang dapat terlihat pada grafik berikut:



Grafik 1.1 Persentase Pengguna Narkoba Usia Sekolah di Jawa Barat tahun 2014

Sumber: <http://pusdalisbang.jabarprov.go.id>

Berdasarkan grafik diatas yang bersumber dari data nasional pada tahun 2014 dapat diketahui bahwa pada tingkat SMA, pengguna narkoba paling banyak yakni sebanyak 62%, kemudian di tingkat SMP sebanyak 24%, SD sebanyak 12%, dan perguruan tinggi sebanyak 2%. Dengan demikian kecenderungan usia rawan yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah yang duduk di bangku SMA atau berusia antara 15-18 tahun.

Pada tahun 2015, BNN berhasil mengamankan sekitar 3 ton sabu yang berarti menyelamatkan banyak generasi muda. Satu gram sabu dapat digunakan untuk 5 orang, sehingga dengan mengamankan 3 ton sabu artinya sama dengan berapa ribu jiwa yang telah diselamatkan. Penggunaan Narkotika, psikotropika dan zat adaptif sangat berbahaya bagi manusia, sehingga perlu adanya pencegahan maupun penanggulangan secara serius dan terarah yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah maupun Polri, Lembaga Sosial Masyarakat dan Keluarga, sesuai dengan Undang Undang (UU) Nomor 35 tahun 2009 pasal 105, 106 dan 107 tentang keikutsertaan masyarakat dalam menanggulangi peredaran dan bahaya Narkoba.

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi *humanis* kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi *humanis* itu dapat dilihat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan; “Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa; “orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara”. Hal tersebut memiliki makna yaitu undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara.

Merujuk pada arahan Kasat Narkoba Polres Purwakarta yang menjelaskan bahwa sedikitnya ditemukan lima wilayah di Kab. Purwakarta masuk dalam zona merah peredaran narkoba (pikiran-rakyat.com, Edisi 13 Maret 2017). Berdasarkan pemetaan, sedikitnya terdapat lima titik rawan yang masuk zona merah peredaran. Kecamatan Purwakarta, Pasawahan, Darangdan, Plered, dan Sukatani. Target sasaran bukan hanya remaja, tapi semua kalangan. Di kota (Kecamatan Purwakarta, red) hampir menyeluruh (peredaran narkoba). Bukan hanya remaja (targetnya), tapi semua lapisan masyarakat.

Pada tahun 2017, ratusan orang terjerat dalam kasus Narkoba di Kabupaten Purwakarta, jumlah tersebut tentunya sangat memprihatinkan hal itu menandakan kondisi Purwakarta yang dijadikan sasaran ajang bisnis haram oleh para bandar Narkoba. Para pelaku yang terjerat Narkoba kebanyakan di dominasi oleh para pria, yang

disayangkan rata-rata usia para pelaku masih usia sangat produktif. Adapun penuturan Kasat Narkoba Polres Purwakarta Polda Jabar AKP. Heri Nurcahyo, SH kepada awak media di Polres Purwakarta (Detiknews.com Edisi 21 Desember 2017) menyatakan; “hingga saat ini ini para pelaku yang terjerat Narkoba sudah kami amankan sebanyak 116 tersangka yang terjadi di 75 TKP. Para pelaku sudah masuk P21 sebanyak 98 Orang. Selama 2017 Polres Purwakarta berhasil mengamankan narkoba jenis sabu sebanyak 720,1938 gram. Sedangkan untuk jenis ganja sebanyak 54812,4164 gram dan untuk jenis obat-obatan sebanyak 3.680 Butir. Pihak kepolisian meminta kepada masyarakat untuk bekerjasama dalam memberikan informasi berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba, karena sekecil apapun informasi yang berkaitan dengan narkoba akan ditindak lanjuti”.

Melalui pemaparan diatas dapat diketahui Kabupaten Purwakarta termasuk dalam zona merah peredaran narkoba, dan pelaku yang terjerat narkoba berada dalam usia produktif. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan, “kelompok usia produktif adalah mereka yang berada dalam rentang usia 15 sampai dengan 64 tahun”, dalam hal ini usia remaja termasuk dalam usia produktif yang rentan karena usia remaja merupakan masa transisi dalam rentang kehidupan manusia yang menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa. Kecenderungan anak menyalahgunakan narkoba tidak dapat dilepaskan dari peran dan tanggung jawab orang tua.

Pada penelitian (Browning & Loeber, dalam Brank, Lane, Turner, Fain, dan Sehgal, 2008) ada dua kelompok besar faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja: perilaku orang tua dan hubungan orang tua-anak. Salah satu perilaku orang tua adalah pemantauan orang tua. Pemantauan orang tua yang lebih besar, ditandai dengan mengetahui keberadaan anak-anak mereka atau mengawasi mereka, tampaknya berkaitan dengan perilaku kurang nakal. Penelitian lain mengenai hubungan orang tua-

anak telah menunjukkan bahwa komunikasi yang lebih terbuka antara remaja dan orang tua mereka berhubungan dengan lebih sedikit perilaku nakal (Clark & Shields, dalam Brank dkk, 2008). Selanjutnya penelitian Sigfusdottir, Farkas, dan Perak (dalam Brank Brank, Lane, Turner, Fain, dan Sehgal, 2008) menunjukkan bahwa konflik keluarga memiliki efek tidak langsung pada kenakalan dengan menyebabkan kemarahan lebih untuk remaja yang kemudian menyebabkan perilaku nakal. Perilaku orang tua dan hubungan orang tua-anak keduanya memiliki pengaruh terhadap penyesuaian diri remaja dan perilaku. Smith, Wylie-Weiher, dan Van Kammen (dalam Sullivan, 2006) menemukan bahwa pemuda yang melaporkan hubungan yang lemah dengan orang tua mereka secara signifikan lebih mungkin untuk penggunaan narkoba.

Keluarga diharapkan selalu memiliki dampak positif yang baik untuk perkembangan masa remaja, karena masa remaja merupakan masa pencarian identitas diri. Remaja memiliki kecenderungan untuk mencontoh dan ingin memberikan kesan bahwa remaja sudah hampir dewasa. Remaja mendekati diri pada perubahan sikap dan perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, yaitu merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan dan masuk dalam perbuatan yang melanggar norma untuk memberikan norma yang diinginkan (Hurlock, 1999).

Dalam kaitan ini peran masyarakat dimana keluarga tersebut tinggal dan aparat kepolisian juga diduga memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari hasil penelitian terdahulu dan studi pendahuluan. Penelitian terdahulu yang membahas tentang peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkotika juga dilakukan oleh Fauziah (2015) dijelaskan bahwa:

Beberapa peran yang dapat dilakukan orang tua dalam menanggulangi kenakalan remaja meliputi; orangtua harus menjadi teladan sikap dan ucapan pada anaknya,

motivasi anak, orangtua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul. Orangtua berusaha menciptakan keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi remaja, serta membantu remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik untuknya.

Terdapat pula kajian konseptual yang dilakukan oleh Herdayani dan Rosalinda (2013) yang menjelaskan tentang,

Peran orang tua dan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam keluarga. Dijelaskan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika memang tidak mudah, melainkan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam hal ini keluarga dan masyarakat perlu bekerjasama untuk melakukan upaya pencegahan tersebut.

Berdasarkan kondisi di atas kolaborasi antara pihak-pihak yang terkait dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam hal ini keikutsertaan keluarga, masyarakat, dan kepolisian diduga memiliki peran yang signifikan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika. Namun demikian masih perlu diteliti lebih jauh apakah benar bahwa peran *collaboration governance* dalam *drug prevention* di Kabupaten Purwakarta. Dengan demikian perlu diteliti lebih jauh, khususnya di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Pengguna narkotika di wilayah Jawa Barat terutama Kabupaten Purwakarta meningkat dari tahun ke tahun.
2. Pengguna narkotika berada pada usia produktif dan cukup banyak di tingkat pelajar
3. Berdasarkan pemetaan, sedikitnya terdapat lima titik rawan di wilayah Kab. Purwakarta yang termasuk zona merah peredaran.

4. Konflik keluarga memiliki efek tidak langsung pada kenakalan dengan menyebabkan kemarahan lebih untuk remaja yang kemudian menyebabkan perilaku nakal.
5. Pihak kepolisian meminta kepada masyarakat untuk bekerjasama dalam memberikan informasi berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran keluarga terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana peran masyarakat terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana peran kepolisian terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Purwakarta?
4. Bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan kepolisian secara bersama-sama terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Purwakarta?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi:

1. Peran keluarga terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Purwakarta.
2. Peran masyarakat terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Purwakarta.

3. Peran kepolisian terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Purwakarta.
4. Peran keluarga, masyarakat, dan kepolisian secara simultan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Purwakarta.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk berbagai pihak. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik dalam lingkup *Collaboration Governance* khususnya dalam *Drug Prevention* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kajian bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi *collaboration governance* dalam *drug prevention* pada penerapan Ilmu Administrasi Publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan

Kebijakan telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Adapun pengertian dari Hoogerwerf (2009:3-4) memberikan definisi tentang kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan dapat dilukiskan sebagai suatu usaha untuk mencapai sasaran tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah. Kebijakan adalah upaya untuk memecahkan, mengurangi, atau mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yaitu tindakan yang terarah.

Sementara itu, Islamy dalam Suwitri (2009: 5) berpendapat bahwa, "kata kebijakan berasal dari kata *policy* yang pelaksanaannya mencakup peraturan-peraturan di dalamnya dan sangat berkaitan dengan proses politik".

Secara filosofis, kebijakan dipandang sebagai serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu "produk". Keban (2008: 59) mengartikan kebijakan sebagai:

Serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, sebagai suatu proses kebijakan menunjuk pada cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode.

Dengan demikian yang dimaksud kebijakan adalah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari aktor atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan. Kemudian menurut Abidin (2004:31-33) menyatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa kebijakan adalah suatu upaya untuk merumuskan sasaran tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Kebijakan adalah peraturan-peraturan yang merupakan jawaban terhadap suatu masalah tertentu.

1. Konsep Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik dijelaskan oleh Nugroho (2004: 1-7) yaitu;

Istilah kebijakan publik sering disebut dengan *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Mustopadidjaja (2007:5) yang menjelaskan bahwa:

Kebijakan publik sebagai suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan.

Selanjutnya Dunn (2000: 11) menguraikan pengertian analisis kebijakan, sebagai berikut:

Analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Dengan demikian berdasarkan pengertian diatas diketahui bahwa aturan atau peraturan tersebut secara sederhana dipahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat diartikan sebagai suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum

namun harus dipahami secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Adapun tahap-tahap penyusunan kebijakan publik menurut Dunn (2000:11) adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)
- b. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*)
- c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (*Policy Adoption*)
- d. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)
- e. Penilaian atau Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

2. Implementasi Kebijakan Publik

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Tangkilisan (2003:9) mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki bahwa:

Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan

program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi relisasi program yang dilaksanakan. Dunn (2003:132) mengistilahkan implementasi dengan lebih khusus dengan menyebutnya: "implementasi kebijakan (*policy implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu.

Pendapat lain menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Nugroho (2004:158) menjelaskan yaitu:

Untuk mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Kebijakan publik tersebut diimplementasikan melalui bentuk program-program serta melalui turunan. Turunan yang dimaksud adalah dengan melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi. Menurut Darwin dalam Widodo (2001:194) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi,

Empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.

Persiapan prosce implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterpretasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang

baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Dalam Subarsono, 2005:101) mengemukakan bahwa:

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosio cultural serta keterlibatan penerima program.
- b. Hubungan antar organisasi. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- c. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program. Implementasi kebijakan perlu disukung sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).
- d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Maksudnya adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk mengimplementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn (2003:608), memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:

Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Leo Agustino (2006: 186) dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* bahwa “evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan”. Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.

Adapun menurut Taliziduhu Ndraha (1989:201) dalam buku *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia* berpendapat bahwa “evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Sudarwan Danim (2000: 14) mengemukakan definisi penilaian (*evaluating*) adalah:

Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu:

- a. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
- b. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen

- c. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai.

Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya. Adapun menurut Muchsin (2002:110), “evaluasi kebijakan pemerintah adalah sebagai hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau gagal mencapai tujuan dan dampak-dampaknya”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.

4. Konsep *Governance*

Kaufman, Kraay, dan Mastruzzi dalam Syafri (2012: 180) mendefenisikan *governance* sebagai

“Governance is the relationship between governments and citizen that enable public policies and program to be formulated, implemented, and evaluated. In the broader context, it refers to the rules, institutions, and networks that determine how a country or an organization function” (governance adalah hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya yang memungkinkan berbagai kebijakan publik dan program dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi)

Pergeseran *government* ke *governance* dimaksudkan untuk mendemokratisasi administrasi publik. *Government* menunjuk kepada institusi pemerintah terutama dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan. Sementara itu, *governance* menunjuk kepada keterlibatan *Non Governmental Organization* (NGO), kelompok-kelompok kepentingan,

dan masyarakat. disamping institusi pemerintah dalam pengelolaan kepentingan umum, terutama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Berbagai kebijakan dan program diarahkan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat dan dilakukan melalui tindakan kolektif dan proses kolaboratif.

Dalam konsep *governance* pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dalam kebijakan publik maupun dalam hal pelayanan publik. Dalam hal ini pemerintah tidak menjadi pelaksana tunggal birokrasi yang baik namun ada stekholder lainnya yaitu sektor swasta dan juga masyarakat. Menurut Dwiyanto (2005: 79) *governance* menunjuk padapengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadiurusan pemerintah. *Governance* menekankan pada pelaksanaan fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lainyakni LSM, perusahaan swasta maupun warga negara. Meskipun perspektif *governance* mengimplikasikan terjadinya pengurangan peran pemerintah, pemerintah sebagai institusi tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Andrew dalam Syafri (2012: 180) mendefenisikan *governance* sebagai cara dimana pemerintah bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dalam masyarakat, menerapkan kewenangan dan mempengaruhi dalam mengusabakan kesejahteraan masyarakat dan tujuan jangka panjang suatu bangsa. Sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah berjangka panjang maka dari itu upaya kesejahteraan masyarakat pada negara demokratis perlu untuk melibatkan semua pemangku kepentingan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

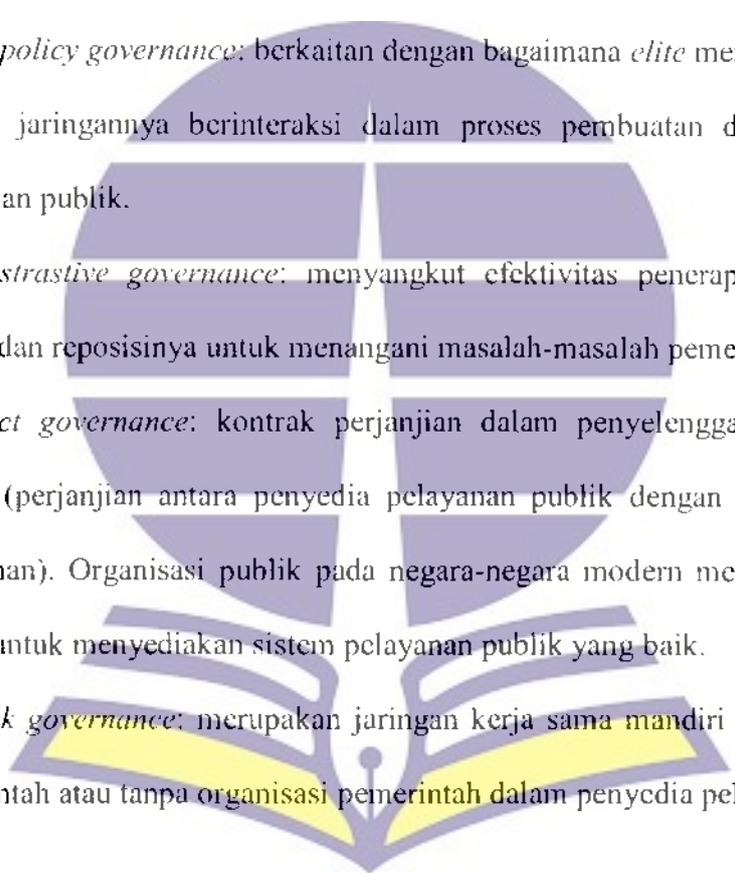
Terkait dengan pemahaman tersebut Boon dan Geraldine dalam Syafri (2012: 181) memaknai *governance* sebagai penentuan berbagai kebijakan, institusi, dan struktur yang dipilih, yang secara bersama mendorong untuk memudahkan interaksi ke arah

kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial yang lebih baik lagi. Dengan pemahaman *governance* tersebut, konsep operasional *governance* (tata kelola) adalah cara yang ditempuh pemerintah suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan bagi pencapaian tujuan negara.

Ada beberapa dimensi penting *governance* menurut Bank Dunia yaitu: (1) kebebasan dan akuntabilitas, perluasan peran serta masyarakat dalam memilih penyelenggara pemerintahan, kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan pers; (2) stabilitas politik dan tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi pergantian pemerintahan lewat kekerasan secara tidak konstitusional atau melalui terorisme; (3) pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas oleh aparatur pemerintahan untuk membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan yang berkualitas; (4) aturan perundang-undangan yang berkualitas, kemampuan pemerintah untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang mendorong peran swasta dalam pembangunan; (5) penegakan hukum, meyakinkan berbagai pihak bahwa aturan hukum akan dipatuhi, terutama kontrak-kontrak yang telah disepakati, demikian juga polisi, jaksa dapat menegakkan hukum secara adil; (6) pengendalian atau penghapusan korupsi.

Istilah *public governance* menunjuk pada saling interaksi antara para *stakeholder* dengan tujuan mempengaruhi hasil kebijakan publik (Bovaird & Löffler dalam Syafri 2012: 198). *Stakeholder* yang dimaksud adalah masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga politik, media massa, politisi, organisasi nirlaba, kelompok kepentingan, dan sebagainya (Syafri 2012: 198)

Menurut Osborne (Syafri 2012: 198) *public governance* berisi lima untaian sebagai berikut:

- 
- a. *Socio-political governance*: menyangkut hubungan antar institusi dalam masyarakat. Hubungan timbal balik antar institusi dalam masyarakat perlu dipahami secara totalitas dalam pembuatan ataupun implementasi kebijakan publik. Dalam konsep demikian, pemerintah tidak lagi menjadi dominan dalam pembuatan kebijakan publik, tetapi bergantung kepada keseluruhan elemen masyarakat.
 - b. *Public policy governance*: berkaitan dengan bagaimana *elite* membuat kebijakan beserta jaringannya berinteraksi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.
 - c. *Administrative governance*: menyangkut efektivitas penerapan administrasi publik dan reposisinya untuk menangani masalah-masalah pemerintah
 - d. *Contract governance*: kontrak perjanjian dalam penyelenggaraan pelayanan publik (perjanjian antara penyedia pelayanan publik dengan pihak penerima pelayanan). Organisasi publik pada negara-negara modern memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem pelayanan publik yang baik.
 - e. *Network governance*: merupakan jaringan kerja sama mandiri antar organisasi pemerintah atau tanpa organisasi pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik.

5. *Collaborative Governance*

Istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung stakeholder di luar negara, berorientasi konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2007, dalam Setyoko 2011: 15)

Fokus dari pada *collaborative governance* ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus diantara para *stakeholder*. *Collaborative governance* menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik (Setyoko 2011: 16)

Menurut O'Leary dan Bingham dalam Sudarmo (2015: 195) "kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses fasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian". Pendapat ini didukung oleh Bardach dalam Sudarmo (2015: 195) yang mendefinisikan "*collaboration* sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerjasama ditujukan untuk meningkatkan *public value* ketimbang bekerja sendiri-sendiri".

Definisi *Collaborative governance* menurut Ansell and Gash (2007) dalam Subarsono (2016: 175) menyatakan :

A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets. (*Collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholders non state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset).

Defenisi tersebut dapat dirumuskan menjadi beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karakteristik, yaitu:

- a. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.
- b. Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non-publik

- e. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk kepada aktor-aktor publik.
- d. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama.
- e. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.
- f. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Edward DeSeve (2007) dalam Sudarmo (2011) mendefinisikan *Collaborative Governance* adalah sebagai berikut:

“An integrtd system og relationships that is managed across formal and informal organizational boundaries with reconginized organizational principles and clear defenition of success” (Sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintasi batas-batas organisasi formal dan informal dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi dan defenisi kesuksesan yang jelas).

Sejalan O’Flynn dan Wanna (2008), *“collaborate is better, it is creative, transformational and involves beneficial outcomes”*. Berkolaborasi lebih baik, kreatif, transformasional dan mendatangkan hasil yang bermanfaat.

Selanjutnya Agrawal dan Lemos dalam Subarsono (2016:176) mendefinisikan

Collaborative governance tidak hanya terbatas pada steholder yang terdiri dari pemerintah dan non pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya multipartner governance yang meliputi sektor privat/swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran stekholder dan penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama publik-privat-sosial.

Sejalan dengan itu Balogh dkk dalam Subarsono (2016: 176) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai:

“The processes and struktures of public policy decision making and mangement that engage people constructively across the boudaries of public agencies, levels of government, and/or the public, privat and civic spheres in the order to carry out a public purposethet could not otherwise be accomplished”(Sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta, dan

masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja).

Robertson dan Choi (2010: 10) mendefinisikan,

Collaborative governance sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan didalamnya memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan dan setiap stakeholder memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut.

Sementara Bovaird dalam Dwiyanto (2011: 252) mendefinisikan

Kemitraan antara pemerintah dan swasta secara sederhana sebagai pengaturan pekerjaan berdasarkan komitmen timbal balik, melebihi dan diatas yang diatur dalam setiap kontrak, antara satu organisasi di sektor publik dengan organisasi di luar sektor publik.

Dari defenisi yang dikemukakan oleh Bovaird tersebut secara jelas mengatakan bahwa kemitraan melibatkan bentuk kerjasama yang lebih dari sekedar kontrak kerja sama. Kerjasama yang dijelaskan dalam konsep kemitraan antara sektor publik dan swasta adalah kerja sama masing-masing pihak memiliki kepedulian melebihi apa yang tertulis dalam kontrak.

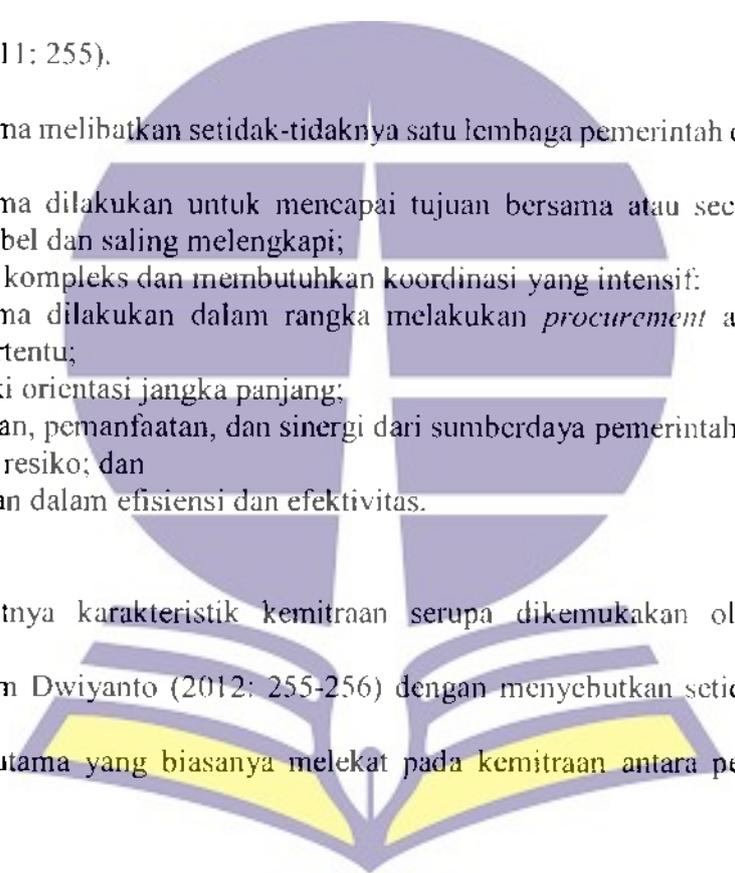
Kemitraan antara pemerintah dengan swasta berbeda dengan bentuk kerjasama lainnya, seperti kontrak kerja, swastanisasi, dan *outsourcing*. Tipe kerja sama seperti itu lebih merupakan kerjasama antar pemerintah dan swasta untuk menyelesaikan masalah dari satu pihak, bukan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah bersama dari kedua pihak (Dwiyanto 2011: 255).

Collaborative governance dimaknai sebagai bersatunya institusi publik dan pihak terkait (*stakeholders*) nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan melalui konsensus dan partisipasi yang hasilnya ditanggung bersama dalam pelaksanaan kebijakan atau program. Model *governance* ini dicirikan, antara lain adanya kesetaraan di antara *stakeholders*, sifat partisipatif dan menghindari tekanan politis dan administratif

(konsensus), kendati struktur formal, tetap lentur dan cenderung sederhana, dan fokus terhadap penyelesaian kebijakan dan program secara lebih efektif.

6. Karakteristik Kemitraan

Untuk memperjelas perbedaan antara kedua tipe kerjasama tersebut, berikut dijelaskan karakteristik dari kemitraan pemerintah dan swasta oleh Leinhard dalam Dwiyanto (2011: 255).

- 
- a. Kerjasama melibatkan setidaknya-tidaknya satu lembaga pemerintah dan satu lembaga swasta;
 - b. Kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan bersama atau secara timbal balik kompatibel dan saling melengkapi;
 - c. Bersifat kompleks dan membutuhkan koordinasi yang intensif;
 - d. Kerjasama dilakukan dalam rangka melakukan *procurement* atau pelaksanaan tugas tertentu;
 - e. Memiliki orientasi jangka panjang;
 - f. Penyatuan, pemanfaatan, dan sinergi dari sumberdaya pemerintah dan swasta;
 - g. Berbagi resiko; dan
 - h. Perolehan dalam efisiensi dan efektivitas.

Selanjutnya karakteristik kemitraan serupa dikemukakan oleh Gazley dan Brudney dalam Dwiyanto (2012: 255-256) dengan menyebutkan setidaknya ada lima karakteristik utama yang biasanya melekat pada kemitraan antara pemerintahan dan swasta, yaitu:

- a. Kemitraan setidaknya melibatkan dua atau lebih sektor, dan paling tidak salah satunya adalah institusi pemerintah;
- b. Masing-masing sektor dapat melakukan tawar-menawar dan negosiasi atas namanya sendiri;
- c. Kemitraan melibatkan kerjasama jangka panjang dan membutuhkan daya tahan yang tinggi;
- d. Masing-masing sektor memiliki kontribusi terhadap kemitraan, baik bersifat material, seperti sumberdaya maupun simbolik misalnya berbagi kewenangan; dan
- e. Semua aktor bertanggungjawab atas hasilnya.

Lebih rinci Bovaird dalam Dwiyanto (2011: 263-264) menjelaskan

Kerjasama antara pemerintah dan swasta dapat dikembangkan apabila kontrak dilakukan tidak berbasis pada transaksi jual beli, tetapi melalui hubungan kerjasama (*relational*) yang berbasis pada *trust*. Institusi pemerintah berusaha memaksimalkan *revenue* dan meminimalkan biaya dengan menyerahkan pekerjaannya dengan swasta. Sementara sektor swasta berusaha untuk memaksimalkan profit dari keterlibatannya dalam penyelenggaraan layanan publik.

Dalam situasi hubungan yang demikian, kerjasama antara pemerintah dan swasta bersifat transaksional dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna pelayanan publik.

Tabel 2.1
Perbedaan antara Kemitraan dan Kerjasama Non-Kemitraan

Ciri-ciri	Tipe Kerjasama Pemerintah dan Swasta	
	Kemitraan	Non-Kemitraan
Sifat kerjasama	Kolaboratif	Swastanisasi, <i>Outsourcing</i>
Intensitas	Tinggi	Rendah
Jangka Waktu	Panjang	Pendek
Manfaat dan resiko	Saling berbagi manfaat dan resiko	Manfaat dihitung sebagai kompensasi atas prestasi. resiko ditanggung masing-masing pihak
Kedudukan para pihak	Setara dan otonom	Tidak setara, terikat dengan kontrak
Sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan	Penggabungan sumberdaya	Tidak ada penggabungan

Sumber: Dwiyanto (2011: 256)

Sink dalam Dwiyanto (2011: 253) menjelaskan kerjasama kolaboratif sebagai sebuah proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap suatu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri.

Fosler dalam Dwiyanto (2011:254) menjelaskan konsep kolaborasi dengan mengatakan bahwa kerjasama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama yang intensif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan *alignment* atau penyesuaian dalam tujuan, strategi, agenda, sumberdaya dan aktivitas. Kedua institusi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda membangun visi bersama (*shared vision*) dan berusaha mewujudkan secara bersama-sama. Untuk itu anggota organisasi menyatukan atau setidaknya melakukan aliansi secara vertikal mulai dari sasaran, strategi sampai dengan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan bersama. *Shared vision* menjadi dasar bagi masing-masing pihak dalam merumuskan tujuan, strategi, alokasi sumber daya, dan aktivitas masing-masing sehingga kesemuanya memiliki kontribusi terhadap terwujudnya *shared vision* tersebut.

7. Arena Kemitraan

Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah dengan institusi diluar pemerintah dapat dibedakan menjadi beberapa arena kemitraan (Dwiyanto 2011: 284-291), yaitu:

1) Kolaborasi antara institusi pemerintah dengan institusi bisnis

Banyak literatur yang mengatakan bahwa kemitraan antara institusi pemerintah dengan bisnis lebih dulu dikembangkan sebelum kemitraan antara institusi pemerintah dan institusi masyarakat. institusi bisnis sering dipersepsikan memiliki tradisi dan nilai-nilai efisiensi dan inovasi yang lebih baik dibandingkan dengan institusi pemerintah.

Positive image yang dimiliki bisnis itu sering kali disebut menjadi pertimbangan pemerintah untuk berkolaborasi dengan institusi bisnis. Disamping menjadi instrumen kebijakan untuk memperbaiki efisiensi dan responsivitas pemerintah, kemitraan

antara keduanya juga sering menjadi simbol politik untuk menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap upaya memperbaiki efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui kemitraan tersebut mereka berharap akan dinilai positif oleh warga, misalnya dianggap memiliki upaya serius untuk menjadi lebih efisien, tanggap, dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Disisi lain, motivasi utama institusi bisnis melakukan kemitraan pada umumnya adalah untuk mengakses sumberdaya pemerintah. Melalui kemitraan memungkinkan mereka untuk mengakses sumberdaya yang tersedia di institusi pemerintah yang dapat digunakan untuk mengatasi sejumlah permasalahan publik yang sering terjadi disekitarnya.

2) **Kolaborasi antara pemerintah dan institusi masyarakat sipil**

Pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa pemerintah seringkali memfasilitasi munculnya institusi masyarakat sipil karena pertimbangan tertentu. Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebut institusi masyarakat sipil atau plat merah adalah “*manufactured civil society*”, “*shadow state*”, atau “*the third party of government*”, yang semuanya menunjuk pada institusi masyarakat sipil yang inisiatif pendiriannya dan pembiayaannya setidaknya pada awalnya berasal dari pemerintah (Selsky & Parker dalam Dwiyanto 2011: 287).

Kemitraan antara pemerintah dengan institusi masyarakat sipil dapat mencakup kedua jenis institusi dalam masyarakat, baik yang independen ataupun yang menjadi binaan pemerintah. Perbedaan sifat dari kedua jenis institusi dan masing-masing dari keduanya juga memiliki perbedaan dalam beberapa hal, seperti motif kerjasama, sifat kerjasama, bidang kerjasama, dan sebagainya. Kemitraan antara pemerintah dengan institusi masyarakat sipil yang pendiriannya disponsori oleh pemerintah cenderung lebih banyak bergerak pada kegiatan-kegiatan yang menjadi kepedulian pemerintah.

Adanya kolaborasi antara institusi masyarakat sipil dengan pemerintah diharapkan dapat memberdayakan institusi tersebut dan menjadikannya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam merespon isu tertentu atau dalam menyebarkan nilai-nilai dan kepentingan pemerintah. Selanjutnya kerjasama ini didorong oleh keyakinan untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan publik dan kegiatan pemerintahan yang partisipatif.

3) **Kemitraan tiga sektor**

Kemitraan tiga sektor pada umumnya didorong oleh pencampuran antara motif *self-interest* dengan keinginan untuk mewujudkan kebaikan bersama (Selsky & Parker dalam Dwiyanto 2011: 289). Ketiga sektor yang dimaksud adalah pemerintah, swasta dan institusi masyarakat. Kerjasama diantara tiga pihak tersebut dilatarbelakangi oleh dorongan untuk menjawab berbagai masalah sosial yang semakin kompleks dan tidak memungkinkan untuk diselesaikan oleh masing-masing institusi ataupun oleh kerja sama antara pemerintah dengan salah satu sektor lainnya.

Perbedaan budaya organisasi, cara berkomunikasi, dan mekanisme akuntabilitas yang berlaku dalam masing-masing institusi seringkali menjadi hambatan dalam mewujudkan keberhasilan kemitraan tiga sektor ini. Untuk itu diperlukan kapasitas untuk melakukan negosiasi dan menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda, termasuk cara mengkompensasi para pemangku kepentingan yang karena pertimbangan tertentu kepentingannya tidak dapat diakomodasi dalam kemitraan. Sebagaimana dalam kemitraan diarena lainnya, *trust* selalu menjadi kata kunci dari keberhasilan dalam mengelola kemitraan tiga sektor ini. *Trust* antar pihak dapat menjadi modal penting untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang tidak dapat

dihindari dalam pengembangan kemitraan yang melibatkan institusi yang berbeda budaya dan tradisi.

8. Manfaat dan Motivasi *Collaborative Governance*

Rasionalitas dari penggunaan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah menurut Slesky dan Parker dalam Dwiyanto (2011: 270-284) dibagi kedalam tiga *platform*, yaitu ketergantungan pada sumberdaya, isu sosial, dan pengotakan sektor. Pada dasarnya hal yang mendorong institusi memutuskan melakukan kolaborasi adalah keterbatasan akses sumberdaya yang memadai untuk menjawab permasalahan publik. Dengan mengembangkan kemitraan, institusi pemerintah akan mendapatkan dukungan sumberdaya dari sektor bisnis ataupun masyarakat sipil yang menjadi mitranya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik.

Platform kedua yang mendorong munculnya kemitraan adalah kepedulian mereka terhadap isu-isu sosial yang menjadi perhatian mereka bersama. Munculnya isu-isu tertentu, seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial, yang dirasakan mengganggu kepentingan mereka bersama dapat mendorong mereka untuk berkolaborasi dalam mengatasinya. Menguatnya tradisi *corporate social responsibility (CSR)* dalam banyak korporasi mendorong mereka untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat sipil dalam rangka mengatasi masalah dan isu sosial yang cenderung semakin kompleks.

Platform ketiga, disebut sebagai *social sector platform*, menjelaskan bahwa kecendrungan semakin kaburnya ciri-ciri institusi pemerintah, masyarakat sipil, dan korporasi membuat perbedaan diantara ketiganya menjadi semakin tidak jelas. Hal ini

terjadi karena apa yang sebelumnya merupakan peran sebuah institusi tertentu ternyata sekarang juga sering dimainkan oleh institusi di sektor lainnya. Ketika pemerintah mengontrakkan salah satu fungsinya dalam memberikan pelayanan publik kepada sektor swasta atau masyarakat sipil maka perbedaan peran antar ketiganya akan semakin kabur.

Disamping pendapat Slesky dan Parker, Gazley dan Brudney dalam Dwiyanto (2011: 275-281) menjelaskan tentang manfaat kolaborasi yaitu para eksekutif pemerintah dapat melakukan penghematan biaya penyelenggaraan dalam pelayanan publik, mengurangi kompetisi memperebutkan sumberdaya, dan meningkatkan akses terhadap relawan dan sumberdaya lainnya. Selanjutnya temuan Gazley dan Brudney adalah 65 persen eksekutif dari kelompok masyarakat sipil mengatakan bahwa melalui kemitraan mereka dapat menghemat pengeluaran dalam penyelenggaraan layanan. Kemitraan juga dapat meningkatkan kepercayaan diantara institusi yang bermitra. Para eksekutif di sektor publik yang terlibat dalam kemitraan pada umumnya merasa bahwa kepercayaan terhadap mitranya dari masyarakat sipil menjadi semakin tinggi setelah mereka berkolaborasi. Nilai-nilai dan kepercayaan bersama dapat menjadi sumber motivasi mereka untuk menyelenggarakan barang dan jasa. Selanjutnya kemitraan juga dapat mengubah sikap para aktor dan personel dari institusi yang bermitraa untuk menjadi lebih terbuka dan bersahabat. Kerjasama juga akan mendorong adanya pertukaran nilai, tradisi, dan keahlian antara birokrasi pemerintah dan lembaga non-pemerintah.

Terdapat sejumlah literatur yang menjelaskan apa yang mendorong inovasi untuk dilakukan. McGuire dalam Sudarmo (2015: 205) mengatakan alasan dilakukannya kolaborasi adalah (1) perubahan dalam hal ketersediaannya sumber informasi mendorong perlunya struktur-struktur yang lebih adaptif dan mengalir sehingga memungkinkan orang-orang untuk lebih mudah bekerja melalui lintas batas organisasi,

(2) sifat masalah yang kompleks seperti lingkungan, kemiskinan, perawatan kesehatan, bencana alam yang tidak bisa ditangani secara efektif melalui birokrasi tradisional, (3) harapan warga negara untuk memiliki banyak pilihan tersedia.

Selanjutnya Eppel dalam Sudarmo (2015: 205) menjelaskan hasil penelitiannya tentang alasan dilakukannya kolaborasi, dimana ada empat alasan, yaitu: (1) kebutuhan untuk melibatkan komunitas dalam keputusan-keputusan yang berdampak kepada mereka, (2) kebutuhan untuk memperoleh legitimasi dan nilai efektivitas, (3) secara sosial sifat masalah yang dipecahkan sangat kompleks, dan (4) keterbatasan-keterbatasan informasi dan sumber daya yang diperlukan dari masing-masing organisasi.

9. Kendala *Collaborative governance*

Loffler dalam Dwiyanto (2011: 282) mengidentifikasi beberapa resiko dan kendala dari kemitraan pemerintah dan swasta, diantaranya yaitu kecenderungan kemitraan menciptakan fragmentasi struktur dan prose pelayanan publik yang dapat berpotensi menimbulkan masalah akuntabilitas. Ketika kemitraan dilaksanakan maka institusi pemerintah akan menyerahkan sebagian otoritasnya kepada mitranya dari masyarakat sipil atau korporasi, begitu juga dengan yang dilakukan oleh institusi mitra lainnya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapa yang harus mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pelayanan ketika kegiatan-kegiatan penyelenggaraan tersebut dibagi kedalam berbagai institusi yang otonom. Ketidakjelasan dalam hal pertanggungjawaban akan menimbulkan masalah baru dalam *governance*.

Selanjutnya kendala yang mungkin terjadi ketika mengenalkan kemitraan adalah munculnya kekhawatiran dari pada politisi dan *elite* yang merasa akan kehilangan kekuasaan untuk mengontrol pengambilan kebijakan dan manajemen pelayanan

(Bovaird dalam Dwiyanto 2011: 283). Di sisi lain, tepatnya kalangan warga sebagai pengguna pelayanan tentang kemungkinan kemitraan membuat pelayanan publik lebih banyak didorong oleh etos mencari keuntungan dari pada etos pelayanan. Ketika institusi pemerintah berkolaborasi dengan institusi non-pemerintah dalam penyelenggaraan layanan, terutama dengan dengan korporasi, maka kekhawatiran adanya oergeseran orientasi pelayanan publik menjadi *profit oriented* tidak terhindarkan. Kendala lainnya dapat muncul dari miskonsepsi yang sering terjadi dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sipil.

Salah satu studi di Kanada tahun 2008 dalam Sudarmo (2011: 117) terhambatnya jalannya suatu kolaborasi (dan juga partisipasi) adalah juga disebabkan oleh banyak faktor, terutama faktor budaya, faktor institusi, dan faktor politik. Terkait dengan faktor budaya bahwa kolaborasi bisa gagal karena adanya kecenderungan budaya ketergantungan pada proseduran tidak berani mangambil terobosan dan resiko. Untuk terciptanya kolaborasi yang efektif mensyaratkan para pelayan publik untuk memiliki *skills* dan kesediaan untuk masuk ke mitraan secara pragmatik, yakni berorientasi pada hasil. Dengan kata lain, ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil resiko merupakan salah satu hambatan bagi terelenggaranya efektivitas kolaborasi.

Terkait dengan faktor institusi, kolaborasi bisa gagal karena adanya kecenderungan institusi-institusi yang terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi (terutama dari pihak pemerintah) cenderung mencrapkan struktur yang hirarkis terhadap institusi-institusi lain yang ikut terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi tersebut. Institusi yang masih terlalu ketat mengadopsi struktur vertikal, yang dengan demikian akuntabilitas institusi dan arah kebijakan juga vertikal, tidak cocok dengan kolaborasi karena kolaborasi mensyaratkan cara-cara kerja atau pengorganisasian secara horizontal antara pemerintah dengan non

pemerintah. Bahlan betapapun pemerintah mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi yang biasanya bersifat *representative democracy* belum tentu cocok bagi kolaborasi karena demokrasi seperti ini mensyaratkan tingkat proses dan tingkat formalisme yang begitu besar dibandingkan dengan kemitraan horizontal.

Selanjutnya pada sisi politik, kolaborasi bisa gagal karena kurangnya inovasi pemimpin dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif. Kepemimpinan yang inovatif (*forward-looking*) adalah pemimpin yang bisa memperkenalkan berbagai macam nilai- nilai dan tujuan politis yang bisa menjadikan sebagai inti pemerintahan yang kolaboratif, dan memberikan inspirasi terhadap agenda yang ditentukan tetapi bisa mengarahkan pada pencapaian basil-hasil yang positif melalui kemitraan (Government of Canada 2008 dalam Sudarmo 2011: 120).

a. Prinsip *Collaborative Governance*

Memulai sebuah kerjasama dalam bentuk kemitraan dibutuhkan panduan dan landasan berupa prinsip agar seluruh pihak memahami tanggung jawab dan perannya masing-masing. Adapun prinsip kolaborasi atau kemitraan Suharyanto dalam Subarsono (2016: 185-186) yaitu:

1) Keserasian dan keterpaduan antara kebijakan fiskal dan moneter

Keserasian dapat mendorong peningkatan efisien, produktifitas, stabilitas, pemerataan alokasi, dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi. Dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat maka dapat mensukseskan agenda pemberdayaan, pemerataan, dan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk sistem manajemen modern seiring dengan peningkatan sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan serta untuk mengatasi kesenjangan dalam berbagai aspek.

Dalam setiap aspek dan perkembangannya perlu adanya evaluasi dan pembelajaran yang bisa dikembangkan.

2) Pemberdayaan

Kelompok masyarakat tidak sedikit yang memiliki potensi atas kemampuan yang dimiliki. Namun terhalang pada keterbatasan modal, pemasaran, dan teknologi. Kelemahan tersebut harus diakui dan diubah dengan adanya program pemberdayaan oleh pemerintah dan pihak swasta, sehingga masyarakat dapat berperan dan berkontribusi secara luas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah dapat berperan melalui:

- a) Pengurangan hambatan dan kendala partisipasi masyarakat;
- b) Menyusun program yang lebih memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berperan aktif dalam memanfaatkan dan
- c) Mendayagunakan sumberdaya produktif yang tersedia guna memenuhi kebutuhan.

b. Ukuran Keberhasilan Kolaborasi

DeSeve (2007:50) dalam Sudarimo (2011:110-116) menyebutkan bahwa terdapat item penting yang bisa dijadikan untuk mengukur keberhasilan sebuah network atau kolaborasi dalam governance, yang meliputi:

- 1) *Networked structure Type* (jenis struktur jaringan) menjelaskan tentang deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang menyatu secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Ada banyak bentuk *networked structure*, seperti *hub* dan *spokes*, bintang, dan

cluster (kumpulan terangkai dan terhubung) yang bisa digunakan. Milward dan Provan (2007) dalam Sudarmo (2011:111) mengategorikan bentuk struktur jaringan ke dalam tiga bentuk: *self governance*, *lead organization* dan *Network administrative organization* (NAO).

Dari kedua macam pengkategorian, model *hub* dan *spoke* bisa disamakan dengan *lead organisation*; bentuk lintang bisa disamakan dengan *self governance*; sedangkan model *cluster* lebih dekat ke model *network administrative organization* karena yang sebenarnya model ini merupakan campuran antara *self governance* dan *lead organization*. Model *self governance* ditandai dengan struktur dimana tidak terdapat entitas administratif namun demikian masing-masing stakeholder berpartisipasi dalam *network*, dan manajemen dilakukan oleh semua anggota (*stakeholder* yang terlibat). Kelebihan dari model *self-governance* adalah bahwa semua *stakeholder* yang terlibat dalam *network* ikut berpartisipasi aktif, dan memiliki komitmen dalam membentuk jaringan tersebut. Namun, kelemahan dari model ini adalah tidak efisien mengingat biasanya terlalu seringnya mengadakan pertemuan sedangkan pembuatan keputusan sangat terdesentralisasi sehingga sulit mencapai konsensus. Juga disyaratkan agar bisa efektif, para *stakeholder* yang terlibat sebaiknya sedikit saja sehingga memudahkan saling komunikasi dan saling memantau masing-masing secara intensif (Milward dan Provan, 2007 dalam Sudarmo , 2011:111). Hal ini berarti bahwa jumlah anggota yang relatif kecil atau terbatas sangat berpengaruh terhadap efektivitas sebuah kolaborasi atau jaringan yang mengambil bentuk *self-governance*. Model *lead organization* ditandai dengan

adanya entitas administratif (dan juga manajer yang melakukan jaringan) sebagai anggota *network*/atau penyedia pelayanan. Model ini sifatnya lebih terpusat dibandingkan dengan model *self-governance*. Kelebihannya, model ini bisa efisien dan arah jaringannya jelas. Namun masalah yang dihadapi dalam model ini adalah adanya dominasi oleh *lead organization*, dan kurang adanya komitmen dari para anggota (*stakeholder*) yang tergabung dalam *network*.

Disarankan juga agar *network* lebih optimal, para anggota dalam *network* sebaiknya cukup banyak (Milward and Provan, 2007 dalam Sudarmo, 2011:111). Hal ini bisa dipahami mengapa anggota yang banyak dipandang efektif karena model ini mengandalkan juga dukungan dari *stakeholder* atau anggota lainnya dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga semakin banyak dukungan semakin efektif sebuah kolaborasi yang mengadopsi model *lead organization*. Namun demikian jaringan tidak boleh membentuk hirarki karena justru tidak akan efektif, dan struktur jaringan harus bersifat organisasi dengan struktur organisasi jaringan yang tidak ada hirarki kekuasaan, dominasi dan monopoli; semuanya setara baik dalam hal hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam pencapaian tujuan bersama (Jones:2004 dalam Sudarmo, 2011:112). Model *network administrative organization* ditandai dengan adanya entitas *administrative* secara tegas, yang dibentuk untuk mengelola *network*, bukan sebagai “*service provider*” (penyedia layanan) dan manajernya digaji. Model ini merupakan campuran *model self-governance* dan *model lead organization*.

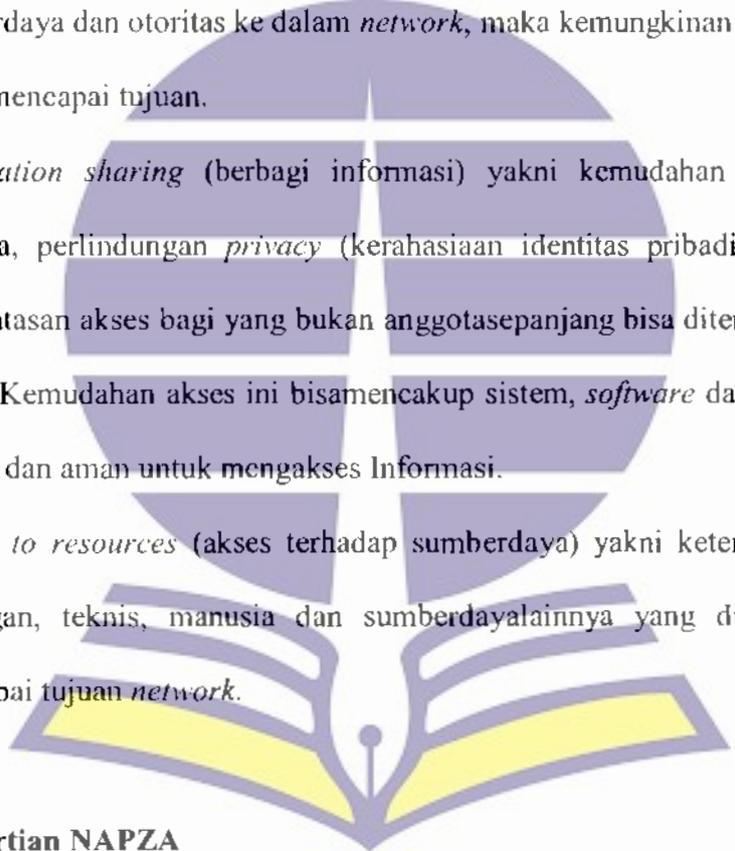
- 2) *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan) mengacu pada alasan mengapa sebuah jaringan harus ada. Alasan mengapa sebuah *network* harus

ada adalah karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif. Tujuan-tujuan ini biasanya dirumuskan pada misi umum suatu organisasi pemerintah.

- 3) *Trust among the participants* (adanya saling percaya diantara parapelaku/peserta yang terangkai dalam jaringan. *Trust among the participants* didasarkan pada hubungan professional atau sosial;keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan pada informasi-informasiatau usaha-usaha dari stakeholder lainnya dalam suatujaringan untuk mencapai tujuan bersama. Bagi lembaga-lembaga pemerintah, unsur ini sangat esensial karena harus yakin bahwa mereka memenuhi mandat legislatif atau regulatori terhadap partner-partner (rekan kerja dalam jaringan)lainnya yang ada di dalam sebuah pemerintahan (bagian-bagian, dinas-dinas, kantor-kantor, badan-badan dalam satu pemcrintahan daerah, misalnya) dan partner-partner di luar pemerintah untuk menjalankan aktitas-aktivitas yang telah disetujui bersama.
- 4) Adanya kepastian *governance* atau kejelasan dalam tata kelola termasuk (a) *boundary dan exlusivity*, yang menegaskan siapa yang termasuk anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota; ini berarti bahwa jika sebuah kolaborasi dilakukan, harus ada kejelasan siapa saja yang termasuk dalam jaringan dan siapa yang diluar jaringan (b)*rules* (aturan-aturan) yang menegaskan sejumlah pembatasan-pembatasan perilaku anggota komunitas dengan ancaman bahwamereka akan dikeluarkan jika perilaku mereka menyimpang (tidak sesuai atau bertentangan dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama); dengan demikian ada aturan main yang jelas tentang apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya tidak dilakukan, ada ketegasan apa yang dinilai menyimpang

dan apa yang dipandang masih dalam batas-batas kesepakatan: ini menegaskan bahwa dalam kolaborasi ada aturan main yang disepakati bersama oleh seluruh *stakeholder* yang menjadi anggota dari jaringan tersebut: hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan hal-hal apa saja yang sebarusnya tidak dilakukan sesuai aturan main yang disepakati (c) *self determination*, yakni kebebasan untuk menentukan bagaimana *network* akan dijalankan dan siapa saja yang diijinkan untuk menjalankannya; ini berarti bahwa model kolaborasi yang dibentuk akan menentukan bagaimana cara kolaborasi ini berjalan. Dengan kata lain cara kerjasebuah kolaborasi ikut ditentukan oleh model kolaborasi yang diadopsi; dan (d) *network management* yakni berkenaan dengan resolusi penolakan/tantangan alokasi sumberdaya, kontrol kualitas, dan pemeliharaan organisasi. Ini untuk menegaskan bahwa ciri sebuah kolaborasi yang efektif adalah jika kolaborasi itu didukung sepenuhnya oleh semua anggota jaringan tanpa konflik dan pertentangan dalam pencapaian tujuan, ketersediaan sumber dayam manusia yang memiliki kompetensi yang memenuhi persyaratan yang diperlukan dan ketersediaan sumber keuangan/kondisi finansial secara memadai dan berkesinambungan, terdapat penilaian kinerja terhadap masing-masing anggota yang berkolaborasi, dan tetap mempertahankan eksistensi masing-masing anggota organisasi untuk tetap adaptif dan berjalan secara berkesinambungan sesuai dengan visi dan misinya masing-masing tanpa mengganggu kolaborasi itu sendiri.

- 5) *Access to authority* (akses terhadap kekuasaan) yakni tersedianya standar-standar (ukuran-ukuran) ketentuan prosedur-prosedur yang jelas yang diterima secara luas.

- 
- 6) *Distributive accountability / responsibility* (pembagian akuntabilitas / tanggung jawab) yaitu berbagi *governance* (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan stakeholder lainnya) berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan; dan dengan demikian berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika para anggota tidak terlibat dalam menentukan tujuan *network* dan tidak berkeinginan membawa sumber daya dan otoritas ke dalam *network*, maka kemungkinan *network* itu akan gagal mencapai tujuan.
- 7) *Information sharing* (berbagi informasi) yakni kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas pribadi seseorang), dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudahan akses ini bisa mencakup sistem, *software* dan prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses Informasi.
- 8) *Access to resources* (akses terhadap sumber daya) yakni ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan *network*.

10. Pengertian NAPZA

NAPZA (Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lain) adalah bahan/zat/obat jika masuk ke dalam tubuh manusia akan memengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA (BNP Jabar, 2010).

NAPZA adalah zat yang memengaruhi struktur atau fungsi beberapa bagian tubuh orang yang mengonsumsinya. Manfaat maupun risiko penggunaan NAPZA bergantung pada seberapa banyak, seberapa sering, cara menggunakannya, dan bersamaan dengan obat atau NAPZA lain yang dikonsumsi (Kemenkes RI, 2010).

Menurut Partodiharjo (2008), NAPZA dibagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelompok yaitu:

a. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari narkotika.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*).

c. Bahan Adiktif Lainnya

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psicotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya: rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan dan thinner dan zat-zat lain, seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan. Jadi, alkohol, rokok, serta zat-zat lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan juga tergolong NAPZA.

11. Penyalahgunaan NAPZA

Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan NAPZA yang bersifat patologis, paling sedikit telah berlangsung satu bulan lamanya sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan dan fungsi sosial. Sebetulnya NAPZA banyak dipakai untuk kepentingan pengobatan, misalnya menenangkan klien atau mengurangi rasa sakit. Tetapi karena efeknya “enak” bagi pemakai, maka NAPZA kemudian dipakai secara salah, yaitu bukan untuk pengobatan tetapi untuk mendapatkan rasa nikmat. Penyalahgunaan NAPZA secara tetap ini menyebabkan pengguna merasa ketergantungan pada obat tersebut sehingga menyebabkan kerusakan fisik (Sumiati, 2009).

Ketergantungan terhadap NAPZA dibagi menjadi 2, yaitu (Sumiati, 2009):

- a. Ketergantungan fisik adalah keadaan bila seseorang mengurangi atau menghentikan penggunaan NAPZA tertentu yang biasa ia gunakan, ia akan mengalami gejala putus zat. Selain ditandai dengan gejala putus zat, ketergantungan fisik juga dapat ditandai dengan adanya toleransi.

- b. Ketergantungan psikologis adalah suatu keadaan bila berhenti menggunakan NAPZA tertentu, seseorang akan mengalami kerinduan yang sangat kuat untuk menggunakan NAPZA tersebut walaupun ia tidak mengalami gejala fisik.

Ada beberapa tahapan pemakaian NAPZA menurut Harlina (2008), yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap pemakaian coba-coba (eksperimental)

Karena pengaruh kelompok sebaya sangat besar, remaja ingin tahu atau coba-coba. Biasanya mencoba mengisap rokok, ganja, atau minum-minuman beralkohol. Jarang yang langsung mencoba memakai putaw atau minum pil ekstasi.

- b. Tahap pemakaian sosial

Tahap pemakaian NAPZA untuk pergaulan (saat berkumpul atau pada acara tertentu), ingin diakui/diterima kelompoknya. Mula-mula NAPZA diperoleh secara gratis atau dibeli dengan murah. Ia belum secara aktif mencari NAPZA.

- c. Tahap pemakaian situasional

Tahap pemakaian karena situasi tertentu, misalnya kesepian atau stres. Pemakaian NAPZA sebagai cara mengatasi masalah. Pada tahap ini pemakai berusaha memperoleh NAPZA secara aktif.

- d. Tahap habituasi (kehiasaan)

Tahap ini untuk yang telah mencapai tahap pemakaian teratur (sering), disebut juga penyalahgunaan NAPZA, terjadi perubahan pada faal tubuh dan gaya hidup. Teman lama berganti dengan teman pecandu. Ia menjadi sensitif, mudah tersinggung, pemarah, dan sulit tidur atau berkonsentrasi, sebab narkoba mulai

menjadi bagian dari kehidupannya. Minat dan cita-citanya semula hilang. Ia sering membolos dan prestasi sekolahnya merosot. Ia lebih suka menyendiri daripada berkumpul bersama keluarga.

e. Tahap ketergantungan

Ia berusaha agar selalu memperoleh NAPZA dengan berbagai cara. Berbohong, menipu, atau mencuri menjadi kebiasaannya. Ia sudah tidak dapat mengendalikan penggunaannya. NAPZA telah menjadi pusat kehidupannya. Hubungan dengan keluarga dan teman-teman rusak. Pada ketergantungan, tubuh memerlukan sejumlah takaran zat yang dipakai, agar ia dapat berfungsi normal. Selama pasokan NAPZA cukup, ia tampak sehat, meskipun sebenarnya sakit. Akan tetapi, jika pemakaiannya dikurangi atau dihentikan, timbul gejala sakit. Hal ini disebut gejala putus zat (sakaw). Gejalanya bergantung pada jenis zat yang digunakan.

Orang pun mencoba mencampur berbagai jenis NAPZA agar dapat merasakan pengaruh zat yang diinginkan, dengan risiko meningkatnya kerusakan organ-organ tubuh. Gejala lain ketergantungan adalah toleransi, suatu keadaan di mana jumlah NAPZA yang dikonsumsi tidak lagi cukup untuk menghasilkan pengaruh yang sama seperti yang dialami sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah yang diperlukan meningkat. Jika jumlah NAPZA yang dipakai berlebihan (overdosis), dapat terjadi kematian.

12. Pencegahan Terhadap Narkoba

Pencegahan penyalahgunaan narkoba sebenarnya adalah bagaimana membantu masyarakat, khususnya generasi muda, untuk beradaptasi serta menyesuaikan perilaku dan kapasitasnya dalam menghadapi pengaruh yang multipel dalam kehidupannya,

seperti bagaimana menghadapi tekanan dan kondisi sosial, bagaimana berinteraksi dengan rekan sebaya, dan bagaimana menyesuaikan diri dengan ciri kepribadiannya masing-masing. Kegiatan pencegahan yang memperhatikan hal ini bertujuan untuk mengurangi perilaku beresiko, termasuk di dalamnya perilaku menggunakan narkoba. Ironisnya kegiatan yang demikian tidak banyak dilakukan sehingga banyak masyarakat yang tidak mengerti.

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), mengklasifikasikan tipe-tipe pencegahan yang saling melengkapi satu sama lain. Dan yang paling penting dari semuanya adalah bagaimana mengenali level kerentanan untuk mengalami penyalahgunaan narkoba, bukan untuk mengetahui seberapa banyak orang menggunakan narkoba atau henarkah seseorang menggunakan narkoba. Secara singkat tipe-tipe pencegahan menurut EMCDDA, yaitu :

- a. Pencegahan Universal (*Universal Prevention*). Pencegahan universal ditujukan untuk populasi umum yang besar, target dari tipe ini adalah membangun keterampilan dan nilai-nilai, persepsi terhadap norma-norma, dan bagaimana berinteraksi dengan rekan sebayanya dan kehidupan sosial pada umumnya.
- b. Pencegahan Selektif (*Selective Prevention*). Pencegahan selektif ditujukan pada kelompok rentan di mana narkoba sering digunakan. Fokusnya pada peningkatan kesempatan dan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi kehidupan sosial yang sulit.
- c. Pencegahan sesuai indikasi (*Indicated Prevention*). Model pencegahan ini ditujukan untuk individu yang rentan, dan bertujuan untuk membantu menangani dan mengatasi ciri kepribadian yang ada pada dirinya yang membuat mereka lebih rentan untuk menggunakan narkoba.
- d. Pencegahan lingkungan (*Environmental Prevention*). Pencegahan di tingkat lingkungan bertujuan untuk mengenali dan memodifikasi lingkungan sosial dan norma sosialnya, termasuk di dalamnya membuat aturan yang membatasi peredaran narkoba.

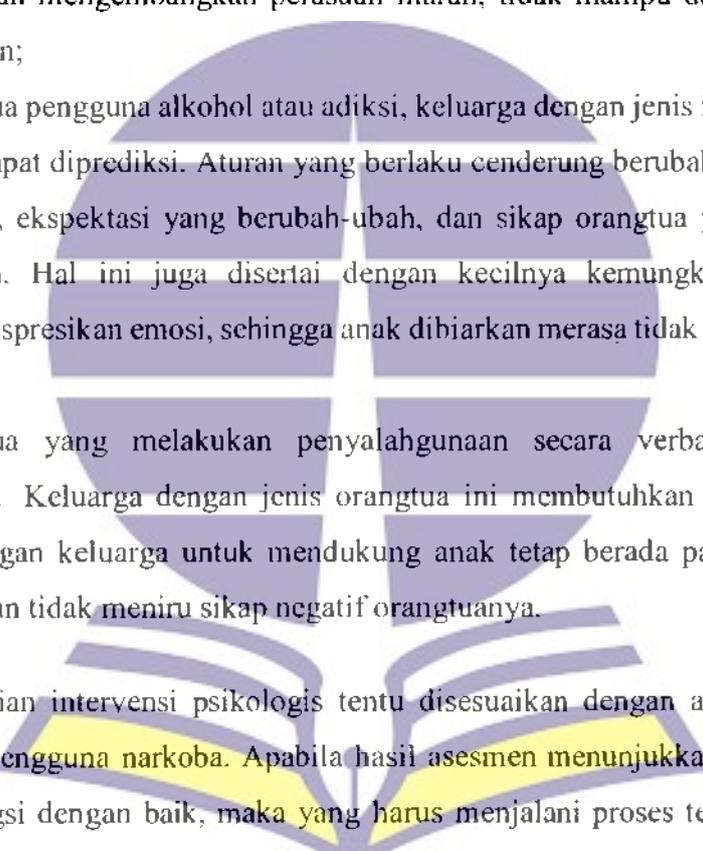
Dari tipe-tipe pencegahan di atas, dapat dipahami bahwa aspek pencegahan meliputi aspek individu maupun lingkungan. Kedua hal ini mesti berjalan secara simultan dan berkesinambungan agar program pencegahan berjalan efektif.

Upaya perbaikan dimulai dengan evaluasi seberapa efektif kegiatan yang selama ini dilakukan. apakah sudah membekali para peserta kegiatan dengan keterampilan yang dapat membentengi mereka dari penyalahgunaan narkoba. ataukah masih berkisar pada aspek pengetahuan saja. Hal berikutnya adalah upaya mendeteksi tingkat kerentanan dan kebutuhan kelompok target program pencegahan. Yang ketiga adalah membuat kegiatan yang berorientasi pada keterampilan dalam berinteraksi pada kehidupan sosial serta pemahaman terhadap ciri kepribadian individu, faktor risiko, serta nilai dan norma sosial yang ada.

13. *Disfungsional Family* dan Narkoba

Keluarga menurut Murdock (dalam Lestari, 2012) merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi. pola keluarga adalah model atau corak yang tetap dalam suatu kelompok sosial yang memiliki ikatan darah, perkawinan yang terstruktur, saling berkomunikasi dan berinteraksi (sosialisasi) yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami-istri, ayah-ibu, anak, nenek-kakek, saudara laki-laki, dan saudara perempuan yang tinggal bersama. Hal-hal dasar pola keluarga menurut Silalahi & Meinarno (2010) meliputi bentuk keluarga, fungsi keluarga, pola asuh orang tua, peran orang tua, nilai dan Pendidikan keluarga, konflik keluarga, dan komunikasi keluarga.

Terdapat keluarga yang mengalami keberfungsian yang terganggu karena beragam jenis tekanan. Pada keluarga yang mengalami ke-kurang-herfungsian dengan baik (*dysfungsional family*), biasanya masalah cukup berat dan keinginan anak tidak terpenuhi. Beberapa orangtua kurang mampu herfungsi dengan baik sehingga membiarkan anaknya menghadapi masalah sendiri. Sementara itu terdapat pula orangtua yang berfungsi secara berlebihan dengan tidak membiarkan anaknya berkembang dan menjadi dirinya sendiri. Beberapa orangtua lain juga tampak tidak konsisten atau juga terdapat orangtua yang melakukan kekerasan dengan perilaku yang tidak tepat (Benton, 1993). Selanjutnya, Benton (1993) juga menjelaskan secara terperinci, beragam jenis keluarga yang mempengaruhi perilaku anak menjadi kurang tepat yaitu:

- 
- a. Orangtua yang tidak sempurna, dapat berupa berbagai jenis misalnya sakit fisik, sakit mental maupun ketiadaan. Pada keadaan ini, anak menggantikan peran orangtua untuk bertanggung jawab terhadap beberapa tugas orangtua di usia dini;
 - b. Orangtua yang memegang control berlebih, dimana orangtua tidak mampu memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memegang tanggungjawab yang tepat pada usianya. Biasanya orangtua dengan jenis ini memiliki ketakutan yang berlebih akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dari anak mereka. Anak kemudian mengembangkan perasaan marah, tidak mampu dan tidak memiliki kekuatan;
 - c. Orangtua pengguna alkohol atau adiksi, keluarga dengan jenis ini lebih rumit dan tidak dapat diprediksi. Aturan yang berlaku cenderung berubah-ubah, janji tidak ditepati, ekspektasi yang berubah-ubah, dan sikap orangtua yang berbeda dan berubah. Hal ini juga disertai dengan kecilnya kemungkinan anak untuk mengekspresikan emosi, sehingga anak dibiarkan merasa tidak aman, frustrasi dan marah;
 - d. Orangtua yang melakukan penyalahgunaan secara verbal, fisik maupun seksual. Keluarga dengan jenis orangtua ini membutuhkan bantuan dari luar lingkungan keluarga untuk mendukung anak tetap berada pada keadaan yang sehat dan tidak meniru sikap negatif orangtuanya.

Pemberian intervensi psikologis tentu disesuaikan dengan akar permasalahan yang dialami pengguna narkoba. Apabila hasil asesmen menunjukkan bahwa keluarga kurang berfungsi dengan baik, maka yang harus menjalani proses terapi bukan hanya pengguna narkoba (residen), tapi harus melibatkan seluruh anggota keluarga. Dalam psikologi dikenal dengan istilah *family therapy*. Dalam jurnal yang dikeluarkan oleh Center for Substance Abuse Treatment, *family therapy* dapat diterapkan pada semua pengguna narkoba (narkoba jenis apapun), termasuk pengguna dengan *dually diagnosed* (diagnosa ganda), penyalahgunaan obat bius serta klien HIV yang disertai dengan penyalahgunaan narkoba (Adhesatya & Khabibah).

B. Penelitian Terdahulu

- a. Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Bahaya Narkotika Di Kabupaten Tegal oleh Alfiardi, Trias (2015). Hasil penelitian yang di peroleh adalah sampai saat ini peran dan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam menanggulangi bahaya narkotika di Kabupaten Tegal hanya sebatas pencegahan saja. Penanganan rehabilitasi di lakukan oleh BNNP provinsi dan Penindakan di lakukan oleh Polres Tegal. Hambatan yang di hadapi Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bahaya narkotika di Kabupaten Tegal mengenai rendahnya sumber daya manusia mengetahui narkotika, kurangnya anggaran Pemerintah daerah hingga sarana dan pra sarana rehabilitasi yang belum memadai. Solusi untuk menanggulangi bahaya narkotika di Kabupaten Tegal Pemerintah Daerah telah melakukan upaya preventif, tindakan hukum serta rehabilitasi. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bahaya narkotika di Kabupaten Tegal sangat penting dan strategis karna Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengayomi masyarakat Kabupaten Tegal agar terbebas dari bahaya narkotika. Sehingga bisa menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sehat sentosa demi meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan atas peran dan tanggung Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam menanggulangi bahaya narkotika di Kabupaten Tegal.
- b. Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Pada Gerakan Sadar Anti Narkoba (Gesank) Di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Malang) Oleh Sulistyono, Bambang (2007). Dalam upaya tindakan yang tegas bagi para pengedar dan penyalahgunaan narkoba pemerintah

khususnya Kota Malang harus menekan lajunya peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan mencegahnya peredaran di tingkat lokal. Pemerintah Kota Malang sendiri mempunyai Badan Narkotika di tingkat kota yaitu BNK. Merupakan badan yang menangani kasus narkoba di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang dengan melakukan berbagai program untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Malang. Salah satu program yang sedang disosialisasikan adalah pendirian Posko Gesank yang menjadi ujung tombak program pemerintah itu kini telah tersebar di seluruh Kelurahan di Kota Malang. Fungsi Posko Gesank yang pertama adalah memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, dan kedua sebagai pendeteksi dini atau informan adanya peredaran gelap narkoba kepada aparat kepolisian terdekat.

- c. Peran Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Pedukuhan Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta Oleh Emun Noviani (2009). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan memilih lokasi penelitian di Padukuhan Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dimana data diambil dengan metode dokumentasi, observasi dan wawancara (interview) dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan pejabat setempat. Dalam menganalisis skripsi penyusun menganalisis secara induktif dengan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis yaitu dengan menggunakan nilai-nilai norma masyarakat yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dengan melihat dan memperhatikan fenomena yang terjadi di masyarakat Metode ini digunakan untuk memahami fenomena-fenomena tentang Peran Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Padukuhan Papringan, Catur Tunggal, Depok,

Sleman, Yogyakarta, kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pembahasan topik yang diteliti. Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat Padukuhan Papringan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sudah sesuai dengan prosedur apa yang diinstruksikan pemerintah dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai badan yang menaungi masalah narkoba. Terlebih peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba menempatkan posisi orangtua sebagai "central control"; remaja untuk berpartisipasi aktif membimbing, mendidik, mengawasi dan memberikan motivasi langsung kepada anak remaja agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

- d. Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat Dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkoba di Daerah Instimewa Yogyakarta oleh Fram Raditya Yunanda (2014). Berdasarkan uraian dan analisis dapat diperoleh upaya yang dilakukan oleh Polda DIY adalah upaya pre-emptif dengan pembinaan dan penyuluhan, upaya preventif dengan melakukan patrol dari kepolisian serta upaya represif dengan penangkapan dan penggeledahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adapun upaya yang dilakukan masyarakat adalah pembinaan dan penyuluhan serta pendidikan dilingkungan keluarga, melakukan pencarian, memperoleh dan memberikan informasi kepada penegak hukum, dan membangun kerjasama dengan kepolisian serta BNN.
- e. Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi tentang Partisipasi Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo) oleh Ahmad Anhari (2012). Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah faktor intern yaitu kejiwaan

yang masih lebih dan kurangnya pemahaman tentang agama dan kurangnya kesadaran hukum, adapun faktor ekstern adalah keadaan keluarga yang tidak harmonis dan lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Strategi yang bisa di terapkan oleh BNN kabupaten Sukoharjo adalah program penyuluhan, dan kampanye anti narkoba.

- f. Nick Stinnet dan John DeFrain (dalam Hidayat, 2013), telah melakukan studi dan penelitian yang berjudul "The National Study on Family Strengths". Dari hasil penelitiannya terhadap keluarga-keluarga Amerika, kedua sarjana tersebut mendapatkan rumusan untuk menjadi syarat suatu keluarga yang disebut keluarga bahagia dan sehat (*happy and healthy family*), yaitu paling sedikit harus terpenuhi beberapa kriteria, yaitu:
1. Mempunyai Landasan Agama Kehidupan beragama (penghayatan dan pengamalannya) dalam rumah tangga sangat dianjurkan. Karena hanya dalam agamalah terkandung nilai-nilai moral yang sifatnya abadi.
 2. Selalu Bersama Keluarga Dalam masyarakat modern, ikatan keluarga sering mudah longgar. Karena kesibukan, jarang mempunyai waktu untuk bersama, sehingga merupakan faktor yang mendukung terjadinya kesenjangan, antara orangtua dan anak. Oleh karena itu sesibuk-sibuk apapun, tetap luangkan waktu untuk keluarga.
 3. Mempunyai Pola Komunikasi yang Baik Komunikasi yang terjadi sering kali satu arah dan instruktif sifatnya. Bila demikian halnya, maka kondisi demikian itu merupakan faktor yang mendukung bagi terjadinya disfungsi/disharmoni keluarga. Maka komunikasi yang bersifat dua arah, demokratis dan emosional (dengan perasaan) yang hangat antara orangtua dan anak-anak, menyebabkan bila terjadi suatu masalah, cepat dapat ditanggapi dan diselesaikan.
 4. Saling Menghargai Saling menghargai antara suami-isteri, demikian juga pada anak-anak, amatlah dianjurkan

bagi hubungan yang baik antara sesama anggota keluarga. Pemberian perhatian ataupun penghargaan dan support agar yang akan datang dapat lebih baik. 5. Adanya Ikatan Kekeluargaan Keluarga harus merupakan suatu ikatan dinamis yang memungkinkan para anggota keluarga itu berkembang dan tumbuh. Oleh karena itu keluarga sebagai suatu kelompok.

Mengacu kepada penelitian terdahulu diatas, maka terdapat perbedaan secara substansi dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penulis menguraikan secara parsial dari peranan-peranan keluarga, masyarakat dan peran kepolisian secara simultan dari ketiga peranan-peranan tersebut secara simultan terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta.

C. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Pada bagan diatas diketahui bahwa diperlukan adanya *Collaborative Governance*, yang melibatkan multi organisasi yaitu peranan keluarga, peranan

masyarakat dan peranan kepolisian untuk mencapai tujuan bersama yaitu pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai permasalahan yang tidak dengan mudah dipecahkan apabila suatu organisasi berdiri sendiri.

Adapun operasionalisasi variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Collaboration Governance Lemos dalam Subarsono (2016:176)	Multipartner governance dengan Keluarga (x1)	<ol style="list-style-type: none"> mencari, memperoleh, dan memberikan informasi memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan informasi menyampaikan saran dan pendapat memperoleh tanggapan. memperoleh perlindungan hukum melaporkan.
	Multipartner governance (Pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat) (x2)	<ol style="list-style-type: none"> Mengadakan Sosialisasi dan Penyuluhan. Menyelenggaraan Pusat Rehabilitas. Memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat.
	Multipartner governance (Kepolisian) x3	<ol style="list-style-type: none"> Pembinaan dan penyuluhan. Melakukan patroli Penangkapan dan pengeledahan.
Drug Prevention (menurut <i>European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Pencegahan Universal Pencegahan Selektif Pencegahan sesuai indikasi Pencegahan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> Pencegahan melalui program penyuluhan Pencegahan melalui peran keluarga Peningkatan kewaspadaan Kebutuhan fasilitator Pencegahan melalui optimalisasi hubungan instansi dan masyarakat

Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu Collaboration Governance menurut Lemos dalam Subarsono (2016:176) dan Drug Prevention (menurut *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction*). Variabel Collaboration

Governance memiliki tiga dimensi, yaitu Multipartner governance dengan keluarga (x1), Multipartner governance dengan masyarakat (x2) dan Multipartner governance dengan Kepolisian (x3).

Multipartner governance dengan keluarga terbagi dalam beberapa indikator yaitu,

1. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi
2. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan informasi
3. menyampaikan saran dan pendapat
4. memperoleh tanggapan.
5. memperoleh perlindungan hukum
6. melaporkan.

Multipartner governance dengan masyarakat terbagi dalam beberapa indikator yaitu,

1. Mengadakan Sosialisasi dan Penyuluhan.
2. Menyelenggaraan Pusat Rehabilitas.
3. Memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat.

Multipartner governance dengan Kepolisian terbagi dalam beberapa indikator yaitu,

1. Pembinaan dan penyuluhan.
2. Melakukan patroli
3. Penangkapan dan penggeledahan

Adapun variabel Y dalam penelitian ini adalah Drug Prevention (menurut *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction*). Adapun dimensi dalam variabel Y adalah

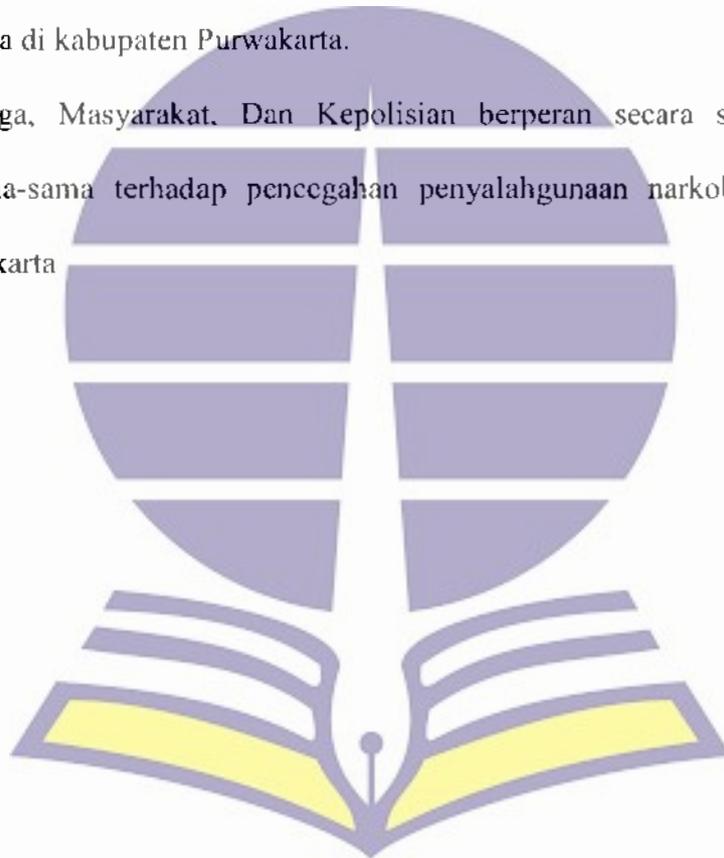
1. Pencegahan Universal
2. Pencegahan Selektif
3. Pencegahan sesuai indikasi
4. Pencegahan lingkungan

Indikator dalam variabel Y adalah,

- a. Pencegahan melalui program penyuluhan
- b. Pencegahan melalui peran keluarga
- c. Peningkatan kewaspadaan
- d. Kebutuhan fasilitator
- e. Pencegahan melalui optimalisasi hubungan instansi dan masyarakat

D. Hipotesis Penelitian

1. Keluarga berperan secara signifikan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Purwakarta.
2. Masyarakat berperan secara signifikan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Purwakarta.
3. Kepolisian berperan secara signifikan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Purwakarta.
4. Keluarga, Masyarakat, Dan Kepolisian berperan secara signifikan secara bersama-sama terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Purwakarta



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Adapun desain dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:13) yang dimaksud metode kuantitatif adalah metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket metode tertutup. Indikator-indikator untuk ketiga variabel tersebut kemudian dijabarkan oleh penulis menjadi sejumlah pertanyaan-pertanyaan sehingga diperoleh data primer. Data ini akan dianalisis dengan menggunakan uji statistika yang relevan untuk menguji hipotesis.

B. Populasi Dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:115), "populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Anggota dalam populasi dapat berupa manusia, tumbuh-tumbuhan, maupun benda lainnya. Jadi, populasi adalah

keseluruhan dari komponen dalam kelompok yang memiliki satu atau lebih karakteristik tertentu yang sama dari sampel yang diambil dan kesimpulan dari hasil.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Purwakarta dengan jumlah Sampling Kecamatan Purwakarta dengan 9 Kelurahan dan satu Desa dengan jumlah penduduk 154.208 yaitu perdesa diambil 15 kepala keluarga (15 KK X 10 = 150 Kepala Keluarga). Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Kecamatan Purwakarta dengan jumlah penduduk (*random sampling*) perdesa diambil 15 Kepala Keluarga.

Pada penelitian ini penulis menggunakan salah satu teknik nonrandom sampling (*nonprobability sampling*), yaitu sensus. Menurut Sugiyono (2015: 126), teknik sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel/responden. Maka, sampel pada penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Purwakarta.

C. Instrumen Penelitian

Instumen dalam penelitian ini adalah menggunakan angket. Angket/kuesioner merupakan alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian (Sugiyono, 2008). Riduan (2008:71) mengatakan bahwa instrumen penelitian menjelaskan semua alat pengambilan data yang digunakan, proses pengumpulan data dan teknik penentuan kualitas instrumen (validitas dan reliabilitasnya). Kuesioner penelitian terdiri atas tiga bagian yang berhubungan dengan variabel penelitian. Kuesioner ini menggunakan skala Likert jenjang 5:

- Sangat setuju sekali: skor 5
- Sangat Setuju: skor 4
- Setuju: skor 3
- Tidak setuju: skor 2
- Sangat tidak setuju: skor 1

Adapun instrumen penelitian adalah sebagai berikut,

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian

Instrumen Kuesioner	SSS	SS	S	TS	STS
Peran Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba					
1. Masyarakat memiliki peran untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba					
2. Masyarakat berhak memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan informasi terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba					
4. Masyarakat berhak menyampaikan saran dan pendapat terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba					
5. Masyarakat berhak memperoleh tanggapan terhadap informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.					
6. Masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum jika memiliki informasi terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba.					
7. Masyarakat memiliki peran melaporkan informasi terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba.					
Peran Pemerintah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba					
1. Pemerintah memiliki peran dalam pengadaaan Sosialisasi dan Penyuluhan.					
2. Pemerintah memiliki peran dalam menyelenggaraan Pusat Rehabilitas.					

Instrumen Kuesioner	SSS	SS	S	TS	STS
3. Pemerintah memiliki peran dalam memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat.					
Peran Kepolisian dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian memiliki peran dalam pembinaan dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan narkoba. 2. Kepolisian memiliki peran dalam melakukan patrol terhadap penyalahgunaan narkoba. 3. Kepolisian memiliki peran dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap penyalahgunaan narkoba. 					
Pencegahan Narkoba					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penyuluhan yang intensif dari organisasi kemasyarakatan saat ini tingkat pencegahan narkoba semakin baik. 2. Adanya peran keluarga tingkat kesadaran tentang bahaya narkoba semakin baik 3. Adanya penyuluhan yang intensif dari kepolisian, saat ini tingkat pencegahan narkoba semakin baik. 4. Adanya kepedulian yang tinggi dari masyarakat, saat ini upaya pencegahan narkoba semakin berhasil 5. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dari berbagai pihak, menurut pengamatan saya saat ini masyarakat semakin waspada terbadap bahaya penyalahgunaan narkoba. 6. Penyuluhan tentang hidup sehat dari aparat pemerintah sudah berhasil mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. 7. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, menurut pengamatan saya diperlukan peran fasilitator. 8. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba diperlukan peran koordinator dari masyarakat 					

Instrumen Kuesioner	SSS	SS	S	TS	STS
9. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba diperlukan peran koordinator dari pemerintah					
10. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba diperlukan peran koordinator dari kepolisian					
11. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba diperlukan terbina kondisi yang baik antara instansi terkait dengan masyarakat akan bahaya narkoba.					

D. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Penyebaran Angket/kuesioner
- b. Pengumpulan Data
- c. Pengujian Instrumen Penelitian
 1. Uji Validitas Instrumen

Data dikatakan valid, jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Butir-butir pertanyaan yang ada dalam kuesioner diuji terhadap faktor terkait. Uji validitas dimaksud untuk mengetahui seberapa cermat suatu test atau pengujian melakukan fungsi ukurannya. Suatu instrument pengukur dikatakan valid apabila instrument tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur atau dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

Validitas adalah suatu derajat ketepatan/kelayakan instrumen yang digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur (Sekaran, 2012). Menurut Sukardi (2013) validitas adalah derajat yang menunjukkan dimana suatu tes mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan menurut Azwar (2014) bahwa validitas mengacu sejauh mana akurasi suatu

tes atau skala dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Tinggi rendah validitas suatu angket atau kuesioner dihitung dengan menggunakan metode Pearson's Product Moment Correlation (Sugiyono, 2002: 148).

Hasil perhitungan ini akan dibandingkan dengan *critical value* pada tabel ini nilai r dengan taraf signifikansi 5% dan jumlah sampel yang ada. Apabila hasil perhitungan korelasi *product moment* lebih besar dari *critical value*, maka instrumen ini dinyatakan valid. Sebaliknya apabila skor item kurang dari *critical value*, maka instrumen ini dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2002: 154). Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, maksudnya apabila dalam beberapa pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok yang sama diperoleh hasil yang relatif sama (Syaifuddin Azwar, 2000: 3). Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik Formula Alpha Cronbach dan dengan menggunakan program SPSS 15.0 for windows.

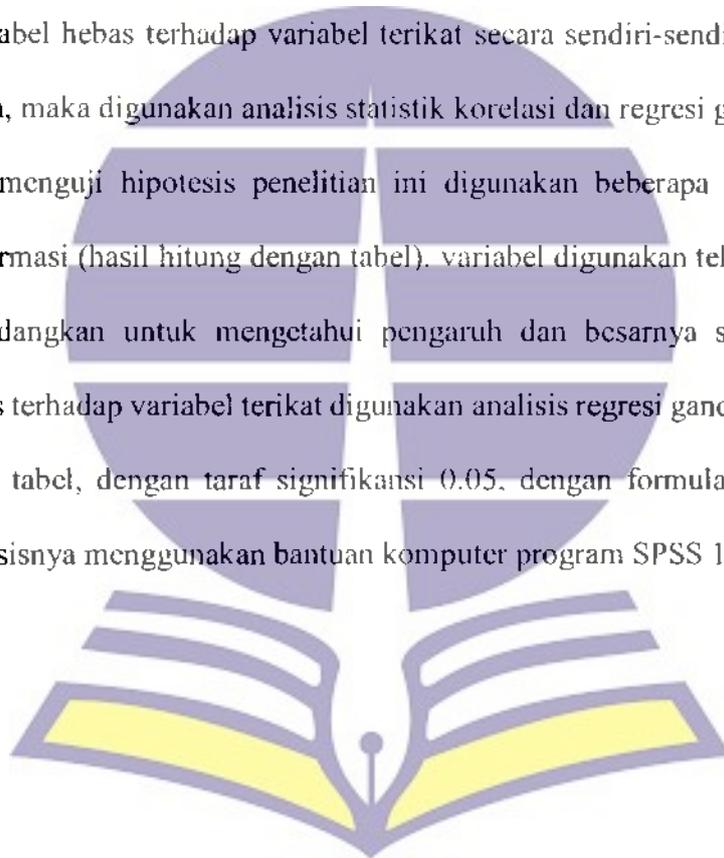
E. Metode Analisis Data

Pemilihan teknik analisis data dalam suatu penelitian berorientasi kepada bentuk hipotesis dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Teknik analisis regresi linier ganda yaitu cara atau teknik khusus untuk mencari atau mengetahui seberapa besar hubungan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebelum melangkah ke analisis regresi ganda, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat

analisis untuk mengetahui apakah data tersebut layak untuk diuji dengan menggunakan uji analisis regresi ganda. Teknik analisis ini dibantu dengan menggunakan Program Statistik SPSS.15.0.

Analisis regresi dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh memenuhi persyaratan untuk dianalisis menggunakan teknik yang direncanakan. Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu: mengetahui tingkat pengaruh dan signifikansi antara beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, maka digunakan analisis statistik korelasi dan regresi ganda.

Dalam menguji hipotesis penelitian ini digunakan beberapa rancangan teknik statistik konfirmasi (hasil hitung dengan tabel). variabel digunakan teknik regresi linear berganda. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh dan besarnya sumbangan setiap variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan analisis regresi ganda, dengan kriteria $F_{hitung} > F_{tabel}$, dengan taraf signifikansi 0.05, dengan formula persamaan garis regresi. Analisisnya menggunakan bantuan komputer program SPSS 15.0.

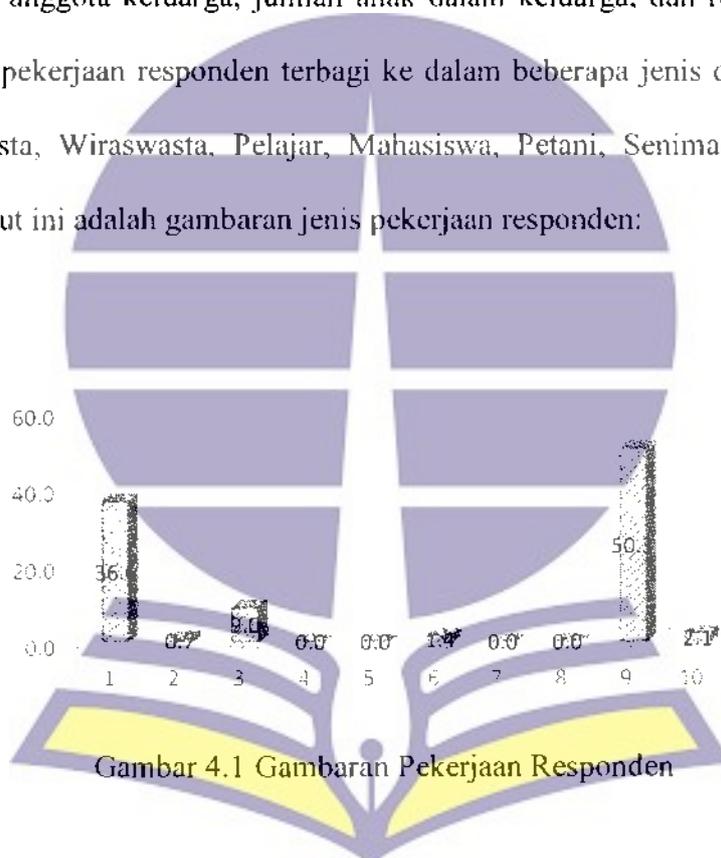


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Gambaran umum responden terdiri dari jenis pekerjaan responden, rentang usia responden, latar belakang pendidikan responden, rata-rata penghasilan responden per bulan, jumlah anggota keluarga, jumlah anak dalam keluarga, dan rentang usia anak. Adapun jenis pekerjaan responden terbagi ke dalam beberapa jenis diantaranya, PNS, Pegawai Swasta, Wiraswasta, Pelajar, Mahasiswa, Petani, Seniman, Pedagang dan lainnya. Berikut ini adalah gambaran jenis pekerjaan responden:



Gambar 4.1 Gambaran Pekerjaan Responden

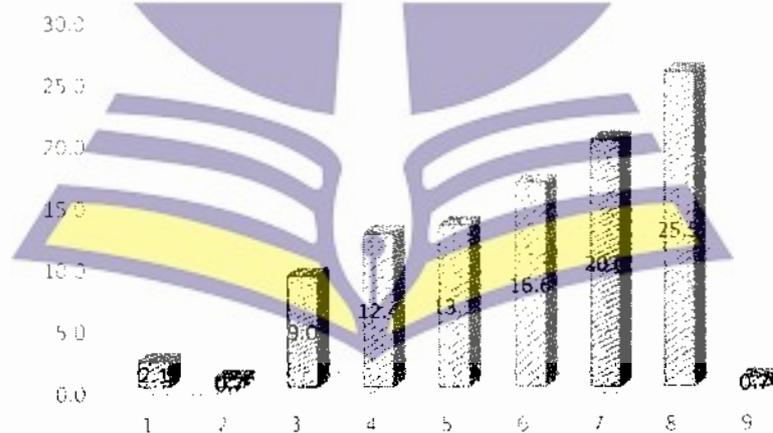
Berdasarkan pada gambar 4.1 diketahui bahwa,

1. responden yang memiliki pekerjaan sebagai PNS berjumlah 53 Orang atau 36,6%,
2. responden yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Swasta berjumlah 1 orang responden atau 0,7%.
3. responden yang memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta berjumlah 13 orang atau 9,0%.

4. responden yang memiliki pekerjaan sebagai Petani berjumlah 2 orang atau 1,4%.
Tidak terdapat responden yang bekerja sebagai Pelajar, Mahasiswa, Scriman maupun Pedagang.
5. responden yang memiliki pekerjaan Lainnya herjumlah 73 orang atau 50,3%.
6. Dan terdapat 3 orang atau 2,1% responden yang tidak mengisi kolom pekerjaan.

Sehingga diketahui bahwa jumlah responden terbanyak dalam penelitian ini memiliki pekerjaan lainnya sebanyak 73 orang.

Rentang Usia responden terbagi ke dalam beberapa bagian yaitu, dibawah 20 Tahun, antara 20 hingga 25 Tahun, antara 26 hingga 30 Tahun, antara 31 hingga 35 Tahun , antara 36 hingga 40 Tahun, antara 41 hingga 45 Tahun, antara 46 hingga 50 Tahun, dan diatas 50 Tahun. Berikut ini adalah gambaran rentang usia responden:



Gambar 4.2 Gambaran Usia Responden

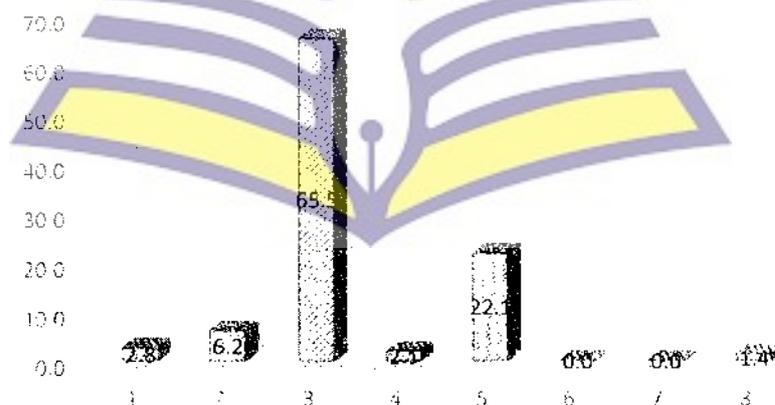
Berdasarkan pada gambar 4.2 diketahui bahwa,

1. responden yang memiliki usia dibawah 20 tahun berjumlah 3 orang atau 2,1%.
2. responden yang memiliki usia 20-25 tahun berjumlah 1 orang responden atau 0,7%.

3. responden yang memiliki usia 26-30 tahun berjumlah 13 orang atau 9,0%.
4. responden yang memiliki usia 31-35 tahun berjumlah 18 orang atau 12,4%.
5. responden yang memiliki usia 36-40 tahun berjumlah 19 orang atau 13,1%.
6. responden yang memiliki usia 41-45 tahun berjumlah 24 orang atau 16,6%.
7. responden yang memiliki usia 46-50 tahun berjumlah 29 orang atau 20%.
8. responden yang memiliki usia lebih dari 50 tahun berjumlah 37 orang atau 25,5%, dan
9. terdapat 1 orang atau 0,7% yang tidak mengisi kolom usia.

Diketahui bahwa responden terbanyak dalam penelitian ini berusia lebih dari 50 tahun.

Latar belakang pendidikan responden terbagi ke dalam beberapa jenjang pendidikan diantaranya SD, SMP SMA/SMK, Diploma, Sarjana, S2 dan S3. Berikut ini adalah latar belakang pendidikan responden:



Gambar 4.3 Gambaran Latar Pendidikan Responden

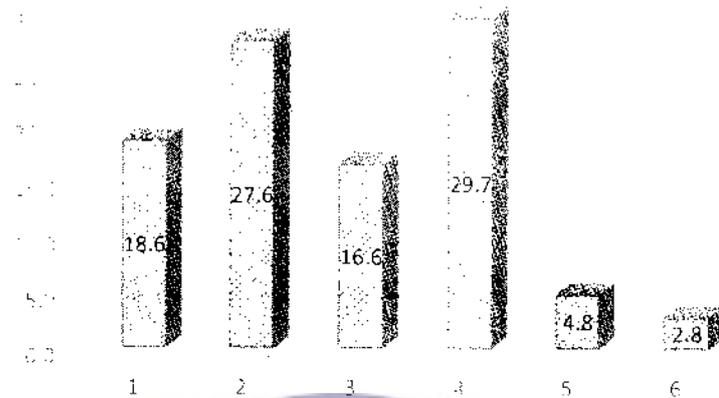
Berdasarkan pada gambar 4.3 diketahui bahwa.

1. responden yang memiliki pendidikan terakhir SD berjumlah 4 orang atau 2,8%.
2. responden yang memiliki pendidikan terakhir SMP berjumlah 9 orang responden atau 6,2%.
3. responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK berjumlah 95 orang atau 65,5%.
4. responden yang memiliki pendidikan terakhir Diploma berjumlah 3 orang atau 2,1%.
5. responden yang memiliki pendidikan terakhir Sarjana berjumlah 32 orang atau 22,1%.
6. tidak terdapat responden yang memiliki pendidikan terakhir S2 maupun S3.
7. terdapat 2 orang atau 1,4% yang tidak mengisi kolom pendidikan.

Diketahui bahwa responden terbanyak dalam penelitian ini memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK dan tidak terdapat responden dengan pendidikan terakhir S2 dan S3.

Rata-rata penghasilan per bulan responden terbagi dalam beberapa nominal yaitu dibawah Rp. 1000.000, diantara Rp. 1.000.000 hingga 2.500.00, diantara Rp. 2.600.000 hingga 3.500.000, diantara Rp. 3.600.000 hingga 5.000.000 , dan diatas Rp. 5.000.000.

Berikut ini Rata-rata penghasilan per bulan responden:



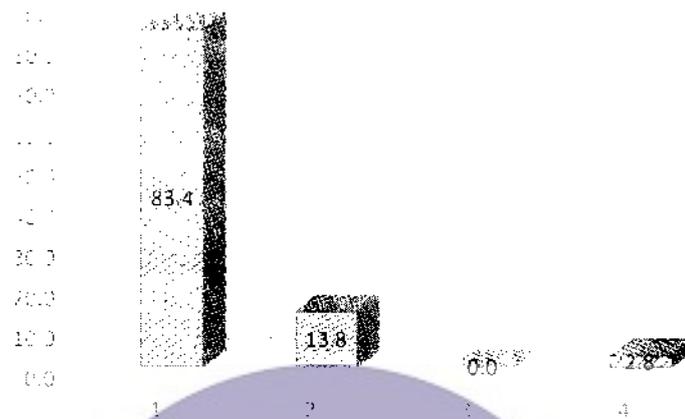
Gambar 4.4 Gambaran Penghasilan Responden

Berdasarkan pada gambar 4.4 diketahui bahwa,

1. responden yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 1.000.000 berjumlah 27 orang atau 18,6%.
2. responden yang memiliki penghasilan antara Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000 berjumlah 40 orang responden atau 27,6%.
3. responden yang memiliki penghasilan antara Rp 2.600.000 sampai dengan Rp 3.500.000 berjumlah 24 orang atau 16,6%.
4. responden yang memiliki penghasilan antara Rp 3.600.000 sampai dengan Rp 5.000.000 berjumlah 43 orang atau 29,7%.
5. responden yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 5.000.000 berjumlah 7 orang atau 4,8%.
6. terdapat 4 orang atau 2,8% yang tidak mengisi kolom penghasilan.

Diketahui bahwa responden terbanyak dalam penelitian ini memiliki penghasilan antara Rp 3.600.000 sampai dengan Rp 5.000.000.

Jumlah anggota keluarga responden terdiri dari berjumlah kurang dari lima orang, berjumlah enam sampai sepuluh orang, dan berjumlah lebih dari sepuluh orang. Adapun gambaran jumlah anggota keluarga responden sebagai berikut:



Gambar 4.5 Gambaran Jumlah Anggota Keluarga Responden

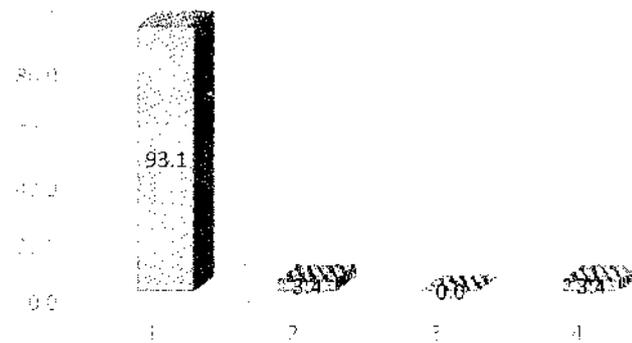
Berdasarkan pada gambar 4.5 diketahui bahwa,

1. responden yang memiliki anggota keluarga kurang dari 5 orang berjumlah 121 orang atau 83,4%.
2. responden yang memiliki anggota keluarga antara 6 sampai dengan 10 orang berjumlah 20 orang responden atau 13,8%.
3. tidak terdapat responden yang memiliki anggota keluarga lebih dari 10 orang.
4. terdapat 4 orang atau 2,8% yang tidak mengisi kolom anggota keluarga.

Diketahui bahwa jumlah responden paling banyak memiliki anggota keluarga kurang dari 5 orang, dan tidak terdapat keluarga dengan anggota keluarga lebih dari 10.

Jumlah anak dalam keluarga responden terdiri dari berjumlah kurang dari lima orang, berjumlah enam sampai sepuluh orang, dan berjumlah lebih dari sepuluh orang.

Adapun gambaran jumlah anak dalam keluarga responden sebagai berikut:



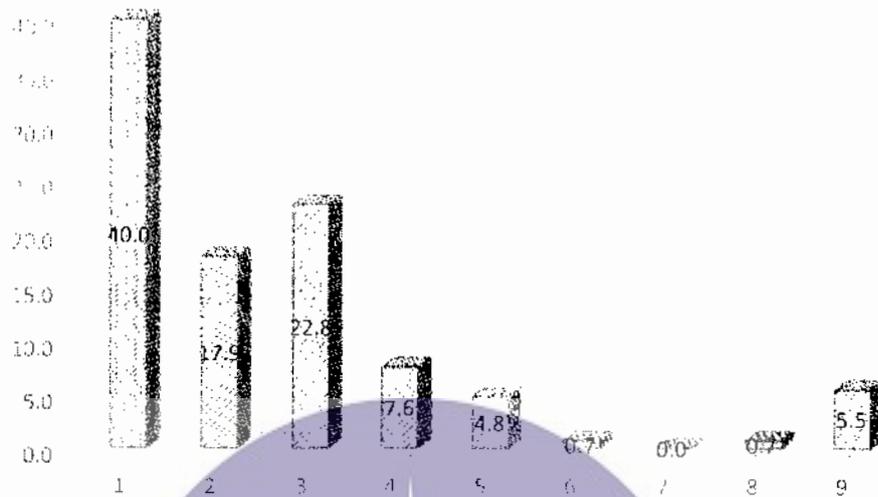
Gambar 4.6 Gambaran Jumlah Anak Responden

Berdasarkan pada gambar 4.6 diketahui bahwa

1. responden yang memiliki jumlah anak kurang dari 5 orang berjumlah 135 orang atau 93,1%.
2. responden yang memiliki jumlah anak antara 6 sampai dengan 10 orang berjumlah 5 orang responden atau 3,4%.
3. tidak terdapat responden yang memiliki jumlah anak lebih dari 10 orang.
4. terdapat 5 orang atau 3,4% yang tidak mengisi kolom jumlah anak.

Diketahui bahwa responden terbanyak dalam penelitian ini memiliki jumlah anak kurang dari 5 orang anak.

Rentang Usia Anak dalam keluarga responden terbagi ke dalam beberapa bagian yaitu ,dibawah 10 Tahun, antara 10 hingga 15 Tahun, antara 16 hingga 20 Tahun, antara 21 hingga 25 Tahun , antara 26 hingga 30 Tahun, antara 31 hingga 35 Tahun, antara 36 hingga 40 Tahun, dan diatas 40 Tahun. Berikut ini adalah gambaran rentang usia anak dalam keluarga responden:



Gambar 4.7 Gambaran Rentang Usia Anak Responden

Berdasarkan pada gambar 4.7 diketahui bahwa,

1. responden yang memiliki anak dengan rentang usia dibawah 10 tahun berjumlah 58 orang atau 40,0%.
2. responden yang memiliki anak dengan rentang usia dari 10 sampai dengan 15 tahun berjumlah 26 orang responden atau 17,9%.
3. responden yang memiliki anak dengan rentang usia 16 sampai dengan 20 tahun berjumlah 33 orang atau 22,8%.
4. responden yang memiliki anak dengan usia 21 sampai dengan 25 tahun berjumlah 11 orang atau 7,6%.
5. responden yang memiliki anak dengan usia 26 sampai dengan 30 tahun berjumlah 7 orang atau 4,8%.
6. responden yang memiliki anak dengan usia 31 sampai dengan 35 tahun berjumlah 1 orang atau 0,7%.
7. Tidak terdapat responden yang memiliki anak dengan rentang usia 36-40 tahun.

8. responden yang memiliki anak dengan rentang usia lebih dari 40 tahun berjumlah 1 orang atau 0,7%.
9. terdapat 8 orang atau 5,5% yang tidak mengisi kolom rentang usia anak.

Diketahui bahwa responden terbanyak memiliki anak dengan rentang usia dibawah 10 tahun.

B. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas

Uji validitas adalah suatu pengukuran untuk menentukan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Validitas bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu instrumen dapat menjalankan fungsinya. Uji validitas berkaitan dengan ketepatan atau kesesuaian alat ukur terhadap konsep yang diukur. sehingga alat ukur benar-benar dapat mengukur apa yang perlu diukur. Uji reliabilitas adalah uji untuk menunjukkan sejauh mana tingkat konsisten pengukuran dari suatu responden atau sejauhmana pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam pemahaman pertanyaan tersebut.

Kuesioner terdiri dari empat bagian, yaitu Peranan Keluarga, Peranan Masyarakat dan Peranan Kepolisian serta Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Purwakarta. Adapun hasil Uji Validitas dan Realibilitas terdapat Peranan Keluarga, Peranan Masyarakat dan Peranan Kepolisian serta Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

Kuesioner A (Peranan Keluarga)

1. Uji Validitas

Tabel 4.1 Item-Total Statistics Uji Validitas Peranan Keluarga

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	R Tabel	Keputusan
ITEM_1	100.53	72.947	.178	.734	.361	Tidak Valid
ITEM_2	100.30	69.321	.760	.713	.361	Valid
ITEM_3	100.20	70.855	.532	.721	.361	Valid
ITEM_4	101.10	81.748	-.442	.773	.361	Tidak valid
ITEM_5	100.40	69.834	.657	.716	.361	Valid
ITEM_6	100.37	70.861	.512	.721	.361	Valid
ITEM_7	100.33	71.816	.454	.725	.361	Valid
ITEM_8	100.27	69.995	.656	.716	.361	Valid
ITEM_9	100.30	69.666	.715	.715	.361	Valid
ITEM_10	100.30	69.183	.602	.714	.361	valid
ITEM_11	100.37	71.275	.545	.722	.361	Valid
ITEM_12	100.47	71.430	.631	.722	.361	Valid
ITEM_13	100.27	69.582	.618	.715	.361	Valid
ITEM_14	100.50	70.121	.730	.716	.361	Valid
ITEM_15	100.27	70.133	.639	.717	.361	Valid

Tabel 4.1 Item-Total Statistics Uji Validitas Peranan Keluarga

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	R Tabel	Keputusan
ITEM_16	100.30	69.390	.751	.713	.361	Valid

Untuk membandingkan valid atau tidak valid yaitu apabila *corrected item* > r tabel , r tabelnya dilihat dari n= 30 yaitu 0, 361 maka item valid dari data di atas variable X1 (peranan keluarga) yaitu 14 item valid dan 2 item tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 4.2 Reliability Statistics Peranan Keluarga

Cronbach's Alpha	N of Items
.736	16

Untuk melihat reliabilitas bisa disandingkan antara *cronbach's alpha* dengan r tabel = 0,736 > 0,361 maka variabel x1 (peranan keluarga) datanya *reliable*.

Kuesioner B (Peranan Masyarakat)

1. Uji Validitas

Tabel 4.3 Item-Total Statistics Uji Validitas Peranan Masyarakat

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	R Tabel	Keputusan
ITEM_1	55.10	29.596	.589	.722	.361	Valid
ITEM_2	55.10	30.025	.483	.728	.361	Valid
ITEM_3	55.00	29.857	.431	.728	.361	Valid
ITEM_4	54.97	28.749	.641	.713	.361	Valid
ITEM_5	54.90	28.239	.710	.707	.361	Valid
ITEM_6	54.86	29.552	.441	.726	.361	Valid
ITEM_7	54.93	28.067	.762	.704	.361	Valid
ITEM_8	55.48	27.830	.352	.727	.361	Tidak Valid
ITEM_9	55.00	28.429	.544	.714	.361	Valid

Untuk membandingkan valid atau tidak valid yaitu apabila *corrected item* > r tabel, r tabelnya dilihat dari $n = 30$ yaitu 0,361 maka item valid dari data di atas variable X2 (peranan masyarakat) yaitu 8 item valid dan 1 item tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 4.4 Reliability Statistics Peranan Masyarakat

<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items
.741	9

Untuk melihat reliabilitas bisa disandingkan antara cronbach's alpha dengan r tabel = $0,741 > 0,361$ maka variabel X2 (peranan masyarakat) datanya reliabel

Kuesioner C (Peranan Kepolisian)

1. Uji Validitas

Tabel 4.5 Item-Total Statistic Uji Validitas Peranan Kepolisian

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	R Tabel	Keputusan
ITEM_1	46.10	26.093	.759	.758	.361	Valid
ITEM_2	46.00	25.793	.713	.757	.361	Valid
ITEM_3	45.93	26.202	.746	.760	.361	Valid
ITEM_4	45.87	26.533	.707	.764	.361	Valid
ITEM_5	45.97	26.516	.672	.765	.361	Valid
ITEM_6	46.00	25.862	.802	.755	.361	Valid
ITEM_7	46.10	26.369	.702	.763	.361	Valid

Untuk membandingkan valid atau tidak valid yaitu apabila *corrected item* > r tabel, r tabelnya dilihat dari n = 30 yaitu 0,361 maka item valid dari data di atas variable X3 (peranan kepolisian) yaitu 7 item valid dan 0 item tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 4.6 Reliability Statistics Peranan Kepolisian

Cronbach's Alpha	N of Items
.788	7

Untuk melihat reliabilitas bisa disandingkan antara *cronbach's alpha* dengan r tabel = 0,788 > 0,361 maka variabel X3 (peranan kepolisian) datanya reliable.

Kuesioner D (Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba)

1. Uji Validitas

Tabel 4.7 Item-Total Statistics Uji Validitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	R Tabel	Keputusan
ITEM_1	70.40	63.490	.479	.753	.361	Valid
ITEM_2	70.27	64.340	.514	.755	.361	Valid
ITEM_3	70.27	61.995	.645	.745	.361	Valid
ITEM_4	70.27	62.685	.739	.746	.361	Valid
ITEM_5	70.17	62.626	.707	.746	.361	Valid
ITEM_6	70.23	64.323	.504	.755	.361	Valid

Tabel 4.7 Item-Total Statistics Uji Validitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	R Tabel	Keputusan
ITEM_7	70.30	62.424	.610	.747	.361	Valid
ITEM_8	70.33	60.437	.772	.736	.361	Valid
ITEM_9	70.27	61.237	.817	.739	.361	Valid
ITEM_10	70.23	62.116	.798	.743	.361	Valid
ITEM_11	70.07	62.823	.677	.748	.361	Valid

Untuk membandingkan valid atau tidak valid yaitu apabila corrected item > r tabel, r tabelnya dilihat dari n= 30 yaitu 0,361 maka item valid dari data di atas variable Y (pencegahan penyalahgunaan narkoba) yaitu 11 item valid dan 0 item tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 4.8 Reliability Statistics Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

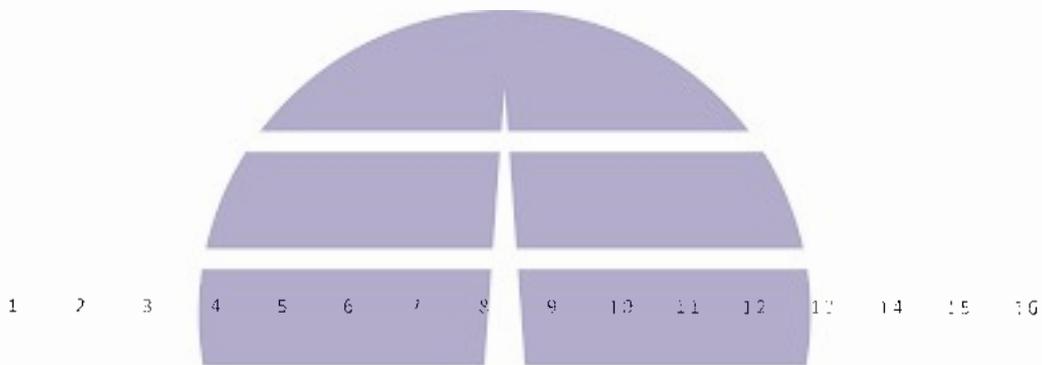
Cronbach's Alpha	N of Items
.766	11

Untuk melihat reliabilitas bisa disandingkan antara cronbach's alpha dengan r tabel = 0,766 > 0,361 maka variabel (pencegahan penyalahgunaan narkoba) datanya reliable.

Peran *collaboration governance* dalam *drug prevention* di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Peran Keluarga

Peranan keluarga terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:



Gambar 4.8 Gambaran Hasil Kuesioner Mengenai Peran Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian dalam bentuk kuesioner mengenai Peran Keluarga menunjukkan bahwa

- a. Terdapat 81,55% responden setuju dengan pernyataan bahwa keluarga merupakan tempat pertama dalam mendapatkan pendidikan tentang bahaya narkoba.
- b. Terdapat 81,90% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa keluarga merupakan tempat pertama yang sangat berperan dalam mencegah anggota keluarga terlibat dalam kasus narkoba.
- c. Terdapat 82,59% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa sebagai kepala keluarga, responden mengetahui mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.
- d. Terdapat 50,69% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa sebagai kepala keluarga, responden mengetahui cara penyebaran narkoba.

- e. Hasil penelitian dari kuesioner ini juga menunjukkan bahwa terdapat 80,17% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa seharusnya keluarga dapat memberikan informasi awal tentang bahaya penggunaan narkoba sejak awal.
- f. Terdapat 77,93% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa kepala keluarga atau orang tua dapat menyampaikan bahaya penyalahgunaan narkoba.
- g. Terdapat 79,31% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa responden menjelaskan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada anggota keluarganya.
- h. Terdapat 84,14% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa kasih sayang dalam keluarga (melindungi, menjaga dan merawat) merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dalam keluarga.
- i. Terdapat 81,72% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa rasa saling menghormati di dalam keluarga (patuh kepada orang tua, menghargai anggota keluarga yang lain) merupakan hal yang penting.
- j. Terdapat 80% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa adanya peraturan yang ketat dalam keluarga merupakan hal yang penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- k. Terdapat 80,34% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa terdapat kesamaan pendapat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dalam keluarga merupakan hal yang penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- l. Terdapat 78,45% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat dicegah apabila ada rasa saling percaya diantara anggota keluarga.
- m. Terdapat 86,03% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa penanaman ajaran agama dalam keluarga dengan keteladanan merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- n. Terdapat 78,79% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa sebagai kepala keluarga, responden mengetahui tentang cara mendampingi atau memberi informasi, mengawasi pergaulan anak dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba.

- o. Terdapat 81,90% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa pengawasan orang tua yang baik (memantau perkembangan anak, memantau pergaulan anak) merupakan hal yang harus dilakukan jika ingin mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- p. Terdapat 83,62% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa penanaman disiplin yang kuat tentang ibadah, menjalankan tugas-tugas pendidikan dan menjaga nilai serta norma kesopanan merupakan hal yang harus dilakukan oleh keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

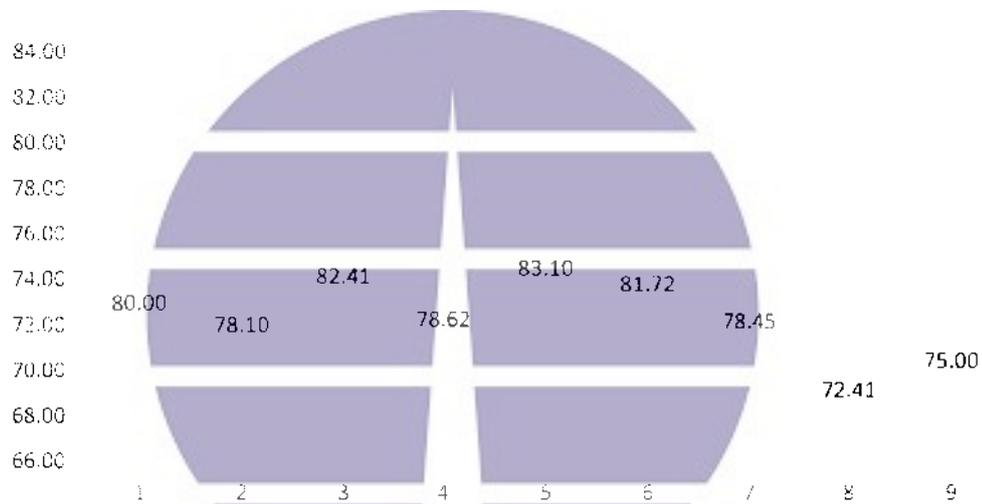
Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioner Peranan keluarga terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta diketahui aspek tertinggi atau aspek yang mendapatkan persetujuan terbanyak dari responden adalah penanaman ajaran agama dalam keluarga dengan keteladanan merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba; kasih sayang dalam keluarga (melindungi, menjaga dan merawat) merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dalam keluarga; dan penanaman disiplin yang kuat tentang ibadah, menjalankan tugas-tugas pendidikan dan menjaga nilai serta norma kesopanan merupakan hal yang harus dilakukan oleh keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioner Peranan keluarga terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta diketahui aspek terendah atau aspek yang memiliki persetujuan dengan persentasi paling sedikit yaitu sebagai kepala keluarga, responden mengetahui cara penyebaran narkoba; dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, menurut pendapat responden kepala keluarga atau orang tua dapat menyampaikan bahaya penyalahgunaan narkoba; dan sebagai kepala

keluarga, responden menjelaskan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada anggota keluarga.

2. Peran Masyarakat

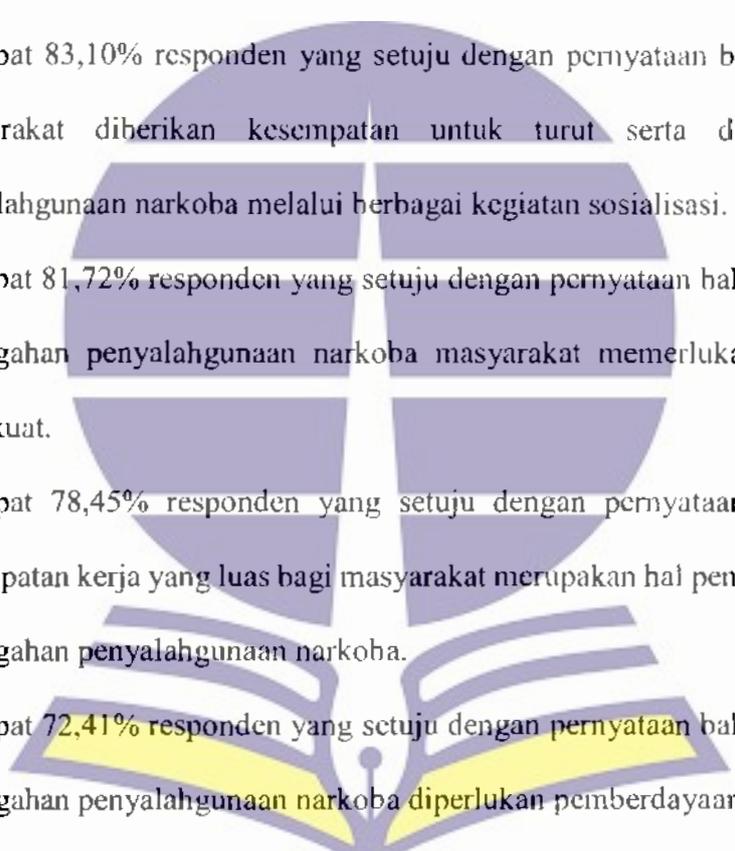
Peran masyarakat terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:



Gambar 4.9 Gambaran Hasil Kuesioner Mengenai Peran Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian dalam bentuk kuesioner mengenai Peran Masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, yaitu

- Terdapat 80% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa tingkah laku pemuka masyarakat turut mempengaruhi upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- Terdapat 78,10% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa adanya organisasi kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal merupakan sarana yang penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

- 
- c. Terdapat 82,41% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa adanya kegiatan positif pada organisasi kepemudaan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
- d. Terdapat 78,62% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa teman sebaya dalam lingkungan tempat tinggal merupakan kelompok yang sangat berpengaruh dalam terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- e. Terdapat 83,10% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa seharusnya masyarakat diberikan kesempatan untuk turut serta dalam mencegah penyalahgunaan narkoba melalui berbagai kegiatan sosialisasi.
- f. Terdapat 81,72% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba masyarakat memerlukan norma aturan yang kuat.
- g. Terdapat 78,45% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa adanya kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat merupakan hal penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- h. Terdapat 72,41% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba diperlukan pemberdayaan LSM.
- i. Terdapat 75% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa masyarakat saat ini sudah berperan sebagai fasilitator dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

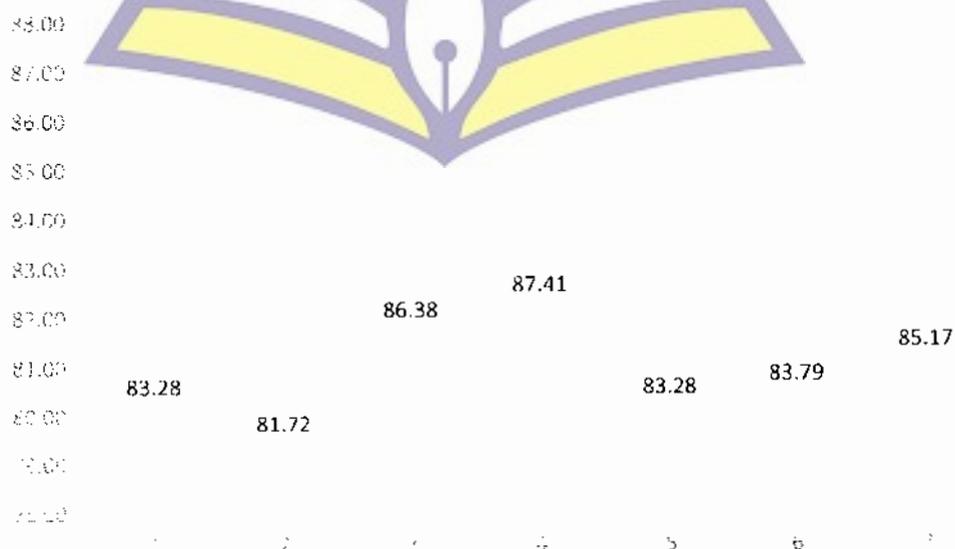
Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioner Peranan masyarakat terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta diketahui aspek tertinggi atau aspek yang mendapat persetujuan paling banyak dari responden adalah seharusnya masyarakat diberikan kesempatan untuk turut serta mencegah penyalahgunaan narkoba

melalui berbagai kegiatan sosialisasi; adanya kegiatan positif pada organisasi kepemudaan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba; dan responden yakin bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, masyarakat memerlukan norma aturan yang kuat.

Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioner Peranan masyarakat terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta diketahui aspek terendah atau responden dengan persentasi persetujuan paling sedikit adalah upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba diperlukan pemberdayaan LSM; masyarakat saat ini sudah berperan sebagai fasilitator dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba; dan adanya organisasi kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal merupakan sarana yang penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

3. Peran Kepolisian

Peran Kepolisian terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut



Gambar 4.10 Gambaran Hasil Kuesioner Mengenai Peran Kepolisian

Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioner Peranan Kepolisian terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, yaitu:

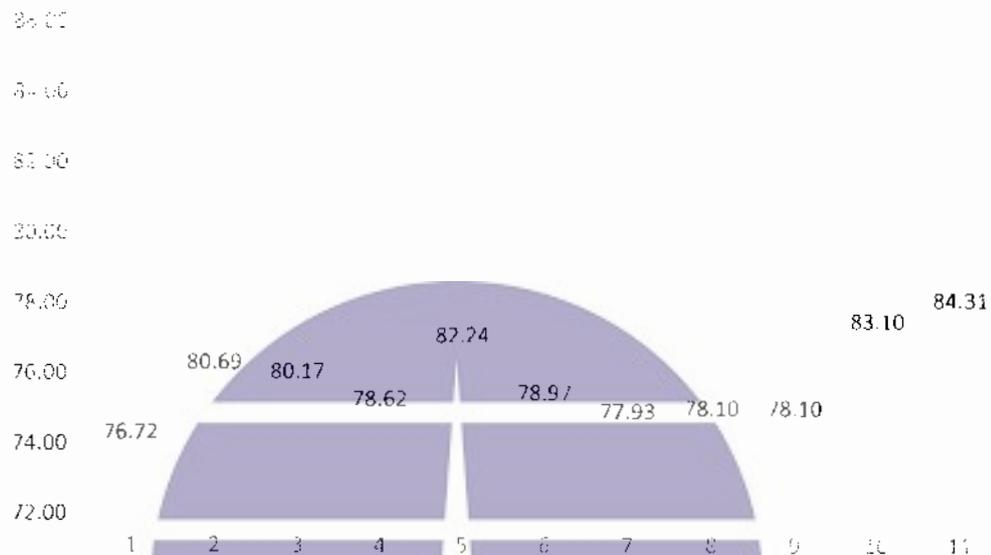
- a. Terdapat 83,28% yang setuju dengan pernyataan bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, peran kepolisian adalah membina dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
- b. Terdapat 81,72% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, peran kepolisian adalah dengan melakukan patrol atau operasi rutin.
- c. Terdapat 86,38% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, peran kepolisian adalah dengan melakukan penangkapan pada bandar narkoba.
- d. Terdapat 87,41% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian adalah dengan melakukan penangkapan pada pengedar narkoba.
- e. Terdapat 83,28% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian adalah dengan melakukan penangkapan pada pengguna narkoba.
- f. Terdapat 83,79% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian adalah dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan narkoba.
- g. Terdapat 85,17% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, peran kepolisian adalah dengan melakukan penyidikan terhadap kasus narkoba dengan benar.

Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioner Peranan kepolisian terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta diketahui aspek tertinggi atau aspek yang memiliki jumlah persetujuan paling banyak dari responden adalah upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian adalah dengan melakukan penangkapan pada pengguna narkoba; responden percaya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian adalah dengan melakukan penangkapan pada bandar narkoba; dan responden percaya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian adalah dengan melakukan penyidikan terhadap kasus narkoba dengan benar.

Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioner Peranan kepolisian terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta diketahui aspek terendah atau aspek dengan persentase persetujuan paling sedikit dari responden adalah upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian adalah dengan melakukan patrol/ oprasi rutin; dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, peran kepolisian adalah membina dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat; dan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian adalah dengan melakukan penangkapan pada pengguna narkoba.

4. Pencegahan Narkoba

Pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut,



Gambar 4.11 Gambaran Hasil Kuesioner Mengenai Pencegahan Narkoba

Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioner Pencegahan Narkoba menunjukkan bahwa

- Terdapat 76,72% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa dengan adanya penyuluhan yang intensif dari organisasi kemasyarakatan saat ini tingkat pencegahan narkoba menjadi semakin baik.
- Terdapat 80,69% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa dengan adanya peran keluarga, tingkat kesadaran tentang bahaya narkoba semakin baik.
- Terdapat 80,17% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa dengan adanya penyuluhan yang intensif dari kepolisian, saat ini tingkat pencegahan narkoba semakin baik.
- Terdapat 78,62% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa dengan adanya kepedulian yang tinggi dari masyarakat, saat ini upaya pencegahan narkoba semakin berhasil.

- c. Terdapat 82,24% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dari berbagai pihak, menurut pengamatan responden saat ini masyarakat semakin waspada terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.
- f. Terdapat 78,97% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa penyuluhan tentang hidup sehat dari aparat pemerintah sudah berhasil mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- g. Terdapat 77,93% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, menurut pengamatan responden, diperlukan peran fasilitator.
- h. Terdapat 78,10% responden yang setuju bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba diperlukan peran koordinator dari masyarakat dan pemerintah.
- i. Terdapat 83,10% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa peran koordinator dari kepolisian juga diperlukan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- j. Terdapat 84,31% responden yang setuju bahwa diperlukan adanya kondisi yang terbina yang baik antara instansi terkait dengan masyarakat akan bahaya narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioner terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta diketahui aspek tertinggi atau aspek yang mendapatkan persetujuan paling banyak dari responden yang adalah diperlukan adanya kondisi yang terbina yang baik antara instansi terkait dengan masyarakat akan bahaya narkoba; peran koordinator dari kepolisian juga diperlukan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba; dan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan

narkoba dari berbagai pihak, menurut pengamatan responden saat ini masyarakat semakin waspada terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioner terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta diketahui aspek terendah atau aspek yang memiliki persentase persetujuan paling sedikit adalah dengan adanya penyuluhan yang intensif dari organisasi kemasyarakatan saat ini tingkat pencegahan narkoba menjadi semakin baik dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, menurut pengamatan responden, diperlukan peran fasilitator; dan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba diperlukan peran koordinator dari masyarakat dan pemerintah.

Hasil Regresi Pengaruh Peranan Keluarga, Masyarakat, Kepolisian Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Purwakarta

1. Pengaruh Peranan Keluarga Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Purwakarta

a. Korelasi

Berikut adalah table pedoman korelasi yang dijadikan panduan untuk menentukan tingkat korelasi:

Tabel 4.9 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,800-1,000	Sangat Kuat

Tabel 4. 10 Correlations Peranan Keluarga terhadap Pencegahan Narkoba

	Peranan Keluarga	Pencegahan Narkoba
Pearson Correlation	1	.681**
Sig. (2-Tailed)		.000
N	144	144
Pearson Correlation	.681**	1
Sig. (2-tailed)	.000	
N	144	144

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pada hasil uji korelasi di atas, ditemukan korelasi antara Peranan Keluarga terhadap Pencegahan Narkoba sebesar 0,681 dengan tingkat signifikansi $p = 0,000 < \alpha = 0,05$ kemudian Jika dibandingkan dengan nilai r_{tabel} sebesar 0,159 diperoleh berdasarkan jumlah $N = 144$, maka nilai r_{hitung} 0,681 lebih besar daripada r_{tabel} (0,681 > 0,159). Kesimpulannya terdapat hubungan antara Peranan Keluarga dengan Pencegahan Narkoba berada pada tingkat **kuat** dan berharga **positif**.

b. Uji Signifikansi Korelasi

Uji signifikansi korelasi dilakukan melalui uji t dengan bantuan program SPSS versi 17.00 for windows sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Coefficients^a Peranan Keluarga terhadap Pencegahan Narkoba

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.700	1.990		3.367	.000
Peranan Keluarga	.425	.038	.681	11.067	.000

a. Dependent Variable: Pencegahan Narkoba

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh t_{hitung} sebesar 11,067 sedangkan pada taraf signifikansi 0,05 dengan $dk (144-2) = 142$ diperoleh angka sebesar 1,645. Ternyata $t_{hitung} 11,067 > t_{tabel} 1,645$. Dengan demikian terdapat korelasi positif dan signifikan antara peranan keluarga dengan pencegahan narkoba.

c. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis determinan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variable X1 terhadap variabel Y yang berlaku untuk seluruh populasi yang diteliti. Koefisien determinasi ini dihitung dengan menggunakan *SPSS versi 17.0 for windows*, sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Model Summary Peranan Keluarga terhadap Pencegahan Narkoba

	Change Statistics				
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.463 ^a	122.475	1	142	.000

a. Predictors: (Constant), Peranan Keluarga

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh hasil *R Square* sebesar 0,463 atau 46,3 %. Hal ini berarti bahwa peranan keluarga memberikan kontribusi sebesar 46,3% terhadap pencegahan narkoba sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain.

d. Analisis Regresi

Untuk mengetahui bentuk korelasi peranan keluarga terhadap pencegahan narkoba maka dilakukan analisis regresi sederhana dengan menggunakan program *SPSS versi 17.00 for windows*, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 13 Coefficients^a Peranan Keluarga terhadap Pencegahan Narkoba

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.700	1.990		3.367	.001
PERANAN KELUARGA	.425	.038	.681	11.067	.000

a. Dependent Variable: Pencegahan Narkoba

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh regresi arah regresi (b) sebesar 0,425 dan konstanta sebesar 6,700. Maka dapat digambarkan bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut oleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 6,700 + 0,425 X1$$

Setelah mengetahui keterkaitan antara peranan keluarga dengan pencegahan narkoba, selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi korelasi dengan menggunakan uji F. Uji signifikansi ini untuk menentukan apakah peranan keluarga signifikan terhadap pencegahan narkoba.

Tabel 4. 14 Anova^b Peranan Keluarga terhadap Pencegahan Narkoba

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	844.129	1	844.129	122.475	.000 ^a
Residual	978.698	142	6.892		
Total	1822.826	143			

a. Predictors: (Constant), Peranan Keluarga

b. Dependent Variable: Pencegahan Narkoba

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh barga F hitung sebesar 122,475 sedangkan F tabel pada tingkat kepercayaan 95% dengan dk (n-2) = 142 diperoleh harga F tabel sebesar 3,84 Setelah diketahui harga F_{hitung} dan F_{tabel} ternyata $F_{hitung} 122.475 > 3,84 F_{tabel}$ dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari peranan keluarga terhadap pencegahan narkoba.

2. Pengaruh Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Purwakarta

a. Korelasi

Hasil korelasi antara peranan masyarakat dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 4. 16 Correlations Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

	Peranan Masyarakat	Pencegahan Narkoba
Pearson Correlation	1	.563**
Sig. (2-tailed)		.000
N	144	144
Pearson Correlation	.563**	1
Sig. (2-tailed)	.000	
N	144	144

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pada hasil uji korelasi di atas, ditemukan korelasi antara Peranan Masyarakat terhadap Pencegahan Narkoba sebesar 0,563 dengan tingkat signifikansi $p = 0,000 < \alpha = 0.05$ kemudian Jika dibandingkan dengan nilai r_{tabel} sebesar 0,159 diperoleh berdasarkan jumlah $N = 144$, maka nilai r_{hitung} 0,563 lebih besar daripada r_{tabel} ($0,563 > 0,159$). Kesimpulannya terdapat hubungan antara Peranan Masyarakat dengan Pencegahan Narkoba berada pada tingkat **kuat** dan berharga **positif**.

b. Uji Signifikansi Korelasi

Uji signifikansi korelasi dilakukan melalui uji t dengan bantuan program SPSS versi 17.00 for windows sebagai berikut:

Tabel 4. 17 Coefficients^a Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	15.007	1.691		8.872	.000
Peranan Masyarakat	.571	.070	.563	8.117	.000

a. Dependent Variable: Pencegahan Narkoba

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh t_{hitung} sebesar 8,117 sedangkan pada taraf signifikansi 0,05 dengan $dk (144-2) = 142$ diperoleh angka sebesar 1,645. Ternyata $t_{hitung} 8,117 > t_{tabel} 1,645$. Dengan demikian terdapat korelasi positif dan signifikan antara peranan masyarakat dengan pencegahan narkoba.

c. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis determinan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variable X1 terhadap variabel Y yang berlaku untuk seluruh populasi yang diteliti. Koefisien determinasi ini dihitung dengan menggunakan SPSS versi 17.0 for windows, sebagai berikut:

Tabel 4. 18 Model Summary Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

	R Square	Adjusted R Square	F	Change Statistics				
				Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.317	.312	2.961	.317	65.888	1	142	.000

a. Predictors: (Constant), Peranan Masyarakat

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh hasil R Square sebesar 0,317 atau 31,7 %. Hal ini berarti bahwa peranan masyarakat memberikan kontribusi sebesar 31,7% terhadap pencegahan narkoba sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain.

d. Analisis Regresi

Untuk mengetahui bentuk korelasi peranan masyarakat terhadap pencegahan narkoba maka dilakukan analisis regresi sederhana dengan menggunakan program SPSS versi 17.00 for windows, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 19 Coefficients^a Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	15.007	1.691		8.872	.000
Peranan Masyarakat	.571	.070	.563	8.117	.000

a. Dependent Variable: Pencegahan Narkoba

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh regresi arah regresi (b) sebesar 0,571 dan konstanta sebesar 15.007. Selanjutnya dapat digambarkan bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut oleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 15.007 + 0,571 X_1$$

Setelah mengetahui keterkaitan antara peranan masyarakat dengan pencegahan narkoba, selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi korelasi dengan menggunakan uji F. Uji signifikansi ini untuk menentukan apakah peranan masyarakat signifikan terhadap pencegahan narkoba.

Tabel 4. 20 Anova^b Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	577.729	1	577.729	65.888	.000 ^a
Residual	1245.097	142	8.768		
Total	1822.826	143			

a. Predictors: (Constant), Peranan Masyarakat

b. Dependent Variable: Pencegahan Narkoba

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga F hitung sebesar 65,888 sedangkan F tabel pada tingkat kepercayaan 95% dengan dk (n-2) = 142 diperoleh harga F tabel sebesar 3,84 Setelah diketahui harga F_{hitung} dan F_{tabel} ternyata F_{hitung} 122,475 >

3,84 F_{tabel} Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari peranan masyarakat terhadap pencegahan narkoba.

3. Pengaruh Peranan Kepolisian Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Purwakarta

a. Korelasi

Hasil analisis korelasi antara peranan kepolisian dengan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 4. 22 Correlations Peranan Kepolisian Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

	Peranan Polisi	Pencegahan Narkoba
Pearson Correlation	1	.672**
Sig. (2-tailed)		.000
N	144	144
Pearson Correlation	.672**	1
Sig. (2-tailed)	.000	
N	144	144

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pada hasil uji korelasi di atas, ditemukan korelasi antara Peranan Kepolisian terhadap Pencegahan Narkoba sebesar 0,672 dengan tingkat signifikansi $p = 0,000 < \alpha = 0,05$ kemudian Jika dibandingkan dengan nilai r_{tabel} sebesar 0,159 diperoleh berdasarkan jumlah $N = 144$, maka nilai r_{hitung} 0,672 lebih besar daripada r_{tabel} (0,672

> 0,159). Kesimpulannya terdapat hubungan antara Peranan Masyarakat dengan Pencegahan Narkoba berada pada tingkat **kuat** dan berharga **positif**.

b. Uji Signifikansi Korelasi

Uji signifikansi korelasi dilakukan melalui uji t dengan bantuan program SPSS versi 17.00 for windows sebagai berikut:

Tabel 4. 23 Coefficients^a Peranan Kepolisian Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.619	2.046		3.235	.002
PERANAN KEPOLISIAN	.621	.057	.672	10.801	.000

a. Dependent Variable: Pencegahan Narkoba

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh t_{hitung} sebesar 10,801 sedangkan pada taraf signifikansi 0,05 dengan dk $(144-2) = 142$ diperoleh angka sebesar 1,645. Ternyata $t_{hitung} 10,801 > t_{tabel} 1,645$. Dengan demikian terdapat korelasi positif dan signifikan antara peranan Kepolisian dengan pencegahan narkoba.

c. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis determinan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variable X1 terhadap variabel Y yang berlaku untuk seluruh populasi yang diteliti. Koefisien determinasi ini dihitung dengan menggunakan *SPSS versi 17.0 for windows*, sebagai berikut:

Tabel 4. 24 Model Summary Peranan Kepolisian Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

	R Square	Adjusted R Square	F	Change Statistics				
				Change	df1	df2	Sig. F	Change
1	.451	.447	2.655	.451	116.667	1	142	.000

a. Predictors: (Constant), Peranan Kepolisian

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh hasil R Square sebesar 0,451 atau 45,1 %. Hal ini berarti bahwa peranan Kepolisian memberikan kontribusi sebesar 45,1% terhadap pencegahan narkoba sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain.

d. Analisis Regresi

Untuk mengetahui bentuk korelasi peranan masyarakat terhadap pencegahan narkoba maka dilakukan analisis regresi sederhana dengan menggunakan program *SPSS versi 17.00 for windows*, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 25 Coefficients^a Peranan Kepolisian Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.619	2.046		3.235	.002
PERANAN KEPOLISIAN	.621	.057	.672	10.801	.000

a. Dependent Variable: Pencegahan Narkoba

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh regresi arah regresi (b) sebesar 0.621 dan konstanta sebesar 6.619. Maka dapat digambarkan bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut oleh persamaan regresi

$$\hat{Y} = 6,619 + 0,621 X1$$

Setelah mengetahui keterkaitan antara peranan kepolisian dengan pencegahan narkoba, selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi korelasi dengan menggunakan uji F. Uji signifikansi ini untuk menentukan apakah peranan kepolisian signifikan terhadap pencegahan narkoba.

Tabel 4. 26 Anova^b Peranan Kepolisian Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	822.153	1	822.153	116.667	.000 ^a
Residual	1000.674	142	7.047		
Total	1822.826	143			

a. Predictors: (Constant), Peranan Kepolisian

b. Dependent Variable: Pencegahan Narkoba

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga F hitung sebesar 116,667 sedangkan F tabel pada tingkat kepercayaan 95% dengan dk (n-2) = 142 diperoleh harga F tabel sebesar 3,84 Setelah diketahui harga F_{hitung} dan F_{tabel} ternyata F_{hitung} 116,667 > 3,84 F_{tabel} Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari peranan kepolisian terhadap pencegahan narkoba.

4. Pengaruh Peranan Keluarga, Masyarakat Dan Kepolisian Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Purwakarta

a. Analisis Koefesien Korelasi Ganda

Analisis koefesien ganda dimaksudkan untuk mengetahui derajat keterkaitan atau hubungan antara peranan keluarga, masyarakat dan kepolisian berkelanjutan (secara bersama-sama/simultan) terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba. Untuk uji korelasi ini menggunakan rumus korelasi ganda.

Tabel 4. 27 Model Summary Peranan Keluarga, Masyarakat Dan Kepolisian Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

					Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.799 ^a	.638	.630	2.172	.638	82.159	3	140	.000

a. Predictors: (Constant), Peranan Keluarga, Peranan Masyarakat, Peranan Kepolisian

Dari tabel di atas diketahui hasil korelasi (R) sebesar 0,799 yang berarti bahwa terdapat korelasi ganda yang positif dari peranan keluarga, peranan masyarakat dan peranan kepolisian terhadap penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan kriteria harga koefesien korelasi r_{hitung} 0,799 menunjukkan tingkat hubungan **kuat**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi ganda positif yang sedang antara peranan keluarga, peranan masyarakat dan peranan kepolisian terhadap penyalahgunaan narkoba.

b. Uji Signifikansi Korelasi Ganda Peranan Keluarga, Masyarakat Dan Kepolisian Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Uji signifikansi korelasi dilakukan melalui uji t dengan bantuan program *SPSS versi 17.00 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4. 28 Anova^b Peranan Keluarga, Masyarakat Dan Kepolisian Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1162.514	3	387.505	82.159	.000 ^a
Residual	660.313	140	4.717		
Total	1822.826	143			

a. Predictors: (Constant), Peranan Polisi, Peranan Keluarga, Peranan Masyarakat

b. Dependent Variable: Pencegahan Narkoba

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga F hitung sebesar 82,159 sedangkan F_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% dengan dk $(n-2) = 142$ diperoleh harga F_{tabel} sebesar 3,84. Setelah diketahui harga F hitung dan F tabel ternyata $F_{hitung} 82,159 > 3,84 F_{tabel}$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi ganda positif yang signifikan antara **peranan keluarga, peranan masyarakat dan peranan kepolisian** terhadap penyalahgunaan narkoba.

c. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis determinan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel X1 dan variabel X2, X3 terhadap variabel Y yang berlaku untuk seluruh populasi yang diteliti. Koefisien determinasi ini dihitung dengan menggunakan *SPSS versi 17.0 for windows*, sebagai berikut:

Tabel 4. 29 Model Summary Peranan Keluarga, Masyarakat Dan Kepolisian Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

	R	R Square	Adjusted R Square	Sig.	Change Statistics				
					Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.799 ^a	.638	.630	2.172	.638	82.159	3	140	.000

a. Predictors: (Constant), Peranan Keluarga, Peranan Masyarakat, Peranan Kepolisian

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh hasil R Square sebesar 0,638 atau 63,8%. Hal ini berarti bahwa peranan keluarga, masyarakat dan kepolisian memberikan kontribusi sebesar 63,8% terhadap pencegahan narkoba, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain.

d. Analisis Regresi Ganda

Untuk mengetahui bentuk korelasi peranan keluarga, masyarakat dan kepolisian terhadap pencegahan narkoba maka dilakukan analisis regresi sederhana dengan menggunakan program *SPSS versi 17.00 for windows*, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 30 Coefficients^a Peranan Keluarga, Masyarakat Dan Kepolisian Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.653	1.944		850	.000
Peranan Keluarga	.267	.039	.427	6.900	.000
Peranan Masyarakat	.124	.065	.122	1.901	.000
Peranan Polisi	.382	.057	.414	6.746	.000

a. Dependent Variable: Pencegahan Narkoba

Tabel 4. 31 Coefficients^a Peranan Keluarga, Masyarakat Dan Kepolisian Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	1	
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	20.114	7.024			(Constant)
Kualitas Kehidupan Kerja	.548	.110	.347		Kualitas Kehidupan Kerja
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	.424	.109	.272		Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh regresi arah regresi (b1) sebesar 0,267, (b2) sebesar 0,124 dan (b3) sebesar 0,382 konstanta sebesar (a) 1,653. Maka dapat digambarkan bentuk hubungan antara ketiga variabel tersebut oleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 1,653 + 0,267 X1 + 0,124 X2 + 0,382X3$$

Hal ini dapat menjelaskan bahwa peningkatan satu unit Peranan Keluarga, Peranan Masyarakat dan Peranan Kepolisian akan diikuti dengan peningkatan nilai pencegahan narkoba.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan positif antara peranan keluarga dengan pencegahan narkoba. Aspek tertinggi dalam peranan keluarga terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta adalah kriteria-kriteria dalam keluarga sehat dan bahagia yang terdapat pada penelitian Nick Stinnet dan John De Frain (dalam Hidayat, 2013) studi dan penelitian yang berjudul “The National Study on Family Strengths”. Dari hasil penelitiannya terhadap keluarga-keluarga Amerika, kedua sarjana tersebut mendapatkan rumusan untuk menjadi syarat suatu keluarga yang disebut keluarga bahagia dan sehat (happy and healthy family), yaitu paling sedikit harus terpenuhi beberapa kriteria, yaitu: 1. Mempunyai Landasan Agama Kehidupan beragama (penghayatan dan pengamalannya) dalam rumah tangga sangat dianjurkan. Karena hanya dalam agamalah terkandung nilai-nilai moral yang sifatnya abadi. 2. Selalu Bersama Keluarga Dalam masyarakat modern, ikatan keluarga sering mudah longgar. Karena kesibukan, jarang mempunyai waktu untuk bersama. sehingga merupakan faktor yang mendukung terjadinya kesenjangan, antara orangtua dan anak. Oleh karena itu sesibuk-sibuk apapun, tetap luangkan waktu untuk keluarga. 3. Mempunyai Pola Komunikasi yang Baik Komunikasi yang terjadi sering kali satu arah dan instruktif sifatnya. Bila demikian halnya, maka kondisi demikian itu merupakan faktor yang mendukung bagi terjadinya disfungsi/disharmoni keluarga. Maka komunikasi yang bersifat dua arah, demokratis dan emosional (dengan perasaan) yang hangat antara orangtua dan anak-anak, menyebabkan bila terjadi suatu masalah, cepat dapat ditanggapi dan diselesaikan. 4. Saling Menghargai Saling menghargai antara suami isteri, demikian juga pada anak-anak, amatlah dianjurkan bagi hubungan yang baik antara sesama anggota keluarga. Pemberian perhatian ataupun penghargaan dan support agar yang akan datang dapat lebih

baik. 5. Adanya Ikatan Kekeluargaan Keluarga harus merupakan suatu ikatan dinamis yang memungkinkan para anggota keluarga itu berkembang dan tumbuh. Oleh karena itu keluarga sebagai suatu kelompok.

Sebuah keluarga yang sehat dan bahagia memiliki peran yang positif pada pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa betapa pentingnya membentuk keluarga sehat dan bahagia, ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab para orangtua, untuk pembinaan perkembangan jiwa anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Perubahan-perubahan sosial sebagai konsekuensi modernisasi sering kali menyebabkan tali ikatan keluarga menjadi longgar. Apabila hal ini tidak disadari dapat berakibat lebih jauh yang pada gilirannya dapat berakibat remaja sebagai tidak mendapatkan norma-norma dan terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. (Herdajani dan Rosalinda dalam Prosiding Seminar Nasional Parenting, 2013).

Untuk itu peranan keluarga terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta adalah dalam penanaman ajaran agama dalam keluarga dengan keteladanan; kasih sayang dalam keluarga (melindungi, menjaga dan merawat); dan penanaman disiplin yang kuat tentang ibadah, menjalankan tugas-tugas pendidikan dan menjaga nilai serta norma kesopanan.

Penelitian sebelumnya pun menyatakan hasil yang sama, dalam penelitian Peran Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Yogyakarta Oleh Emun Noviani (2009) menjelaskan bahwa peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkotika menempatkan posisi orangtua sebagai "central control"; remaja untuk berpartisipasi aktif membimbing, mendidik, mengawasi dan memberikan motivasi langsung kepada anak remaja agar terhindar dari penyalahgunaan

narkotika. Kepala keluarga atau orang tua merupakan kontrol utama dalam keluarga harus berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Peranan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan narkoba Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip kolaborasi atau kemitraan Suharyanto dalam Subarsono (2016: 185-186), yaitu kelompok masyarakat tidak sedikit yang memiliki potensi atas kemampuan yang dimiliki. Namun terhalang pada keterbatasan. Pada penelitian ini diketahui bahwa masyarakat bersedia dan ingin diberikan kesempatan untuk turut serta mencegah penyalahgunaan narkoba melalui berbagai kegiatan sosialisasi.

Kerjasama antara institusi pemerintah dan masyarakat biasanya di dorong oleh keyakinan untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan publik dan kegiatan pemerintahan yang partisipatif, bertujuan memberdayakan warga, atau atas pertimbangan etik yang penting adalah keyakinan bahwa penyelenggara kegiatan pemerintah dan pelayanan publik seharusnya menempatkan warga dan pengguna layanan sebagai subjek yang perlu dilibatkan secara aktif dalam keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat diperlukan adanya tanggung jawab, dan visi bersama yang akan menghasilkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Ketika masyarakat ikut berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, maka upaya pencegahan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat pun memiliki rasa tanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dari narkoba.

Pemerintah dengan segenap institusinya, lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi dan masyarakat luas harus menyatu dalam satu gerakan yang terencana, terarah, terpadu secara sistematis dan berkelanjutan menanggulangi penyalahgunaan Narkoba sampai tuntas (Partodiharja, 2004). Hal ini juga didukung oleh pernyataan Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub-bidang Napza Kementerian Kesehatan Herbert Sidabutar mengatakan, Kementerian Kesehatan tengah melaksanakan pendidikan keterampilan hidup (life skill) di sekolah. Ini bertujuan untuk memberikan penguatan mental kepada siswa dalam menghadapi pelbagai persoalan hidup, termasuk jerat narkoba (Kompas.com, 2013).

Peranan kepolisian memiliki peran yang kuat terhadap pencegahan narkoba. Kemitraan antara institusi pemerintah dipersepsikan memiliki tradisi dan nilai-nilai efisiensi dan inovasi yang lebih baik. Adanya kemitraan antara pemerintah dengan kepolisian menjadi simbol untuk menunjukkan adanya upaya memperbaiki efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui kemitraan tersebut mereka berharap akan dinilai positif oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep yang dijelaskan Sink dalam Dwiyanto (2011: 253) kerjasama kolaboratif sebagai sebuah proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap suatu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri.

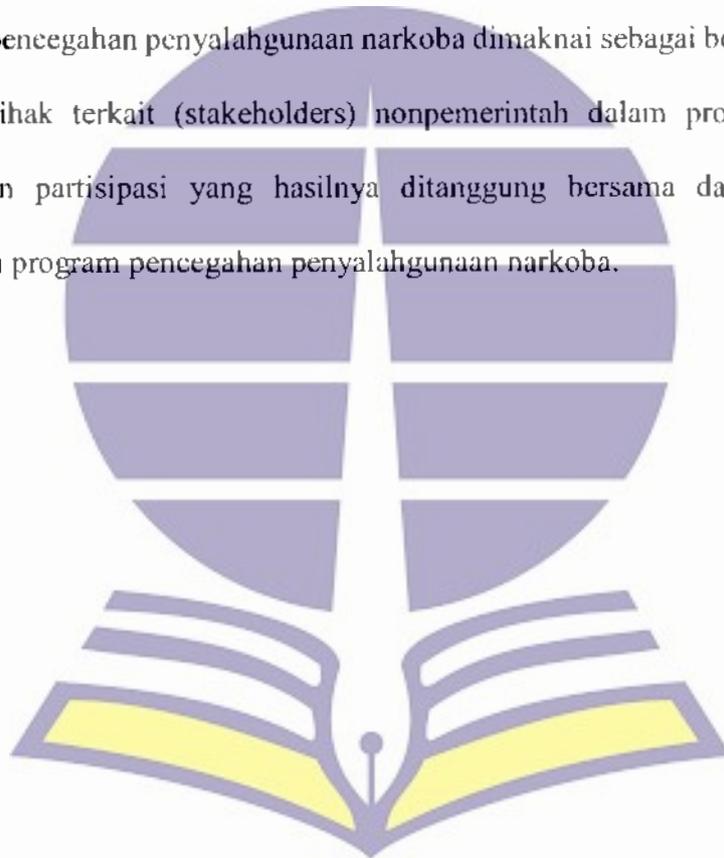
Fosler dalam Dwiyanto (2011:254) menjelaskan konsep kolaborasi dengan mengatakan bahwa kerjasama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama yang intensif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan alignment dalam tujuan, strategi, agenda, sumberdaya dan aktivitas. Kedua institusi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda membangun visi bersama (shared vision) dan berusaha mewujudkan

secara bersama-sama. Untuk itu mereka menyatukan atau setidaknya melakukan aliansi secara vertikal mulai dari sasaran, strategi sampai dengan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan bersama yang mereka yakin lebih bernilai dari tujuan yang dimiliki oleh masing-masing.

Shared vision menjadi dasar bagi masing-masing pihak dalam merumuskan tujuan, strategi, alokasi sumber daya, dan aktivitas masing-masing sehingga kesemuanya memiliki kontribusi terhadap terwujudnya *shared vision* tersebut. Melalui kemitraan memungkinkan kepolisian dapat untuk mengakses sumberdaya yang tersedia di institusi pemerintah yang dapat digunakan untuk mengatasi sejumlah permasalahan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan tujuan bersama yaitu menciptakan Indonesia yang terbebas dari penyalahgunaan narkoba.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat Dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika di Daerah Instimewa Yogyakarta oleh Fram Raditya Yunanda (2014). Berdasarkan uraian dan analisis dapat diperoleh upaya yang dilakukan oleh Polda DIY adalah upaya pre-emptif dengan pembinaan dan penyuluhan, upaya preventif dengan melakukan patrol dari kepolisian serta upaya represif dengan penangkapan dan penggeledahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalanggunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun upaya yang dilakukan masyarakat adalah pembinaan dan penyuluhan serta pendidikan dilingkungan keluarga, melakukan pencarian, memperoleh dan memberikan informasi kepada penegak hukum, dan membangun kerjasama dengan kepolisian serta BNN.

Berdasarkan penjelasan terhadap hasil penelitian peranan keluarga, masyarakat dan kepolisian berperan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta. Setiap elemen berkolaborasi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik, kreatif, transformasional dan mendatangkan hasil yang bermanfaat. Sejalan dengan konsep yang dijelaskan oleh O'Flynn dan Wanna (2008), "*collaborate is better, it is creative, transformational and involves beneficial outcomes*". Collaborative governance dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dimaknai sebagai bersatunya institusi publik dan pihak terkait (stakeholders) nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi yang hasilnya ditanggung bersama dalam pelaksanaan kebijakan atau program pencegahan penyalahgunaan narkoba.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran keluarga terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Purwakarta terbukti signifikan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kekuatan Kab. Purwakarta dalam peranan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu (a) penanaman ajaran agama dalam keluarga dengan keteladanan merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, (b) kasih sayang dalam keluarga (melindungi, menjaga dan merawat) merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dalam keluarga, (c) penanaman disiplin yang kuat tentang ibadah, (d) menjalankan tugas-tugas pendidikan dan menjaga nilai serta norma kesopanan merupakan hal yang harus dilakukan oleh keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan (e) kepala keluarga mengetahui mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.
2. Peran masyarakat terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Purwakarta terbukti signifikan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kekuatan Kab. Purwakarta dalam peranan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu, (a) masyarakat diberikan kesempatan untuk turut serta dalam mencegah penyalahgunaan narkoba melalui berbagai kegiatan sosialisasi, (b) adanya kegiatan positif pada organisasi kepemudaan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, (c) upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba masyarakat memerlukan norma aturan yang kuat dan (d) tingkah laku pemuka masyarakat turut mempengaruhi upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

3. Peran kepolisian terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Purwakarta terbukti secara signifikan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tindakan kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yaitu, (a) melakukan penangkapan pada bandar narkoba, (b) melakukan penangkapan pada pengedar narkoba, dan (c) melakukan penyidikan terhadap kasus narkoba dengan benar.
4. Secara keseluruhan keluarga, masyarakat, dan kepolisian secara bersama-sama berperan terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Purwakarta secara signifikan.

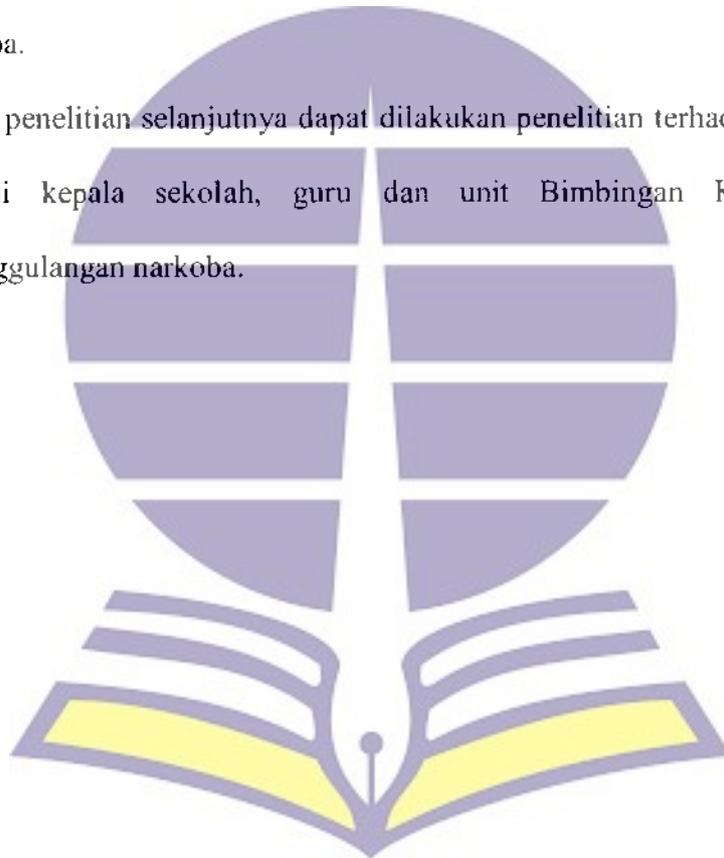
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran-saran dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran keluarga masyarakat dan kepolisian berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba sehingga perlu ditingkatkan terus berbagai bentuk kerjasama antara pihak-pihak tersebut guna mengoptimalkan upaya penanggulangan tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain kegiatan penyuluhan yang intensif dengan melibatkan masyarakat baik relawan maupun anggota keluarga, pelatihan-pelatihan bagi keluarga agar dapat mencegah secara dini bahaya narkoba di lingkungan keluarganya, meningkatkan peran kepala keluarga yang juga dibina oleh Kepolisian.
2. Melibatkan masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat /LSM) maupun sekolah dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan-kegiatan positif yang dapat menjadi alternatif bagi kegiatan penyuluhan yang bervariasi, yaitu dengan membuat kegiatan keagamaan, kegiatan olah raga dan

pengembangan bakat, dan sosialisasi langsung dengan mendatangkan narasumber dari pihak yang berwenang.

3. Dibentuknya fasilitator yang baik juga disarankan agar masyarakat mengetahui dengan benar peran fasilitator untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini juga dapat dilakukan dengan adanya peran koordinator dari masyarakat dan pemerintah dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba.
4. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian terhadap peran sekolah melalui kepala sekolah, guru dan unit Bimbingan Konseling dalam penanggulangan narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

Anhar, Ahmad i (2012). *Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi tentang Partisipasi Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo)* Jurnal Online. (Diakses pada tanggal 17 Januari 2017).

Alfiardi, Trias (2015). *Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Bahaya Narkotika Di Kabupaten Tegal* Jurnal Online. (Diakses pada tanggal 17 Januari 2017).

Dunn, William. (2000) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta

Noviani, Emun (2009). *Peran Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Pedukuhan Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta* Jurnal Online. (Diakses pada tanggal 17 Januari 2017).

Sulistyo, Bambang (2007). *Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Pada Gerakan Sadar Anti Narkoba (Gesank) Di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Malang)* Jurnal Online. (Diakses pada tanggal 17 Januari 2017).

Sugiono. (2012). *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta: Bandung

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011

Puslitbang Prov Jawa Barat. *2,5% Penduduk Jabar Pengguna Narkoba*. Tersedia Online. <http://pusdalishang.jabarprov.go.id/pusdalishang/infojaha-108.html>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2017).

Undang-Undang No. 35 tahun 2009

Yunanda, Fram Raditya (2014). *Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat Dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika di Daerah Instimewa Yogyakarta* Jurnal Online. (Diakses pada tanggal 17 Januari 2017).

Alwisol. (2008). Psikologi Kepribadian. Edisi revisi. Malang: UMM Press Badan Narkotika Kabupaten Pati. (2011).

Feist, J. & Feist, G.J. (2008). Theories of Personality. Edisi keenam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hariyanto. (2012). Penyalahgunaan Narkoba. Diakses 9 April 2013 dari <http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba/> Hidayat. I. (2013).

Keluarga yang Sehat-Bahagia Menurut Dadang Hawari. Diakses 10 Mei 2013 dari <http://madanionline.org/keluarga-yang-sehat-bahagia-menurut-prof-dr-dr-hdadang-hawari-psikiater/>

Kemenkumham. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Diakses 20 April 2013 dari http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/169/uu5_1997.pdf

Komhukum. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diakses 10 April 2013 dari <http://www.scribd.com/doc/48077951/KOMHUKUM-COMUU-Nomor-35-Tahun-2009-Tentang-Narkotika>

Kompas.com. (2013). Pengguna Narkoba di Kalangan Remaja Meningkat. Diakses 21 April 2013 dari <http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.Remaja.Meningkat>

Partodiharjo, S. (2004). Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta: Yayasan Karya Bakti.

Santrock, J.W. (2003). Adolscence: Perkembangan Remaja. Edisi Keenam. Alih Bahasa oleh Shinto B. Adelar & Sherly Saragih. Jakarta: Erlangga.

Santrock, J.W. (2000). Psychology. 7th edition International Edition. New York: McGraw-Hill Companies.

LAMPIRAN 1

KUESIONER PERANAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN KEPOLISIAN TERHADAP PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN PURWAKARTA

A. Pengantar

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Responden

Kuesioner ini berupaya untuk mengungkapkan peranan keluarga, masyarakat dan kepolisian terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian, yaitu identitas responden dan kuesioner inti. Sehubungan dengan maksud di atas, saya sangat mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk bersedia mengisi kuesioner ini sesuai dengan kondisi yang dirasakan. Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian untuk menyelesaikan studi S2 di Universitas Terbuka, sehingga hasil penelitian ini semata-mata hanya dipergunakan untuk kepentingan studi.

Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Peneliti

B. Petunjuk Pengisian:

1. Bacalah setiap pernyataan pada setiap item dengan teliti dan hati-hati.
2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom alternatif respon sesuai dengan yang Bapak/ Ibu alami dan rasakan terhadap peranan keluarga, masyarakat dan kepolisian terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta.
3. Keterangan TS=Tidak Setuju KS=Kurang Setuju S=Setuju SS=Sangat Setuju

I. Identitas Responden

Nama Responden :

Desa/Kelurahan Tempat Tinggal :

Pekerjaan :

- PNS Pegawai Swasta Wiraswasta Pelajar Mahasiswa
 Petani Seniman Pedagang Lainnya_____

Usia :

- < 20 Tahun 20 – 25 Tahun 26-30 Tahun 31-35 Tahun
 36-40 Tahun 41-45 Tahun 46-50 Tahun > 50 Tahun

Pendidikan Terakhir :

- SD SMP SMA/SMK Diploma Sarjana S2 S3

Penghasilan/bulan:

- < Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000-2.500.00 Rp. 2.600.000-3.500.000
 Rp. 3.600.000-5.000.000 > Rp. 5.000.000

Jumlah Anggota Keluarga yang tinggal satu rumah:

- < 5 orang 6-10 orang > 10 orang

Jumlah Anak dalam satu Keluarga:

- < 5 orang 6-10 orang > 10 orang

Rentang usia anak :

- < 10 Tahun 11 – 15 Tahun 16-20 Tahun 21-25 Tahun
 26-30 Tahun 31-35 Tahun 36-40 Tahun > 40 Tahun

II. Kuesioner

a. Peran Keluarga

12. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, menurut pendapat saya Keluarga sebagai tempat pertama dalam mendapatkan pendidikan tentang bahaya narkoba
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
13. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, keluarga sebagai tempat pertama yang sangat berperan dalam mencegah anggota keluarga terlibat dalam kasus tersebut.
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
14. Sebagai kepala keluarga, saya mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
15. Sebagai kepala keluarga, saya mengetahui cara penyebaran narkoba
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
16. Dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, menurut pendapat saya seharusnya keluarga dapat memberikan informasi awal tentang bahaya penggunaan narkoba sejak awal
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
17. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, menurut pendapat saya kepala keluarga/orang tua dapat menyampaikan bahaya penyalahgunaan narkoba.
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
18. Sebagai kepala keluarga, saya menjelaskan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada anggota keluarga:
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
19. Menurut pendapat saya, kasih sayang dalam keluarga (melindungi, menjaga dan merawat) merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dalam keluarga..
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
20. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, saya berpendapat bahwa rasa saling menghormati di dalam keluarga (patuh kepada orang tua, menghargai anggota keluarga yang lain) merupakan hal yang penting:
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju

21. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, saya berpendapat bahwa adanya peraturan yang ketat dalam keluarga khususnya terkait tata krama dan kesopanan merupakan hal yang sangat penting.
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
22. Adanya kesamaan pendapat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dalam keluarga merupakan hal yang penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba:.
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
23. Saya percaya bahwa penyalahgunaan narkoba dapat dicegah apabila ada rasa saling percaya diantara anggota keluarga.
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
24. Penanaman ajaran agama dalam keluarga dengan keteladanan merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba..
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
25. Sebagai kepala keluarga, saya mengetahui tentang cara mendampingi (memberi informasi, mengawasi pergaulan) anak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
26. Pengawasan orang tua yang baik (memantau perkembangan anak, memantau pergaulan anak) merupakan hal yang harus dilakukan jika ingin mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
27. Penanaman disiplin yang kuat tentang ibadah, menjalankan tugas-tugas pendidikan dan menjaga nilai serta norma kesopanan merupakan hal yang harus dilakukan oleh keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju

b. Peran Masyarakat

28. Tingkah laku pemuka masyarakat turut mempengaruhi upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
29. Adanya organisasi kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal merupakan sarana yang penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
30. Adanya kegiatan positif pada organisasi kepemudaan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
31. Teman sebaya dalam lingkungan tempat tinggal merupakan kelompok yang sangat berpengaruh dalam terjadinya penyalahgunaan narkoba .
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
32. Saya berpendapat bahwa seharusnya masyarakat diberikan kesempatan untuk turut serta mencegah penyalahgunaan narkoba melalui berbagai kegiatan sosialisasi.
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
33. Saya yakin, bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Masyarakat memerlukan norma aturan yang kuat.
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
34. Adanya kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat merupakan hal penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
35. Menurut pengamatan saya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba diperlukan pemberdayaan LSM.
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
36. Masyarakat saat ini sudah berperan sebagai fasilitator dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba:
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju

c. Peran Kepolisian

37. Saya percaya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian adalah dalam hal membina dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju

38. Saya percaya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian adalah dengan melakukan patrol/operasi rutin.

- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju

39. Saya percaya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian adalah dengan melakukan penangkapan pada bandar narkoba

- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju

40. Saya percaya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian adalah dengan melakukan penangkapan pada pengedar narkoba

- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju

41. Saya percaya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian adalah dengan melakukan penangkapan pada pengguna narkoba

- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju

42. Saya percaya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian adalah dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan narkoba

- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju

43. Saya percaya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian adalah dengan melakukan penyidikan terhadap kasus narkoba dengan benar.

- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju

d. Pencegahan Narkoba

44. Dengan adanya penyuluhan yang intensif dari organisasi kemasyarakatan saat ini tingkat pencegahan narkoba semakin baik.

- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju

45. Dengan adanya peran keluarga tingkat kesadaran tentang bahaya narkoba semakin baik

- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju

46. Dengan adanya penyuluhan yang intensif dari kepolisian, saat ini tingkat pencegahan narkoba semakin baik.
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
47. Dengan adanya kepedulian yang tinggi dari masyarakat, saat ini upaya pencegahan narkoba semakin berhasil
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
48. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dari berbagai pihak, menurut pengamatan saya saat ini masyarakat semakin waspada terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
49. Penyuluhan tentang hidup sehat dari aparat pemerintah sudah berhasil mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
50. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, menurut pengamatan saya diperlukan peran fasilitator.
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
51. Menurut pengamatan saya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba diperlukan peran koordinator dari masyarakat
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
52. Menurut pengamatan saya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba diperlukan peran koordinator dari pemerintah
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
53. Menurut pengamatan saya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba diperlukan peran koordinator dari kepolisian
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
54. Menurut pengamatan saya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba diperlukan terbina kondisi yang baik antara instansi terkait dengan masyarakat akan bahaya narkoba.
- Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju

LAMPIRAN 2

KUESIONER A (PERANAN KELUARGA)

1. UJI VALIDITAS

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	R Tabel	Keputusan
ITEM_1	100.53	72.947	.178	.734	.361	Tidak Valid
ITEM_2	100.30	69.321	.760	.713	.361	Valid
ITEM_3	100.20	70.855	.532	.721	.361	Valid
ITEM_4	101.10	81.748	-.442	.773	.361	Tidak valid
ITEM_5	100.40	69.834	.657	.716	.361	Valid
ITEM_6	100.37	70.861	.512	.721	.361	Valid
ITEM_7	100.33	71.816	.454	.725	.361	Valid
ITEM_8	100.27	69.995	.656	.716	.361	Valid
ITEM_9	100.30	69.666	.715	.715	.361	Valid
ITEM_10	100.30	69.183	.602	.714	.361	valid
ITEM_11	100.37	71.275	.545	.722	.361	Valid
ITEM_12	100.47	71.430	.631	.722	.361	Valid
ITEM_13	100.27	69.582	.618	.715	.361	Valid
ITEM_14	100.50	70.121	.730	.716	.361	Valid
ITEM_15	100.27	70.133	.639	.717	.361	Valid
ITEM_16	100.30	69.390	.751	.713	.361	Valid

Untuk membandingkan valid atau tidak valid yaitu apabila corrected item > r tabel , r tabelnya dilihat dari n= 30 yaitu 0, 361 maka item valid dari data di atas variable X1 (peranan keluarga) yaitu 14 item valid dan 2 item tidak valid.

2. UJI RELIABILITAS

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.736	16

Untuk melihat reliabilitas bisa disandingkan antara cronbach's alpha dengan r tabel = $0,736 > 0,361$ maka variabel x1 (peranan keluarga) datanya reliabel.

KUESIONER B (PERANAN MASYARAKAT)

1. UJI VALIDITAS

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	R Tabel	Keputusan
ITEM_1	55.10	29.596	.589	.722	.361	Valid
ITEM_2	55.10	30.025	.483	.728	.361	Valid
ITEM_3	55.00	29.857	.431	.728	.361	Valid
ITEM_4	54.97	28.749	.641	.713	.361	Valid
ITEM_5	54.90	28.239	.710	.707	.361	Valid
ITEM_6	54.86	29.552	.441	.726	.361	Valid
ITEM_7	54.93	28.067	.762	.704	.361	Valid
ITEM_8	55.48	27.830	.352	.727	.361	Tidak Valid
ITEM_9	55.00	28.429	.544	.714	.361	Valid

Untuk membandingkan valid atau tidak valid yaitu apabila corrected item $>$ r tabel, r tabelnya dilihat dari $n = 30$ yaitu $0,361$ maka item valid dari data di atas variable X2 (peranan masyarakat) yaitu 8 item valid dan 1 item tidak valid.

2. UJI RELIABILITAS

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.741	9

Untuk melihat reliabilitas bisa disandingkan antara cronbach's alpha dengan r tabel = $0,741 > 0,361$ maka variabel X2 (peranan masyarakat) datanya reliabel.

LAMPIRAN 3

KUESIONER C (PERANAN KEPOLISIAN)

1. UJI VALIDITAS

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	R Tabel	Keputusan
ITEM_1	46.10	26.093	.759	.758	.361	Valid
ITEM_2	46.00	25.793	.713	.757	.361	Valid
ITEM_3	45.93	26.202	.746	.760	.361	Valid
ITEM_4	45.87	26.533	.707	.764	.361	Valid
ITEM_5	45.97	26.516	.672	.765	.361	Valid
ITEM_6	46.00	25.862	.802	.755	.361	Valid
ITEM_7	46.10	26.369	.702	.763	.361	Valid

Untuk membandingkan valid atau tidak valid yaitu apabila $\text{corrected item} > r \text{ tabel}$, r tabelnya dilihat dari $n = 30$ yaitu 0,361 maka item valid dari data di atas variable X3 (peranan kepolisian) yaitu 7 item valid dan 0 item tidak valid.

2. UJI RELIABILITAS

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.788	7

Untuk melihat reliabilitas bisa disandingkan antara cronbach's alpha dengan $r \text{ tabel} = 0,788 > 0,361$ maka variabel X3 (peranan kepolisian) datanya reliabel.

LAMPIRAN 4

KUESIONER D (PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA)

1. UJI VALIDITAS

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	R Tabel	Keputusan
ITEM_1	70.40	63.490	.479	.753	.361	Valid
ITEM_2	70.27	64.340	.514	.755	.361	Valid
ITEM_3	70.27	61.995	.645	.745	.361	Valid
ITEM_4	70.27	62.685	.739	.746	.361	Valid
ITEM_5	70.17	62.626	.707	.746	.361	Valid
ITEM_6	70.23	64.323	.504	.755	.361	Valid
ITEM_7	70.30	62.424	.610	.747	.361	Valid
ITEM_8	70.33	60.437	.772	.736	.361	Valid
ITEM_9	70.27	61.237	.817	.739	.361	Valid
ITEM_10	70.23	62.116	.798	.743	.361	Valid
ITEM_11	70.07	62.823	.677	.748	.361	Valid

Untuk membandingkan valid atau tidak valid yaitu apabila corrected item > r tabel, r tabelnya dilihat dari $n = 30$ yaitu 0,361 maka item valid dari data di atas variable Y (pencegahan penyalahgunaan narkoba) yaitu 11 item valid dan 0 item tidak valid.

2. UJI RELIABILITAS

Cronbach's Alpha	N of Items
.766	11

Untuk melihat reliabilitas bisa disandingkan antara cronbach's alpha dengan r tabel = 0,766 > 0,361 maka variabel (pencegahan penyalahgunaan narkoba) datanya reliabel.

LAMPIRAN 5

5. PENGARUH PERANAN KELUARGA TERHADAP PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN PURWAKARTA

e. Korelasi

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,800-1,000	Sangat Kuat

Correlations

	PERANAN KELUARGA	PENCEGAHAN NARKOBA
Pearson Correlation	1	.681**
Sig. (2-tailed)		.000
N	144	144
Pearson Correlation	.681**	1
Sig. (2-tailed)	.000	
N	144	144

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pada hasil uji korelasi di atas, ditemukan korelasi antara Peranan Keluarga terhadap Pencegahan Narkoba sebesar 0,681 dengan tingkat signifikansi $p = 0,000 < \alpha = 0,05$ kemudian Jika dibandingkan dengan nilai r_{tabel} sebesar 0,159 diperoleh berdasarkan jumlah $N = 144$, maka nilai r_{hitung} 0,681 lebih besar daripada r_{tabel} ($0,681 > 0,159$). Kesimpulannya terdapat hubungan antara Peranan Keluarga dengan Pencegahan Narkoba berada pada tingkat kuat dan berharga positif.

f. Uji Signifikansi Korelasi

Uji signifikansi korelasi dilakukan melalui uji t dengan bantuan program SPSS versi 17.00 for windows sebagai berikut:

Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.700	1.990		3.367	.000
PERANAN KELUARGA	.425	.038	.681	11.067	.000

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh t_{hitung} sebesar 11,067 sedangkan pada taraf signifikansi 0,05 dengan dk $(144-2) = 142$ diperoleh angka sebesar 1,645. Ternyata t_{hitung} 11,067 > t_{tabel} 1,645. Dengan demikian terdapat korelasi positif dan signifikan antara peranan keluarga dengan pencegahan narkoba.

g. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis determinan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variable X1 terhadap variabel Y yang berlaku untuk seluruh populasi yang diteliti. Koefisien determinasi ini dihitung dengan menggunakan SPSS versi 17.0 for windows, sebagai berikut:

Model Summary

	Change Statistics				
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.463 ^a	122.475	1	142	.000

a. Predictors: (Constant), PERANAN KELUARGA

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh hasil R Square sebesar 0,463 atau 46,3 % . Hal ini berarti bahwa peranan keluarga memberikan kontribusi sebesar 46,3% terhadap pencegahan narkoba sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain.

h. Analisis Regresi

Untuk mengetahui bentuk korelasi peranan keluarga terhadap pencegahan narkoba maka dilakukan analisis regresi sederhana dengan menggunakan program *SPSS versi 17.00 for windows*, dengan hasil sebagai berikut :

Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.700	1.990		3.367	.001
PERANAN KELUARGA	.425	.038	.681	11.067	.000

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh regresi arah regresi (b) sebesar 0,425 dan konstanta sebesar 6,700. Maka dapat digambarkan bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut oleh persamaan regresi

$$\hat{Y} = 6,700 + 0,425 X_1$$

Setelah mengetahui keterkaitan antara peranan keluarga dengan pencegahan narkoba, selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi korelasi dengan menggunakan uji F. Uji signifikansi ini untuk menentukan apakah peranan keluarga signifikan terhadap pencegahan narkoba.

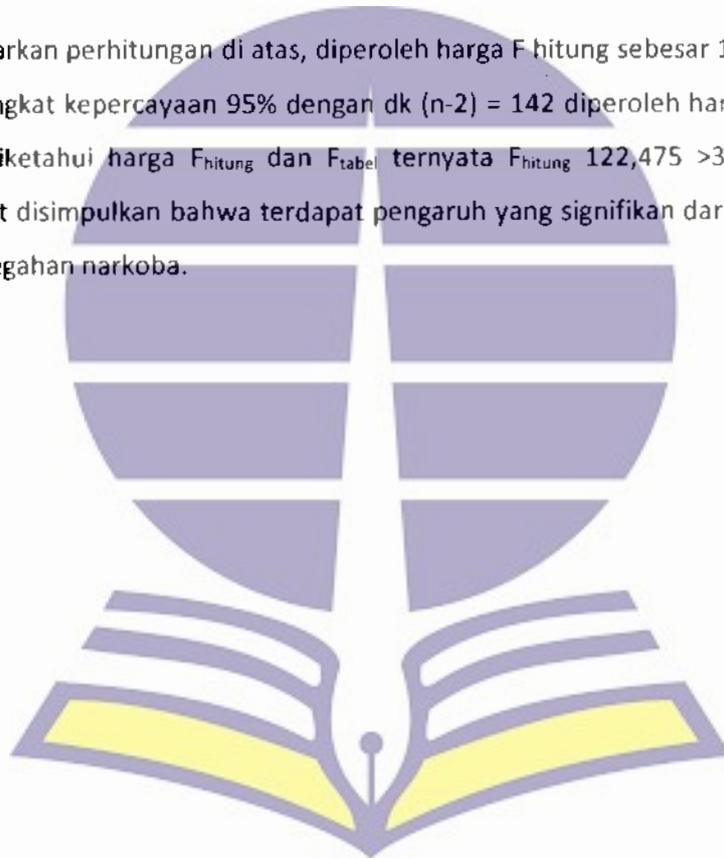
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	844.129	1	844.129	122.475	.000 ^a
Residual	978.698	142	6.892		
Total	1822.826	143			

a. Predictors: (Constant), PERANAN KELUARGA

b. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga F hitung sebesar 122,475 sedangkan F tabel pada tingkat kepercayaan 95% dengan dk (n-2) = 142 diperoleh harga F tabel sebesar 3,84. Setelah diketahui harga F_{hitung} dan F_{tabel} , ternyata F_{hitung} 122,475 > 3,84 F_{tabel} . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari peranan keluarga terhadap pencegahan narkoba.



LAMPIRAN 6

6. PENGARUH PERANAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATENPURWAKARTA

e. Korelasi

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,800-1,000	Sangat Kuat

Correlations

	PERANAN MASYARAKAT	PENCEGAHAN NARKOBA
Pearson Correlation	1	.563**
Sig. (2-tailed)		.000
N	144	144
Pearson Correlation	.563**	1
Sig. (2-tailed)	.000	
N	144	144

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pada hasil uji korelasi di atas, ditemukan korelasi antara Peranan Keluarga terhadap Pencegahan Narkoba sebesar 0,563 dengan tingkat signifikansi $p = 0,000 < \alpha = 0,05$ kemudian Jika dibandingkan dengan nilai r_{tabel} sebesar 0,159 diperoleh berdasarkan jumlah $N = 144$, maka nilai r_{hitung} 0,563 lebih besar daripada r_{tabel} ($0,563 > 0,159$). Kesimpulannya

terdapat hubungan antara Peranan Masyarakat dengan Pencegahan Narkoba berada pada tingkat **kuat** dan berharga **positif**.

f. Uji Signifikansi Korelasi

Uji signifikansi korelasi dilakukan melalui uji t dengan bantuan program SPSS versi 17.00 for windows sebagai berikut:

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	15.007	1.691		8.872	.000
PERANAN MASYARAKAT	.571	.070	.563	8.117	.000

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh t_{hitung} sebesar 8,117 sedangkan pada taraf signifikansi 0,05 dengan dk $(144-2) = 142$ diperoleh angka sebesar 1,645. Ternyata t_{hitung} 8,117 > t_{tabel} 1,645. Dengan demikian terdapat korelasi positif dan signifikan antara peranan masyarakat dengan pencegahan narkoba.

g. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis determinan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variable X1 terhadap variabel Y yang berlaku untuk seluruh populasi yang diteliti. Koefisien determinasi ini dihitung dengan menggunakan SPSS versi 17.0 for windows, sebagai berikut:

	R Square	Adjusted R Square	F Change	Change Statistics				
				R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.317	.312	2.961	.317	65.888	1	142	.000

a. Predictors: (Constant), PERANAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh hasil R Square sebesar 0,317 atau 31,7 % . Hal ini berarti bahwa peranan masyarakat memberikan kontribusi sebesar 31,7% terhadap pencegahan narkoba sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain.

h. Analisis Regresi

Untuk mengetahui bentuk korelasi peranan masyarakat terhadap pencegahan narkoba maka dilakukan analisis regresi sederhana dengan menggunakan program SPSS versi 17.00 for windows, dengan hasil sebagai berikut :

Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	15.007	1.691		8.872	.000
PERANAN MASYARAKAT	.571	.070	.563	8.117	.000

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh regresi arah regresi (b) sebesar 0,571 dan konstanta sebesar 15.007. Maka dapat digambarkan bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut oleh persamaan regresi

$$\hat{Y} = 15.007 + 0,571 X_1$$

Setelah mengetahui keterkaitan antara peranan masyarakat dengan pencegahan narkoba, selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi korelasi dengan menggunakan uji F. Uji signifikansi ini untuk menentukan apakah peranan masyarakat signifikan terhadap pencegahan narkoba.

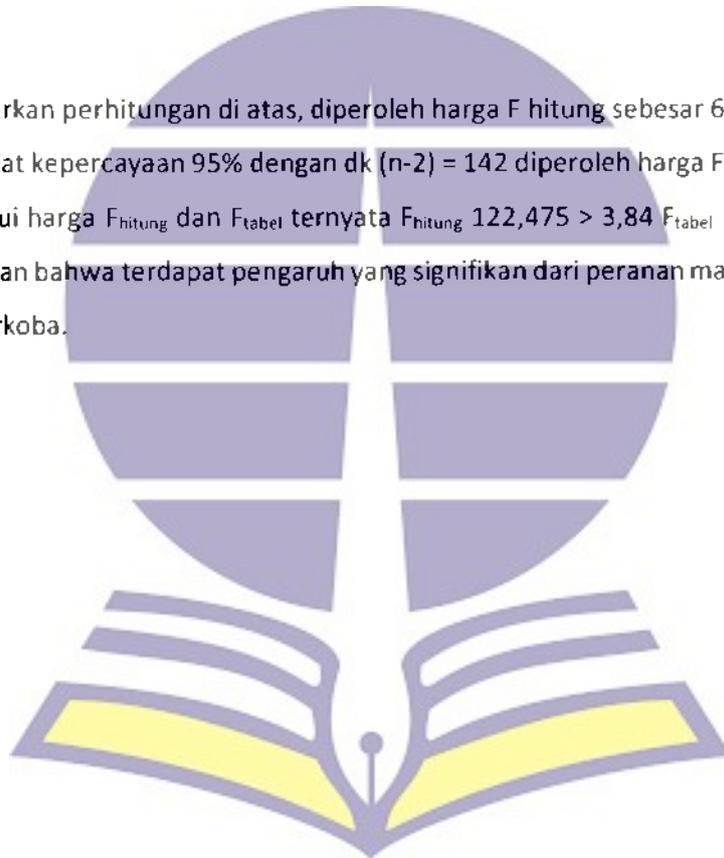
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	577.729	1	577.729	65.888	.000 ^a
Residual	1245.097	142	8.768		
Total	1822.826	143			

a. Predictors: (Constant), PERANAN MASYARAKAT

b. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga F hitung sebesar 65,888 sedangkan F tabel pada tingkat kepercayaan 95% dengan dk (n-2) = 142 diperoleh harga F tabel sebesar 3,84. Setelah diketahui harga F_{hitung} dan F_{tabel} ternyata $F_{hitung} 122,475 > 3,84 F_{tabel}$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari peranan masyarakat terhadap pencegahan narkoba.



LAMPIRAN 7

7. PENGARUH PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATENPURWAKARTA

e. Korelasi

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,800-1,000	Sangat Kuat

Correlations

	PERANAN POLISI	PENCEGAHAN NARKOBA
Pearson Correlation	1	.672**
Sig. (2-tailed)		.000
N	144	144
Pearson Correlation	.672**	1
Sig. (2-tailed)	.000	
N	144	144

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pada hasil uji korelasi di atas, ditemukan korelasi antara Peranan Kepolisian terhadap Pencegahan Narkoba sebesar 0,672 dengan tingkat signifikansi $p = 0,000 < \alpha = 0,05$ kemudian Jika dibandingkan dengan nilai r_{tabel} sebesar 0,159 diperoleh berdasarkan jumlah $N = 144$, maka nilai r_{hitung} 0,672 lebih besar daripada r_{tabel} (0,672 > 0,159). Kesimpulannya

terdapat hubungan antara Peranan Masyarakat dengan Pencegahan Narkoba berada pada tingkat **kuat** dan berharga **positif**.

f. Uji Signifikansi Korelasi

Uji signifikansi korelasi dilakukan melalui uji t dengan bantuan program SPSS versi 17.00 for windows sebagai berikut:

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.619	2.046		3.235	.002
PERANAN KEPOLISIAN	.621	.057	.672	10.801	.000

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh t_{hitung} sebesar 10,801 sedangkan pada taraf signifikansi 0,05 dengan dk $(144-2) = 142$ diperoleh angka sebesar 1,645. Ternyata t_{hitung} 10,801 > t_{tabel} 1,645. Dengan demikian terdapat korelasi positif dan signifikan antara peranan Kepolisian dengan pencegahan narkoba.

g. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis determinan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variable X1 terhadap variabel Y yang berlaku untuk seluruh populasi yang diteliti. Koefisien determinasi ini dihitung dengan menggunakan SPSS versi 17.0 for windows, sebagai berikut:

				Change Statistics				
				R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.451	.447	2.655	.451	116.667	1	142	.000

a. Predictors: (Constant), PERANAN KEPOLISIAN

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh hasil R Square sebesar 0,451 atau 45,1 % . Hal ini berarti bahwa peranan Kepolisian memberikan kontribusi sebesar 45,1% terhadap pencegahan narkoba sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain.

h. Analisis Regresi

Untuk mengetahui bentuk korelasi peranan masyarakat terhadap pencegahan narkoba maka dilakukan analisis regresi sederhana dengan menggunakan program SPSS versi 17.00 for windows, dengan hasil sebagai berikut :

Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.619	2.046		3.235	.002
PERANAN KEPOLISIAN	.621	.057	.672	10.801	.000

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh regresi arah regresi (b) sebesar 0,621 dan konstanta sebesar 6,619. Maka dapat digambarkan bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut oleh persamaan regresi

$$\hat{Y} = 6,619 + 0,621 X_1$$

Setelah mengetahui keterkaitan antara peranan kepolisian dengan pencegahan narkoba, selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi korelasi dengan menggunakan uji F. Uji signifikansi ini untuk menentukan apakah peranan kepolisian signifikan terhadap pencegahan narkoba.

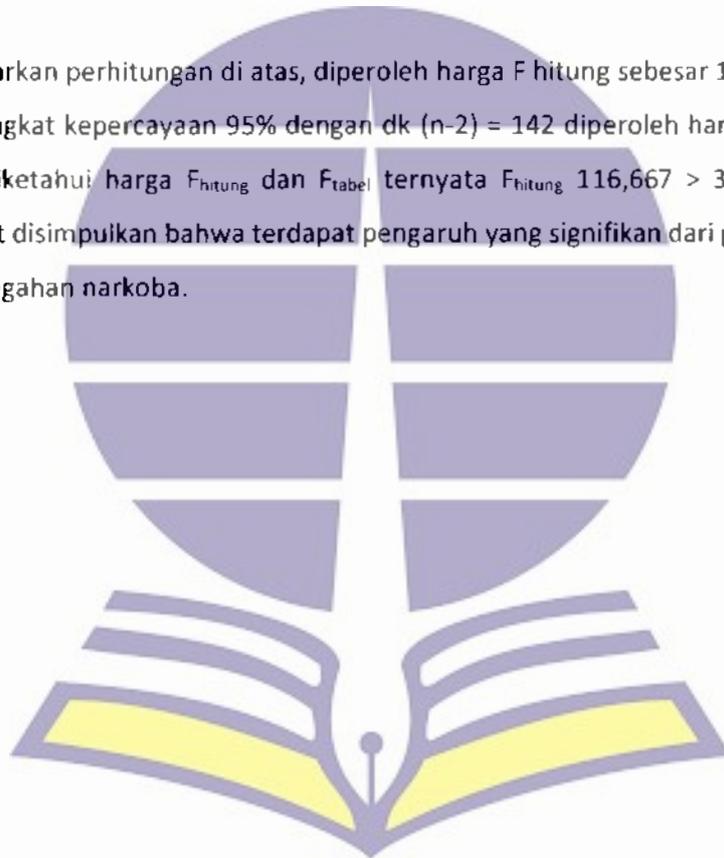
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	822.153	1	822.153	116.667	.000 ^a
Residual	1000.674	142	7.047		
Total	1822.826	143			

a. Predictors: (Constant), PERANAN KEPOLISIAN

b. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga F hitung sebesar 116,667 sedangkan F tabel pada tingkat kepercayaan 95% dengan dk (n-2) = 142 diperoleh harga F tabel sebesar 3,84. Setelah diketahui harga F_{hitung} dan F_{tabel} ternyata $F_{hitung} 116,667 > 3,84 F_{tabel}$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari peranan kepolisian terhadap pencegahan narkoba.



LAMPIRAN 8

8. PENGARUH PERANAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN KEPOLISIAN TERHADAP PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATENPURWAKARTA

e. Analisis Koefesien Korelasi Ganda

Analisis koefesien ganda dimaksudkan untuk mengetahui derajat keterkaitan atau hubungan antara peranan keluarga, masyarakat dan kepolisian berkelanjutan (secara bersama-sama/simultan) terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba . untuk uji korelasi ini menggunakan rumus korelasi ganda.

Model Summary										
						Change Statistics				
						R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.799 a	.638	.630	2.172	.638	82.159	3	140	.000	

a. Predictors: (Constant), PERANAN KELUARGA, PERANAN MASYARAKAT, PERANAN KEPOLISIAN

Dari tabel di atas diketahui hasil korelasi (R) sebesar 0,799 yang berarti bahwa terdapat korelasi ganda yang positif dari PERANAN KELUARGA, PERANAN MASYARAKAT DAN PERANAN KEPOLISIAN terhadap PENYALAHGUNAAN NARKOBA. Berdasarkan kriteria harga koefesien korelasi r_{hitung} 0,799 menunjukkan tingkat hubungan KUAT. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi ganda positif yang sedang antara PERANAN KELUARGA, PERANAN MASYARAKAT DAN PERANAN KEPOLISIAN terhadap PENYALAHGUNAAN NARKOBA

f. Uji Signifikansi Korelasi Ganda

Uji signifikansi korelasi dilakukan melalui uji t dengan bantuan program SPSS versi 17.00 for windows sebagai berikut :

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1162.514	3	387.505	82.159	.000 ^a
Residual	660.313	140	4.717		
Total	1822.826	143			

a. Predictors: (Constant), PERANAN POLISI, PERANAN KELUARGA, PERANAN MASYARAKAT

b. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga F hitung sebesar 82,159 sedangkan F_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% dengan $dk (n-2) = 142$ diperoleh harga F_{tabel} sebesar 3,84. Setelah diketahui harga F hitung dan F tabel ternyata $F_{hitung} 82,159 > 3,84 F_{tabel}$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi ganda positif yang signifikan antara PERANAN KELUARGA, PERANAN MASYARAKAT DAN PERANAN KEPOLISIAN terhadap PENYALAHGUNAAN NARKOBA.

g. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis determinan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel X_1 dan variabel X_2, X_3 terhadap variabel Y yang berlaku untuk seluruh populasi yang diteliti. Koefisien determinasi ini dihitung dengan menggunakan SPSS versi 17.0 for windows, sebagai berikut :

Model Summary

	R Square	Adjusted R Square	Change Statistics	F	Sig.	Change Statistics			
						R Square Change	F Change	Sig. F Change	
1	.799 ^a	.638	.630	2.172	.638	82.159	3	140	.000

a. Predictors: (Constant), PERANAN KELUARGA, PERANAN MASYARAKAT, PERANAN KEPOLISIAN

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh hasil R Square sebesar 0,638 atau 63,8%. Hal ini berarti bahwa PERANAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN KEPOLISIAN memberikan kontribusi sebesar 63,8% terhadap PENCEGAHAN NARKOBA, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain.

h. Analisis Regresi Ganda

Untuk mengetahui bentuk korelasi PERANAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN KEPOLISIAN terhadap PENCEGAHAN NARKOBA maka dilakukan analisis regresi sederhana dengan menggunakan program SPSS versi 17.00 for windows, dengan hasil sebagai berikut :

Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.653	1.944		850	.000
PERANAN KELUARGA	.267	.039	.427	6.900	.000
PERANAN MASYARAKAT	.124	.065	.122	1.901	.000
PERANAN POLISI	.382	.057	.414	6.746	.000

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA

Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	20.114	7.024		2.864	.000
Kualitas Kehidupan Kerja	.548	.110	.347	4.990	.000
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	.424	.109	.272	3.903	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Guru

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh regresi arah regresi (b1) sebesar 0,267 , (b2) sebesar 0,124 dan (b3) sebesar 0,382 konstanta sebesar (a) 1,653. Maka dapat digambarkan bentuk hubungan antara ketiga variabel tersebut oleh persamaan regresi

$$\hat{Y} = 1,653 + 0,267 X1 + 0,124 X2 + 0,382X3$$

Hal ini dapat menjelaskan bahwa peningkatan satu unit Peranan Keluarga, Peranan Masyarakat dan Peranan Kepolisian akan diikuti dengan peningkatan nilai pencegahan narkoba.

